

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2015 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 29 April 2015  
Kepala,

**Surya Chandra Surapaty**

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	49
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	110
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	118
F. Pengungkapan Penting Lainnya	129
VI. Lampiran dan Daftar	



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KEUANGAN  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PER 31 DESEMBER 2015**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Unaudited untuk Tahun Anggaran 2015 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 23 Februari 2016  
  
**Mieke Selva Sangian**  
NIP. 19560919 197602 2 001

**Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**  
Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650 PO. BOX : 296 JKT 13013  
Telp. : (021) 8098018, 8009029-45-53-69-77-85 Fax. : (021) 8008554 Website : <http://www.bkkbn.go.id>

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Audited yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 29 April 2015  
Kepala,

**Surya Chandra Surapaty**

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Audited Per 31 Desember 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.7.041.296.891,00 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp.2.624.712.556.905,00 atau mencapai 79,03 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.321.233.218.264,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp.1.429.361.133.114,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.713.789.624.970,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.675.812.535.498,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.202.987.958,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.39.555.984.688,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.10.058.824.467,00 dan Rp.1.419.302.308.647,00.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.2.284.303.606,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.2.426.927.630.371,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.2.424.643.326.765,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.5.209.077.437,00 dan Rp.0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.2.419.434.249.328,00.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp1.169.339.201.202,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp.2.419.434.249.328,00, kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar dan transaksi antar entitas senilai total Rp.249.963.107.445,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp.1.419.302.308.647,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan tau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (A)****BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN AUDITED  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015  
DAN 31 DESEMBER 2014***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% thd Angg	TA 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	7.041.296.891,00	0,00	7.236.343.852,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>7.041.296.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.236.343.852,00</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	382.907.352.000,00	337.714.880.224,00	88,20	311.616.767.569,00
Belanja Barang	B.2.2	2.849.183.890.264,00	2.212.110.665.577,00	77,64	1.767.281.984.569,00
Belanja Modal	B.2.3	89.141.976.000,00	74.887.011.104,00	84,01	16.939.023.139,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.321.233.218.264,00</b>	<b>2.624.712.556.905,00</b>	<b>79,03</b>	<b>2.095.837.775.277,00</b>

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (B)

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN AUDITED  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015  
 DAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% thd Angg	TA 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	7.041.296.891,00	0,00	7.236.343.852,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>7.041.296.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.236.343.852,00</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
<b>Rupiah Murni</b>					
Belanja Pegawai	B.2.1	382.907.352.000,00	337.714.880.224,00	88,20	311.616.767.569,00
Belanja Barang	B.2.2.1	2.822.608.414.000,00	2.186.081.987.652,00	77,45	1.767.281.984.569,00
Belanja Modal	B.2.3	89.141.976.000,00	74.887.011.104,00	84,01	16.939.023.139,00
<b>Pinjaman dan Hibah</b>					
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.2.2.2	26.575.476.264,00	26.028.677.925,00	97,94	22.279.417.237,00
Belanja Modal	B.2.3	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.321.233.218.264,00</b>	<b>2.624.712.556.905,00</b>	<b>79,03</b>	<b>2.118.117.192.514,00</b>



II. NERACA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NERACA AUDITED  
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014  
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	4.231.553.016,00	563.831.666,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	6.018.061.479,00	3.745.740.846,00
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.3	35.033.993.658,00	16.999.998,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.5	1.576.478.193,00	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.6	51.860.880,00	61.050.802,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan			(2.805.481,00)
Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.7	(259.304,00)	
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti rugi (Netto)		51.601.576,00	58.245.321,00
Persediaan	C.8	666.877.937.048,00	483.034.071.547,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>713.789.624.970,00</b>	<b>487.418.889.378,00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.8	368.748.205.366,00	368.748.205.366,00
Peralatan dan Mesin	C.9	366.818.286.540,00	326.102.804.773,00
Gedung dan Bangunan	C.10	290.848.130.308,00	274.532.374.276,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.11	24.571.657.281,00	22.383.169.932,00
Aset Tetap Lainnya	C.12	2.865.600.871,00	2.854.024.301,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.13	4.855.304.933,00	5.178.827.082,00
Akumulasi Penyusutan	C.14	(382.894.649.801,00)	(341.990.362.418,00)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>675.812.535.498,00</b>	<b>657.809.043.312,00</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.15	204.007.998,00	244.078.956,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.16	(1.020.040,00)	(2.235.168,00)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		202.987.958,00	241.843.788,00
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.17	8.499.808.374,00	8.499.808.374,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.18	(8.499.808.374,00)	(8.499.808.374,00)
Piutang Jangka Panjang Lainnya(Netto)		-	-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>202.987.958,00</b>	<b>241.843.788,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.19	37.939.703.660,00	26.941.175.520,00
Aset Lain-Lain	C.20	12.140.035.243,00	11.010.664.965,00
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.21	(10.523.754.215,00)	(9.338.312.274,00)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>39.555.984.688,00</b>	<b>28.613.528.211,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.429.361.133.114,00</b>	<b>1.174.083.304.689,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.22	5.405.878.401,00	3.945.079.543,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.23	421.393.050,00	221.057.333,00
Uang Muka dan KPPN	C.24	4.231.553.016,00	563.831.666,00
Utang Jangka Pendek Lainnya			14.134.945,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>10.058.824.467,00</b>	<b>4.744.103.487,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>10.058.824.467,00</b>	<b>4.744.103.487,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.25	1.419.302.308.647,00	1.169.339.201.202,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>1.419.302.308.647,00</b>	<b>1.169.339.201.202,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1.429.361.133.114,00</b>	<b>1.174.083.304.689,00</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
LAPORAN OPERASIONAL AUDITED  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015  
DAN 31 DESEMBER 2014**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2015	2014
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1	2.284.303.606,00	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.284.303.606,00</b>	<b>-</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	337.960.084.202,00	-
Beban Persediaan	D.3	59.342.592.630,00	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.160.505.887.346,00	-
Beban Pemeliharaan	D.5	26.791.245.958,00	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	321.650.076.277,00	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	473.777.720.563,00	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	46.903.784.700,00	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(3.761.305,00)	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>2.426.927.630.371,00</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(2.424.643.326.765,00)</b>	<b>-</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	362.206.000,00	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	907.635.890,00	-
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>		<b>(545.429.890,00)</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	5.847.998.566,00	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	93.491.239,00	-
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>5.754.507.327,00</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>5.209.077.437,00</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(2.419.434.249.328,00)</b>	<b>-</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Beban Luar Biasa		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	D.14	<b>(2.419.434.249.328,00)</b>	<b>-</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS AUDITED  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015  
DAN 31 DESEMBER 2014**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2015	2014
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	1.169.339.201.202,00	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	E.2	(2.419.434.249.328,00)	-
<b>PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN</b>	E.3	11.979.353.967,00	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	11.979.353.967,00	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban	E.3.2	-	-
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR</b>	E.4	1.978.509.209,00	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.1	67.552.323,00	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.2	-	-
Koreksi Atas Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.3	1.914.656.886,00	-
Lain-lain	E.4.4	(3.700.000,00)	-
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.5	2.655.439.493.597,00	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.5.1	2.598.683.878.980,00	-
Diterima Dari Entitas Lain	E.5.2	(7.299.209.494,00)	-
Transfer Keluar	E.5.3	(623.790.641.850,00)	-
Transfer Masuk	E.5.4	662.151.224.320,00	-
Pengesahan Hibah Langsung	E.5.5	25.694.241.641,00	-
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	E.6	249.963.107.445,00	-
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.7	1.419.302.308.647,00	-

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

*Dasar Hukum Entitas  
dan  
Rencana Strategis*

Sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) terutama pada Agenda Prioritas Nomor 5 (lima) yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" melalui "Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana". Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia yang di dalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental). BKKBN bertanggungjawab untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental.

Terkait dengan integritas pendudukan dengan pembangunan diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi kependudukan yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, maka BKKBN turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan mengarahkan persebaran penduduk. Pembangunan kependudukan juga merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Perjalanan pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan penduduk muda (*youth dependency ratio*) di Indonesia membentuk keadaan ideal yang menghasilkan potensi terjadinya bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia kerja hampir dua kali dibandingkan dengan jumlah penduduk dibawah 15 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia telah menurun dari 54/100 pada tahun 2000 menjadi 51/100 pada tahun 2011 dan turun menjadi 50/100 tahun 2012. Kondisi ini akan menurun terus mencapai angka terendah pada tahun 2020 sampai 2030, dimana angkanya berkisar 44 per 100, dengan catatan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Bonus demografi, jika dimanfaatkan akan menghasilkan jendela peluang atau *window of opportunity* untuk memicu pertumbuhan ekonomi termasuk peningkatan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa. Pada saat bersamaan akan menghasilkan kualitas penduduk usia produktif yang tinggi sehingga menjadi modal pembangunan bangsa dengan karakter keuletan dan ketangguhan sebagai unsur utama dalam mewujudkan ketahanan nasional guna mengantisipasi berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Untuk itu diperlukan kebijakan, strategi dan upaya yang optimal dalam pemanfaatan peluang bonus demografi tersebut melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP), angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun), serta menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur/WUS (15-49 tahun).

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: **Pertama** berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah,

struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; **Kedua** berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; **Ketiga** adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan; **Keempat** adalah data dan informasi penduduk; **Kelima** adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memperkuat implementasi Program KKBPK, terutama yang meliputi ke-5 (lima) aspek diatas, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran strategis BKKBN yang harus bermuara pada visi dan misi pembangunan 2015-2019 pada Agenda Prioritas Pembangunan Nomor 5 (lima) yaitu untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPJN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen akan turut mensukseskan Agenda Prioritas No.5 (didalam Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia **dengan visinya menjadi “Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”**, pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya *Total Fertility Rate* (TFR) menjadi 2,1 dan *Net Reproductive Rate* (NRR) = 1 pada tahun Keluarga Berencana Nasional berkomitmen dengan Visi BKKBN adalah **”Penduduk Tumbuh Seimbang 2015”**. Visi tersebut mengacu kepada fokus pembangunan pada Renca2025, serta keluarga berkualitas ditandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam upaya mendukung perwujudan visi di atas, BKKBN memiliki misi:

- 1) Mengarusutamakan pembangunan berwawasan Kependudukan,
- 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
- 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga,
- 4) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta
- 5) Membangun dan menerapkan

budaya kerja organisasi secara konsisten.

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing serta dalam upaya penguatan pelaksanaan 4 (empat) Sub Urusan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, BKKBN akan berupaya dalam tujuan paling utama untuk : <sup>a)</sup> Menguatkan akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang merata dan berkualitas, <sup>b)</sup> Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) maupun Non-MKJP, <sup>c)</sup> Meningkatkan pemahaman remaja mengenai KB dan KR serta <sup>d)</sup> Penguatan tata kelola, penelitian dan pengembangan bidang KB. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, telah disusun sasaran strategis BKKBN 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15 – 49 tahun);
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR);
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet-Need*);
5. Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun);
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).

Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan subbidang kependudukan dan keluarga berencana dalam lima tahun ke depan adalah :

<sup>1)</sup> Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, <sup>2)</sup> Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, <sup>3)</sup> Menguatkan advokasi dan KIE (Konsultasi, Informasi dan Edukasi) tentang KB dan KR di seluruh wilayah, <sup>4)</sup> Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia, <sup>5)</sup> Menyeraskan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana, <sup>6)</sup> Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah, <sup>7)</sup> Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu serta <sup>8)</sup> Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 30 Juni 2015 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah BKKBN seperti eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup BKKBN adalah 42 satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 42 satker (100%).

Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

### Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA - BKKBN

#### IV. IV. IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (UNAUDITED/UNAUDITED)\*

BA	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
068	01	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	9	-	32	-	1	-	-	-	42

Keterangan:

M : Menyampaikan

TM : Tidak Menyampaikan

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi

Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt

Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt

Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt

Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt

Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt, Font color: Custom Color(33,88,104)

Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt, Bold, Not Italic, Font color: Custom Color(33,88,104)

Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt, Font color: Custom Color(33,88,104)

Formatted: Left, Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted Table

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt

Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt

Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt

Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt



Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan asset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt

Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt

Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt

Formatted: Font: Arial Narrow, 12 pt

#### Basis Akuntansi

### A.3. Basis Akuntansi

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Dasar Pengukuran

### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional adalah sebagai berikut:

### Pendapatan-LRA

#### (1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### Pendapatan-LO

#### (2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

#### *Aset Lancar*

#### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang

- o mempunyai kekuatan hukum tetap.
- o Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap

#### b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### Penyusutan Aset Tetap

#### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,

aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.



## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Tahun Anggaran 2015, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan sumber dana yang berasal dari hibah langsung (dalam dan luar negeri), adanya penambahan anggaran atas perekrutan pegawai baru, adanya program penghematan belanja barang pemerintah serta adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2015	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan PNBP Lainnya	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	-
<b>Belanja</b>		
<b>Rupiah Murni</b>		
Belanja Pegawai	381.857.688.000,00	382.907.352.000,00
Belanja Barang	2.826.407.638.000,00	2.822.608.414.000,00
Belanja Modal	86.392.416.000,00	89.141.976.000,00
<b>Pinjaman dan Hibah</b>		
Belanja Pegawai	0,00	0,00
Belanja Barang	0,00	26.575.476.264,00
Belanja Modal	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.294.657.742.000,00</b>	<b>3.321.233.218.264,00</b>

Sedangkan apabila dilihat dari program BKKBN maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Uraian Program	2015	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>068.01 - Rupiah Murni</b>		
068.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya BKKBN	184.479.634.000,00	184.479.634.000,00
068.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
068.01.04 Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN	54.431.200.000,00	54.431.200.000,00
068.01.06 Program Kependudukan dan KB	3.046.746.908.000,00	3.046.746.908.000,00
<b>068.10 - Hibah Langsung Dalam Negeri</b>		
068.10.06 Program Kependudukan dan KB	0,00	22.200.000.000,00
<b>068.11 - Hibah Langsung Luar Negeri</b>		
068.11.06 Program Kependudukan dan KB	0,00	4.375.476.264,00
<b>Total Belanja</b>	<b>3.294.657.742.000,00</b>	<b>3.321.233.218.264,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, selama Tahun Anggaran 2015 BKKBN memperoleh sumber dana dari APBN dan Hibah. Sumber dana Hibah BKKBN terdiri dari :

1. Hibah Langsung Dalam Negeri

1.a) Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Barat (Satker 017393)

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 No.978.3/Kep-044-VA/KBKK/2015 dan 354/KU.600/J1/2015 tertanggal 26 Januari 2015, yang kemudian dilakukan Addendum pada

tanggal 12 Oktober 2015 terdapat kesepakatan untuk melaksanakan Perjanjian Belanja Hibah Daerah/Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) berupa uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Barat senilai Rp.20.200.000.000,00. HLDN ini telah disahkan oleh Kementerian Keuangan RI sesuai Surat No.S-3031/PR.8/2015 tanggal 18 November 2015 dengan Register HLDN No. 2JS9W5SA dan telah disahkan dalam DIPA No.DIPA-068.01.2.01739312014 Tanggal 14 Nopember 2014.

Belanja Hibah Daerah tersebut digunakan untuk peningkatan kinerja program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana Propinsi Jawa Barat berupa Belanja Operasional, Evaluasi dan Monitoring Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) yang dianggarkan dengan menggunakan MAK 521219 (Belanja Barang Non-Operasional Lainnya). [\(dokumen terlampir\)](#)

1.b) Perwakilan BKKBN Prop. Banten (Satker 631610)

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Perwakilan BKKBN Propinsi Banten tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Perwakilan BKKBN Tahun 2015 No.978/39-Huk/2015 dan 2058/RC.002/J.1/2015 tertanggal 09 Juni 2015 terdapat kesepakatan untuk melaksanakan Perjanjian Belanja Hibah Daerah/Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) berupa uang dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Perwakilan BKKBN Propinsi Banten senilai Rp.2.000.000.000,00. HLDN ini telah disahkan oleh Kementerian Keuangan RI dengan Register HLDN No. 2CZECQ4 dan telah disahkan dalam DIPA Revisi No.068.01.2.631610/2015 Rev.7 Tanggal 17 Desember 2015.

Pemberian hibah uang tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Prop. Banten dan bertujuan untuk mendukung pembiayaan atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Prop. Banten dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Prop. Banten Tahun 2015. [\(dokumen terlampir\)](#)

## 2. Hibah Langsung Luar Negeri

### 2.a) Kedeputan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR – Satker 649505)

Berdasarkan *Grant Agreement UNFPA* untuk *Country Program Action Plan 2011-2015* yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2011 antara BAPPENAS dengan UNFPA sebesar USD 29.000.000,00 dan telah disahkan *Grant Agreement*-nya oleh Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan tanggal 12 April 2011 sesuai Surat No.S-301/PU/2011 dengan Nomor Register 71509501 telah digulirkan Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) UNFPA pada Kedeputan Bidang KBKR selama Tahun Anggaran 2011-2015.

HLLN UNFPA kepada BKKBN di TA 2015 telah disahkan dalam Revisi Anggaran sesuai Surat DJPB Kanwil - Kementerian Keuangan No.S-4510/WPB.12/2015 tanggal 02 Desember 2015 dan termuat dalam DIPA Petikan Revisi ke-05 No.SP DIPA-068.01.1.649505/2015 dengan nilai hibah sebesar Rp.4.365.367.000,00 dimana nilai hibah tersebut merupakan nilai uang HLLN yang disepakati dan telah ditandatangani di awal TA 2015. Saat pengajuan pengesahan belanja hibah di Kementerian Keuangan pada bulan Maret 2015 dengan SPHL No.151400000000082 nilai pendapatan hibah menjadi Rp.4.375.476.264,00 dimana nilai hibah tersebut merupakan nilai uang HLLN yang telah diterima oleh satker sampai dengan akhir TA 2015.

[\(dokumen terlampir\)](#)

*Realisasi Pendapatan*  
*Rp.7.041.296.891,00*

### **B. 1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.7.041.296.891,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. BKKBN tidak menetapkan estimasi pendapatan di tahun 2015, sehingga persentase realisasi terhadap estimasi pendapatan adalah 0,00%.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

MAP	Uraian	2015		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	97.326.000,00	0,00%
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	-	264.880.000,00	0,00%
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	607.997.330,00	0,00%
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan instansi Kesehatan lainnya	-	1.147.768,00	0,00%
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	7.694.993,00	0,00%
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	-	1.420.403,00	0,00%
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	290.038.614,00	0,00%
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	1.529.340,00	0,00%
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	-	990.313.201,00	0,00%
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	25.900,00	0,00%
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	757.702.144,00	0,00%
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	3.707.564.085,00	0,00%
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	68.269.106,00	0,00%
423956	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	-	1.076.128,00	0,00%
423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	-	42.500.000,00	0,00%
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	201.811.879,00	0,00%
<b>Jumlah</b>		-	<b>7.041.296.891,00</b>	<b>0,00%</b>

Realisasi Pendapatan periode 1 Januari s/d 31 Desember TA 2015 dibandingkan dengan periode 1 Januari s/d 31 Desember TA 2014 terdapat penurunan sebesar 2,81 persen. Hal ini disebabkan :

1. Penurunan pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya terhadap asset tetap yang dihentikan penggunaannya sebesar Rp.145.762.780,00 atau turun 35,50 persen;
2. Penurunan pendapatan lembaga keuangan (jasa giro) yang telah disetorkan pada TA.2015 sebesar Rp.109.164.512,00 atau turun 93,42 persen;
3. Penurunan pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp.51.711.576,00 atau turun 15,13 persen;

4. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL turun sebesar Rp.1.404.803.298,00 atau turun 64,96 persen dibandingkan periode tahun anggaran 2014.

**Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014**

MAP	URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK/TURUN	%
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	97.326.000,00	-	97.326.000,00	~
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	264.880.000,00	410.642.780,00	(145.762.780,00)	(35,50)
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	607.997.330,00	88.650.503,00	519.346.827,00	585,84
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan instansi Kesehatan lainnya	1.147.768,00	-	1.147.768,00	~
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	7.694.993,00	116.859.505,00	(109.164.512,00)	(93,42)
423319	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.420.403,00	50.000,00	1.370.403,00	2.740,81
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	290.038.614,00	341.750.190,00	(51.711.576,00)	(15,13)
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	1.529.340,00	-	1.529.340,00	~
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	990.313.201,00	917.091.486,00	73.221.715,00	7,98
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	25.900,00	-	25.900,00	~
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	757.702.144,00	2.162.505.442,00	(1.404.803.298,00)	(64,96)
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	3.707.564.085,00	3.153.414.418,00	554.149.667,00	17,57
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	68.269.106,00	-	68.269.106,00	~
423956	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	1.076.128,00	-	1.076.128,00	~
423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	42.500.000,00	-	42.500.000,00	~
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	201.811.879,00	53.980.028,00	147.831.851,00	273,86
	<b>Jumlah</b>	<b>7.041.296.891,00</b>	<b>7.244.944.352,00</b>	<b>(203.647.461,00)</b>	<b>(2,81)</b>

Rincian pendapatan per satker dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (MAP 423122) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423122
1	Kalimantan Tengah	44.500.000,00
2	Papua	52.826.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>97.326.000,00</b>

2. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya (MAP 423129) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423129	No	Satker	MAK 423129
1	SESTAMA	63.500.000,00	7	Sulawesi Tengah	6.600.000,00
2	Jawa Timur	82.700.000,00	8	NTT	31.450.000,00
3	Riau	20.850.000,00	9	Maluku Utara	7.100.000,00
4	Sumatera Selatan	22.100.000,00	10	Bangka Belitung	4.080.000,00
5	Lampung	21.600.000,00			
6	Kalimantan Barat	4.900.000,00		<b>TOTAL</b>	<b>264.880.000,00</b>

3. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan (MAP 423141) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423141	No	Satker	MAK 423141
1	SESTAMA	485.071.452,00	13	Kalimantan Tengah	5.603.376,00
2	Jawa Tengah	292.800,00	14	Kalimantan Selatan	820.000,00
3	DI. Yogyakarta	3.235.568,00	15	Kalimantan Timur	11.089.380,00
4	Jawa Timur	28.968.007,00	16	Sulawesi Utara	855.400,00
5	Aceh	4.420.000,00	17	Sulawesi Tengah	42.360.000,00
6	Sumatera Utara	540.000,00	18	Sulawesi Tenggara	5.200.000,00
7	Sumatera Barat	3.534.000,00	19	B a l i	2.468.400,00
8	R i a u	2.868.920,00	20	NTB	264.000,00
9	Jambi	1.236.564,00	21	NTT	1.173.900,00
10	Sumatera Selatan	434.916,00	22	Papua	1.993.548,00
11	Lampung	1.223.452,00	23	Bengkulu	2.202.768,00
12	Kalimantan Barat	2.140.879,00		<b>TOTAL</b>	<b>607.997.330,00</b>

4. Pendapatan rumah sakit dan intansi kesehatan lainnya (MAP 423211) pada satker KBKR sebesar Rp.1.147.768,00.
5. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan(Jasa Giro) (MAP 423221) pada beberapa satker sebagai berikut :sebesar Rp.7.694.993,-.

No	Satker	MAK 423221
1	KBKR	4.383.225,00
2	DITVOKKOM	2.167.561,00
3	Jawa Barat	764.357,00
4	Jawa Timur	4.835,00
5	Riau	275.414,00
6	Jambi	99.601,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.694.993,00</b>

6. Pendapatan Bunga lainnya (MAP 423319) pada satker Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.1.420.403,00.
7. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (MAP 423752) pada beberapa satker sebagai berikut :



No	Satker	MAK 423752	No	Satker	MAK 423752
1	KBKR	39.415.736,00	10	Sulawesi Tengah	5.258.579,00
2	ADPIN	56.863.752,00	11	Bali	3.672.699,00
3	Jawa Barat	33.806.354,00	12	NTB	2.899.095,00
4	Jawa Tengah	61.730.307,00	13	Maluku Utara	400.000,00
5	D.I Yogyakarta	125.012,00	14	Banten	4.055.000,00
6	Jawa Timur	21.249.543,00	15	Gorontalo	2.332.500,00
7	Sumatera Utara	43.769.826,00	16	Kepulauan Riau	3.503.949,00
8	Sumatera Barat	2.940.762,00	17	Sulawesi Barat	3.685.500,00
9	Kalimantan Timur	4.330.000,00		<b>TOTAL</b>	<b>290.038.614,00</b>

8. Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara (MAP 423921) pada satker Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp.1.529.340,00.
9. Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (MAP 423922) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423922	No	Satker	MAK 423922
1	SESTAMA	13.500.000,00	9	Lampung	152.641.250,00
2	KBKR	10.474.000,00	10	Kalteng	89.723.171,00
3	KSPK	41.649.593,00	11	Kalsel	41.310.067,00
4	LATBANG	14.390.900,00	12	Sulut	30.531.540,00
5	DITVOKOM	542.152.909,00	13	Kepri	20.513.293,00
6	KEPENDUDUKAN	2.086.600,00	14	Papua Barat	2.300.000,00
7	Jabar	22.693.128,00			
8	Sumbar	6.346.750,00		<b>TOTAL</b>	<b>990.313.201,00</b>

10. Pendapatan dari penutupan rekening (MAP 423931) pada satker Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.25.900,00.
11. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (MAP 423951) pada beberapa satker berikut ini:

No	Satker	MAK 423951	No	Satker	MAK 423951
1	SESTAMA	225.252.464,00	17	Sulawesi Selatan	4.293.105,00
2	KSPK	12.565.700,00	18	Sulawesi Tenggara	35.492.908,00
3	DALDUK	2.650.700,00	19	Maluku	8.097.890,00
4	Jawa Barat	119.869.666,00	20	Bali	154.100,00
5	Jawa Tengah	21.662.176,00	21	NTB	4.096.817,00
6	D.I Yogyakarta	22.229.989,00	22	NTT	24.793.005,00
7	Jawa Timur	1.855.000,00	23	Papua	16.635.818,00
8	Aceh	6.817.590,00	24	Bengkulu	26.166,00
9	Sumatera Utara	39.699.958,00	25	Maluku Utara	22.169.992,00
10	Sumatera Barat	87.500.515,00	26	Banten	6.519.592,00
11	Riau	38.088,00	27	Bangka Belitung	15.563.947,00
12	Jambi	4.420.173,00	28	Gorontalo	22.978.876,00
13	Kalimantan Barat	435,00	29	Kepulauan Riau	2.304.000,00
14	Kalimantan Selatan	23.251.588,00	30	Sulawesi Barat	4.992.401,00
15	Kalimantan Timur	732.050,00			
16	Sulawesi Utara	21.037.435,00		<b>TOTAL</b>	<b>757.702.144,00</b>

12. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (MAP 423952) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423952	No	Satker	MAK 423952
1	SESTAMA	171.709.097,00	22	Kalimantan Selatan	566.730.450,00
2	KBKR	69.780.850,00	23	Kalimantan Timur	3.899.860,00
3	KSPK	71.850.605,00	24	Sulawesi Utara	13.896.300,00
4	LATBANG	21.472.180,00	25	Sulawesi Tengah	48.122.500,00
5	ADVOKASI	130.681.757,00	26	Sulawesi Selatan	237.820.416,00
6	PUSLITBANG	9.670.000,00	27	Sulawesi Tenggara	40.548.925,00
7	ADPIN	9.000.000,00	28	Maluku	141.000,00
8	DALDUK	115.200.400,00	29	Bali	22.874.433,00
9	Jawa Barat	37.921.250,00	30	NTB	46.440.000,00
10	Jawa Tengah	205.377.750,00	31	NTT	91.744.800,00
11	D.I Yogyakarta	12.390.000,00	32	Papua	2.756.399,00
12	Jawa Timur	4.600.000,00	33	Bengkulu	39.526.000,00
13	Aceh	264.567.547,00	34	Maluku Utara	19.196.000,00
14	Sumatera Utara	75.535.733,00	35	Banten	2.820.000,00
15	Sumatera Barat	779.012.903,00	36	Bangka Belitung	16.442.500,00
16	Riau	364.687.416,00	37	Gorontalo	14.477.050,00
17	Jambi	70.186.250,00	38	Kepulauan Riau	7.692.000,00
18	Sumatera Selatan	948.800,00	39	Papua Barat	15.606.000,00
19	Kalimantan Barat	86.009.414,00	40	Sulawesi Barat	14.979.900,00
20	Kalimantan Tengah	965.800,00		<b>TOTAL</b>	<b>3.707.282.285,00</b>

13. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (MAP 423953) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423953
1	SESTAMA	24.460.281,00
2	Sumatera Barat	35.604.777,00
3	BALI	4.204.048,00
4	Nusa Tenggara Barat	4.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>68.269.106,00</b>

14. Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL (MAP 423956) pada Satker Deputi Bidang KSPK sebesar Rp.1.076.128,00.

15. Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL (MAP 423958) pada Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Tengah sebesar Rp.42.500.000,00;

16. Pendapatan Anggaran Lain-lain (MAP 423999) pada beberapa satker berikut ini :

No	Satker	MAK 423958	No	Satker	MAK 423958
1	SESTAMA	2.909.060,00	8	Bali	576.592,00
2	Aceh	50.000,00	9	Papua	445,00
3	Sumatera Barat	72,00	10	Banten	197.983.100,00
4	Jambi	368,00	11	Kepulauan Riau	4,00
5	Sumatera Selatan	239.141,00	12	Sulawesi Barat	5.918,00
6	Sulawesi Tengah	46.915,00			
7	Maluku	264,00		<b>TOTAL</b>	<b>201.811.879,00</b>

Realisasi Belanja

Rp.2.620.677.459.580,00

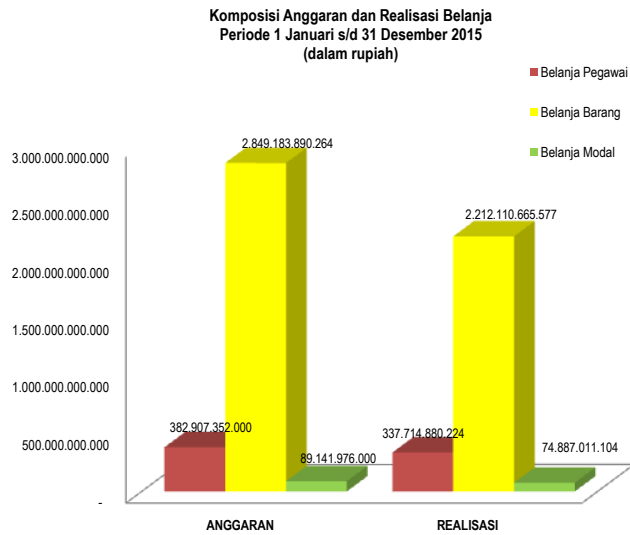
## B.2. BELANJA

Realisasi belanja BKKBN selama Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.2.620.677.459.580,00 atau 78,91% dari anggaran belanja sebesar Rp.3.321.223.109.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 tersaji sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2015

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
<b>Rupiah Murni</b>			
Belanja Pegawai	382.907.352.000,00	338.426.826.074,00	88,38
Belanja Barang	2.822.608.414.000,00	2.189.943.946.284,00	77,59
Belanja Modal	89.141.976.000,00	74.943.304.380,00	84,07
<b>Pinjaman dan Hibah</b>			
Belanja Barang	26.575.476.264,00	26.028.677.925,00	97,94
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>3.321.233.218.264,00</b>	<b>2.629.342.754.663,00</b>	<b>79,17</b>
Pengembalian Belanja	0,00	(4.630.197.758,00)	
<b>Total Belanja</b>	<b>3.321.233.218.264,00</b>	<b>2.624.712.556.905,00</b>	<b>79,03</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2015 sebesar Rp.2.624.712.556.905,00, mengalami kenaikan sebesar 23,73% dibandingkan pada TA 2014 sebesar Rp.2.118.117.192.514,00.

Hal ini disebabkan antara lain :

1. Meningkatnya kebutuhan belanja pegawai sebagai akibat dari kenaikan jumlah dan gaji pegawai BKKBN TA.2015 antara lain :
  - 1.a. Adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan pegawai yang mengalami kenaikan pangkat dan golongan pegawai;
  - 1.b. Adanya kenaikan jumlah pegawai baru BKKBN yang telah direkrut dengan periode mulai masa tugasnya di Tahun Anggaran 2015;
2. Meningkatnya rencana kebutuhan belanja barang pada TA 2015 antara lain :
  - 2.a. Adanya peningkatan pengadaan belanja barang diserahkan kepada masyarakat berupa kebutuhan persediaan alat kontrasepsi;
  - 2.b. Adanya peningkatan kegiatan dukungan operasional pendataan keluarga;
  - 2.c. Adanya peningkatan kegiatan pengadaan formulir pendataan keluarga;
  - 2.d. Adanya peningkatan kegiatan pengadaan peta keluarga dan kupon;
  - 2.e. Adanya peningkatan kegiatan pengadaan sewa dalam rangka penggerakkan

ekonomi keluarga melalui Kegiatan Hari Keluarga Nasional (Harganas).

Meskipun kebutuhan dan realisasinya meningkat seperti yang telah diuraikan diatas, namun jika dilihat dari prosentase capaian Realisasi Mak 52, TA 2015 mengalami penurunan dibandingkan TA 2014 (prosentase realisasi MAK 52 mencapai 82,93% di TA 2014, kemudian turun di TA 2015 menjadi 77,78%). Penurunan capaian dari segi prosentase ini disebabkan antara lain :

- 2.f. Pembatasan pertemuan rapat diluar kantor dalam rangka peningkatan efisiensi & efektifitas kerja aparatur yang mengakibatkan kegiatan rapat di luar kantor yang biasanya dilakukan di hotel menjadi rapat di dalam kantor diluar jam kerja (RDK);
- 2.g. Pengadaan Lansia kit senilai Rp.3.637.500.000,00 dan Pengadaan Toolkit Penggerakan Lini Lapangan senilai Rp.7.500.000.000,00 tidak terserap karena waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi;
- 2.h. Pengadaan Alat kontrasepsi yang tidak terserap 100,00% dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi;
- 2.i. Kegiatan dukungan operasional pendataan keluarga yang dianggarkan sebesar Rp.8.666.310.000,00 (yaitu 2.888.770 KK x Rp.3.000,00) hanya dapat terealisasi kurang lebih 2.300.000 KK (79,62%);
- 2.j. Kegiatan printing output hasil pendataan keluarga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan proses unggah data yang belum selesai sehingga tidak dapat dilakukan printing output hasil pendataan keluarga;
- 2.k. Terdapat kabupaten/kota yang sama sekali tidak mau mengklaim dana penggerakan serta adanya kabupaten/kota dengan pencapaian MOP tertinggi namun tidak mengklaim dana penggerakan. Hal tersebut dikarenakan dana tersebut ada dalam APBD, kemudian belum jelasnya sistem kapitasi dan non kapitasi BPJS untuk biaya MOW di RS sehingga Kabupaten/Kota masih ragu untuk mengklaim dana penggerakan MOW tersebut;
- 2.l. Kegiatan pengadaan formulir pendataan keluarga dengan pagu Rp.872.669.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp.675.543.330,00 (77,41%);
- 2.m. kegiatan pengadaan peta keluarga & kupon dengan pagu Rp.606.453.750,00 hanya terealisasi sebesar Rp.212.453.750,00 (35,03%);
- 2.n. kegiatan pengadaan sewa dalam rangka penggerakan ekonomi keluarga

melalui Harganas dengan pagu Rp.1.455.190.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp.1.191.635.500,00 (81,89%)

- 2.o. Tidak terlaksananya kegiatan pelatihan MOP, MOW, dan CTU dokter dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan.
  - 2.p. Pada kegiatan peningkatan operasional lini lapangan, dasar penghitungan biaya adalah biaya operasional untuk tiap PLKB dengan asumsi tiap desa 1 PLKB. Sementara dari 1551 desa yang dibiayai, hanya sebagian yang memiliki PLKB. Dengan demikian sebagian desa yang tidak memiliki PLKB tidak dapat mengklaim dana tersebut.
3. Meningkatnya rencana kebutuhan belanja modal dalam rangka mendukung rencana kerja strategis BKKBN antara lain :
    - 3.a. Belanja Modal Tanah pada Perwakilan BKKBN Propinsi Kepulauan Riau meningkat terkait dengan telah terselesaikannya masalah administrasi tanah milik pemerintah daerah (Otorita Batam) yang telah dihibahkan kepada BKKBN;
    - 3.b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin hampir diseluruh satker BKKBN mengalami peningkatan dalam hal perencanaan anggaran dan realisasinya;
    - 3.c. Belanja Modal Lainnya TA 2015 naik naik 6.543,98 persen dari TA 2014 dimana kenaikan terbesar terdapat pada Satker Sekretariat Utama. Kenaikan tersebut terkait dengan Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin berupa Paket Pengadaan Reengineering Peremajaan Sarana Teknologi dan Informasi yang meliputi peremajaan infrastruktur jaringan pusat dan provinsi, peremajaan video conference dan peningkatan kinerja jaringan informasi dan teknologi, peremajaan sarana teknologi dan informasi dan maintenance video conference.

#### **Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014**

Uraian Akun dan Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)	
	Periode 1 Jan s/d 31 Deseember 2015	Periode 1 Jan s/d 31 Deseember 2014	Rp	%
<b>I. TRANSAKSI KAS</b>				
<b>I.1. Rupiah Murni</b>				
51 Belanja Pegawai	337.714.880.224,00	311.616.767.569,00	26.098.112.655,00	8,38
52 Belanja Barang	2.186.081.987.652,00	1.767.281.984.569,00	418.800.003.083,00	23,70
53 Belanja Modal	74.887.011.104,00	16.939.023.139,00	57.947.987.965,00	342,10
<b>I.2. Pinjaman dan Hibah</b>				
52 Belanja Barang	26.028.677.925,00	22.279.417.237,00	3.749.260.688,00	16,83
<b>JUMLAH TRANSAKSI KAS</b>	<b>2.624.712.556.905,00</b>	<b>2.118.117.192.514,00</b>	<b>506.595.364.391,00</b>	<b>23,92</b>
<b>II. TRANSAKSI NON KAS</b>				
52 Belanja Barang	-	-	-	-
<b>JUMLAH TRANSAKSI NON KAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.624.712.556.905,00</b>	<b>2.118.117.192.514,00</b>	<b>506.595.364.391,00</b>	<b>23,92</b>

Belanja Pegawai  
Rp.337.714.880.224,00

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.337.714.880.224,00 dan Rp.311.616.767.569,00 atau terjadi kenaikan sebesar 8,38% dari TA yang lalu. Begitupula jika dilihat dari prosentase capaian Realisasi Mak 51, TA 2015 juga mengalami kenaikan dibandingkan TA 2014 (prosentase realisasi MAK 51 mencapai 87,44% di TA 2014, kemudian naik di TA 2015 menjadi 88,38%). Meskipun begitu prosentase kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan sehingga Realisasi Belanja Pegawai dapat dikatakan stabil.

Kenaikan realisasi sebesar 8,38% disebabkan karena meningkatnya kebutuhan belanja pegawai sebagai akibat dari :

1. Adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan pegawai yang mengalami kenaikan pangkat dan golongan pegawai;
2. Adanya kenaikan jumlah pegawai baru BKKBN yang telah direkrut dengan periode mulai masa tugasnya di Tahun Anggaran 2015.



**Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014**

Uraian	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2015	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2014	Naik/(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	151.697.314.380,00	138.247.090.120,00	13.450.224.260,00	9,73
Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.129.195,00	2.593.117,00	536.078,00	20,67
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	10.727.127.540,00	9.758.864.180,00	968.263.360,00	9,92
Belanja Tunj. Anak PNS	2.714.364.245,00	2.541.561.428,00	172.802.817,00	6,80
Belanja Tunj. Struktural PNS	12.413.200.000,00	11.941.370.000,00	471.830.000,00	3,95
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.528.980.000,00	3.542.455.000,00	(13.475.000,00)	(0,38)
Belanja Tunj. PPh PNS	4.312.614.438,00	3.815.188.871,00	497.425.567,00	13,04
Belanja Tunj. Beras PNS	7.913.264.070,00	7.293.856.290,00	619.407.780,00	8,49
Belanja Uang Makan PNS	20.455.093.600,00	14.418.933.000,00	6.036.160.600,00	41,86
Belanja tunjangan khusus papua PNS	568.825.000,00	554.065.000,00	14.760.000,00	2,66
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri	55.344.000,00	-	55.344.000,00	0,00
Belanja Tunj. Lain-lain PNS		80.715.230,00	(80.715.230,00)	0,00
Belanja Tunj. Umum PNS	4.702.315.000,00	4.536.685.000,00	165.630.000,00	3,65
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS, TNI/POLRI	23.357.700,00	-	23.357.700,00	0,00
Belanja Pegawai Non PNS	40.150.000,00	-	40.150.000,00	0,00
Belanja Uang Lembur	150.148.000,00	202.988.000,00	(52.840.000,00)	(26,03)
Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Keg)	119.121.598.906,00	115.841.414.188,00	3.280.184.718,00	2,83
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	<b>338.426.826.074,00</b>	<b>312.777.779.424,00</b>	<b>25.649.046.650,00</b>	<b>8,20</b>
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>(711.945.850,00)</i>	<i>(1.161.011.855,00)</i>	<i>449.066.005,00</i>	<i>(38,68)</i>
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>337.714.880.224,00</b>	<b>311.616.767.569,00</b>	<b>26.098.112.655,00</b>	<b>8,38</b>

## B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.2.208.075.568.252,00 dan Rp.1.767.281.984.569,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 23,61 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan kebutuhan belanja barang antara lain :

1. Adanya peningkatan pengadaan belanja barang diserahkan kepada masyarakat berupa kebutuhan persediaan alat kontrasepsi;
2. Adanya peningkatan kegiatan dukungan operasional pendataan keluarga;
3. Adanya peningkatan kegiatan pengadaan formulir pendataan keluarga;
4. Adanya peningkatan kegiatan pengadaan peta keluarga dan kupon;
5. Adanya peningkatan kegiatan pengadaan sewa dalam rangka penggerakkan ekonomi keluarga melalui Kegiatan Hari Keluarga Nasional (Harganas).

Meskipun kebutuhan dan realisasinya meningkat seperti yang telah diuraikan diatas, namun jika dilihat dari prosentase capaian Realisasi Mak 52, TA 2015 mengalami penurunan dibandingkan TA 2014 (prosentase realisasi MAK 52 mencapai 82,93% di TA 2014, kemudian turun di TA 2015 menjadi 77,78%). Penurunan capaian dari segi prosentase ini disebabkan antara lain :

1. Pembatasan pertemuan rapat diluar kantor dalam rangka peningkatan efisiensi & efektifitas kerja aparatur yang mengakibatkan kegiatan rapat di luar kantor yang biasanya dilakukan di hotel menjadi rapat di dalam kantor diluar jam kerja (RDK);
2. Pengadaan Lansia kit senilai Rp.3.637.500.000,00 dan Pengadaan Toolkit Penggerakan Lini Lapangan senilai Rp.7.500.000.000,00 tidak terserap karena waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi;
3. Pengadaan Alat kontrasepsi yang tidak terserap 100,00% dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi;
4. Kegiatan dukungan operasional pendataan keluarga yang dianggarkan sebesar Rp.8.666.310.000,00 (yaitu 2.888.770 KK x Rp.3.000,00) hanya dapat terealisasi kurang lebih 2.300.000 KK (79,62%);
5. Kegiatan printing output hasil pendataan keluarga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan proses unggah data yang belum selesai sehingga tidak dapat dilakukan printing output hasil pendataan keluarga;
6. Terdapat kabupaten/kota yang sama sekali tidak mau mengklaim dana

penggerakan serta adanya kabupaten/kota dengan pencapaian MOP tertinggi namun tidak mengklaim dana penggerakan. Hal tersebut dikarenakan dana tersebut ada dalam APBD, kemudian belum jelasnya sistem kapitasi dan non kapitasi BPJS untuk biaya MOW di RS sehingga Kabupaten/Kota masih ragu untuk mengklaim dana penggerakan MOW tersebut;

7. Kegiatan pengadaan formulir pendataan keluarga dengan pagu Rp.872.669.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp.675.543.330,00 (77,41%);
8. kegiatan pengadaan peta keluarga dan kupon dengan pagu Rp.606.453.750,00 hanya terealisasi sebesar Rp.212.453.750,00 (35,03%);
9. kegiatan pengadaan sewa dalam rangka penggerakan ekonomi keluarga melalui Harganas dengan pagu Rp.1.455.190.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp.1.191.635.500,00 (81,89%)
10. Tidak terlaksananya kegiatan pelatihan MOP, MOW, dan CTU dokter dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan.
11. Pada kegiatan peningkatan operasional lini lapangan, dasar penghitungan biaya adalah biaya operasional untuk tiap PLKB dengan asumsi tiap desa 1 PLKB. Sementara dari 1551 desa yang dibiayai, hanya sebagian yang memiliki PLKB. Dengan demikian sebagian desa yang tidak memiliki PLKB tidak dapat mengklaim dana tersebut.

**Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014**

KODE AKUN	URAIAN AKUN	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2015	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2014	Naik / Turun	%
5211	Belanja Barang Operasional	36.449.364.310,00	40.973.774.961,00	(4.524.410.651,00)	-11,04%
5212	Belanja Barang Non-Operasional	1.529.516.618.569,00	1.088.098.314.492,00	441.418.304.077,00	40,57%
5218	Belanja Barang Persediaan	71.078.667.848,00	0,00	71.078.667.848,00	0,00%
5221	Belanja Jasa	211.477.515.715,00	135.502.117.311,00	75.975.398.404,00	56,07%
5231	Belanja Pemeliharaan	26.701.133.390,00	25.716.929.809,00	984.203.581,00	3,83%
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	323.938.016.319,00	492.157.960.984,00	(168.219.944.665,00)	-34,18%
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.699.702.564,00	1.485.265.924,00	214.436.640,00	14,44%
5261	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.406.916.643,00	2.458.501.500,00	948.415.143,00	38,58%
5263	Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	11.704.688.851,00	5.447.084.525,00	6.257.604.326,00	114,88%
	<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>2.215.972.624.209,00</b>	<b>1.791.839.949.506,00</b>	<b>424.132.674.703,00</b>	<b>23,67%</b>
	<i>Pengembalian Belanja Barang</i>	<i>(3.861.968.632,00)</i>	<i>(2.278.547.700,00)</i>	<i>(1.583.410.932,00)</i>	<i>69,49%</i>
	<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>2.212.110.665.577,00</b>	<b>1.789.561.401.806,00</b>	<b>422.549.263.771,00</b>	<b>23,61%</b>

Berdasarkan tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2015 pada point B.2 terdapat realisasi belanja barang yang sumber dananya berasal dari APBN sebesar Rp.2.186.081.987.652,00 dan dari Hibah sebesar Rp.26.028.677.925,00. Realisasi belanja barang yang bersumber dari hibah terdiri dari :

1. Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN)

1.a) Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Barat (Satker 017393)

Sesuai penjelasan sumber dana belanja barang pada point 1.a) hal.22-23, telah diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) No. 150950500040001 tanggal 31 Desember 2015 atas realisasi belanja barang MAK 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) sebesar Rp.20.193.090.000,00, sehingga dari Pagu HLDN Satker 01739 yang sebesar Rp.20.200.000.000,00 terdapat sisa hibah sebesar Rp.6.910.000,00. Sisa hibah tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 04 Desember 2015, dengan rincian :

- Operasional TPD/K 1 orang x 3bulan x Rp.800.000,00 = Rp.2.400.000,00



150200500330005 tanggal 31 Desember 2015 dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2015 dengan NTPN Nomor 6414450F5BMOA97U.

Berdasarkan isi Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 978/39-Huk/2015 dan 2058/RC.002/J.1/2015 tertanggal 09 Juni 2015 pada point (7) Pasal 6 : Hak dan Kewajiban Pihak Kedua disebutkan bahwa "Pihak Kedua berkewajiban menyetorkan kembali sisa dana hibah daerah yang tidak dapat direalisasikan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Banten pada Bank BJB dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan." ([dokumen terlampir](#))

Sehingga dari pasal tersebut telah jelas dinyatakan bahwa sisa dana hibah daerah disetorkan ke Kas Daerah dan bukan ke Kas Negara. Satker 631610 akan segera berkonsultasi kepada KPPN setempat untuk memperbaiki kesalahan penyetoran tersebut dan hasil perbaikannya akan disampaikan pada Laporan Keuangan Semester I TA 2016.

## 2. Hibah Langsung Luar Negeri (HLDN)

### 2.a) Kedeputan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Satker 649505)

Sesuai penjelasan sumber dana belanja barang pada point [2.a](#)) hal.24, telah diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) No. 151400000000082 tanggal 31 Desember 2015 atas realisasi belanja barang hibah langsung luar negeri yang menggunakan MAK 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) sebesar Rp.4.033.571.025,00. Berdasarkan SPHL tersebut tercatat saldo awal hibah sebesar Rp.334.436.284,00 dan saldo akhir sebesar Rp.676.341.523,00.

Kemudian saldo akhir/sisa dana hibah tersebut telah dikembalikan ke UNFPA (sesuai dengan MOUnya) pada tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp.334.445.378,00 (pengembalian saldo akhir hibah ini di TA 2014 lalu), tanggal 06 November 2015 sebesar Rp.45.156.000,00 (pengembalian atas pembatalan pembelian tiket pesawat kegiatan ICFPA yang dibiayai dari HLLN UNFPA di Bali), tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp.169.156.303,00, tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp.127.593.186,00 dan tanggal 15 Maret

2016 sebesar Rp.656,00 (ketiga setoran terakhir merupakan pengembalian sisa hibah yang tidak terealisasi sampai dengan 31 Desember 2015 ([bukti setor terlampir](#)). Pengembalian pendapatan hibah tersebut juga telah disahkan oleh Kementerian Keuangan dengan berdasarkan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Nomor 151400503250001 yang diajukan pada bulan Maret 2016. ([dokumen terlampir](#))

*Belanja Modal*  
*Rp.74.887.011.104,00*

### **B.2.3 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.74.887.011.104,00 dan Rp.16.939.023.139,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 342,10% disebabkan antara lain :

1. Belanja modal tanah pada Perwakilan BKKBN Propinsi Kepulauan Riau karena sudah terselesaikannya masalah administrasi tanah milik pemerintah daerah (Otorita Batam) yang telah dihibahkan kepada BKKBN sehingga realisasi belanja modal tanah BKKBN naik 1.637,49 persen dari TA 2014;
2. Belanja Modal Lainnya TA 2015 naik 6.543,98 persen dari TA 2014 dimana kenaikan terbesar terdapat pada Satker Sekretariat Utama. Kenaikan tersebut terkait dengan Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin berupa Paket Pengadaan Reengineering Peremajaan Sarana Teknologi dan Informasi yang meliputi peremajaan infrastruktur jaringan pusat dan provinsi, peremajaan video conference dan peningkatan kinerja jaringan informasi dan teknologi, peremajaan sarana teknologi dan informasi dan maintenance video conference.

### Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

KODE AKUN	URAIAN AKUN	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2015	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2014	NAIK (TURUN)	%
531	Belanja Modal Tanah	2.391.331.000,00	137.631.000,00	2.253.700.000,00	1.637,49
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.979.623.063,00	5.274.160.792,00	16.705.462.271,00	316,74
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.346.126.977,00	10.795.762.582,00	5.550.364.395,00	51,41
534	Belanja Modal Jaringan	262.589.000,00	227.831.000,00	34.758.000,00	15,26
536	Belanja Modal Lainnya	33.963.634.340,00	508.514.940,00	33.455.119.400,00	6.578,98
	Jumlah Belanja Kotor	74.943.304.380,00	16.943.900.314,00	57.999.404.066,00	342,30
	Pengembalian Belanja	(56.293.276,00)	(4.877.175,00)	(51.416.101,00)	
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>74.887.011.104,00</b>	<b>16.939.023.139,00</b>	<b>57.947.987.965,00</b>	<b>342,10</b>

Belanja Modal Tanah  
Rp.2.391.331.000,00

#### B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.2.391.331.000,00 dan Rp.137.631.000,00. Berdasarkan tabel dibawah, pada TA 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp.2.258.577.175,00 atau sebesar 1637,49% dibandingkan TA 2014. Sebab kenaikan tersebut yaitu masalah administrasi tanah milik pemerintah daerah (Otorita Batam) yang telah dihibahkan kepada Perwakilan BKKBN Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) sudah terselesaikan, sehingga realisasi pengurukan dan pematangan tanah dapat dilakukan.

Belanja modal tanah BKKBN hanya teralisasi pada Perwakilan BKKBN Prop. Kepri sebesar Rp.2.391.331.000,00 yang digunakan untuk pengurukan dan pematangan lahan yang sampai dengan 31 Desember 2015 masih berstatus Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan, pembangunan batu miring, gorong-gorong dan pagar. Rencananya pada lahan yang dihibahkan oleh Otorita Batam pada BKKBN akan dibangun Gedung Kantor Perwakilan BKKBN Prop. Kepri.



**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2015 dan 2014**

KODE AKUN	URAIAN AKUN	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2015	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2014	NAIK (TURUN)	%
531115	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	2.391.331.000,00	137.631.000,00	2.253.700.000,00	1.637,49
	Jumlah Belanja Modal Tanah (Bruto)	2.391.331.000,00	137.631.000,00	2.253.700.000,00	1.637,49
	Pengembalian Belanja	-	-	-	
	Jumlah Belanja Modal Tanah (Nett)	2.391.331.000,00	137.631.000,00	2.253.700.000,00	1.637,49

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Rp.21.965.949.163,00*

**B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.21.965.949.163,00 dan Rp.5.258.483.617,00. Berdasarkan tabel dibawah, secara nilai pada TA 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp.16.706.465.546,00 atau sebesar 317,71% dibandingkan TA 2014.

Kenaikan diatas disebabkan nilai perencanaan anggaran kebutuhan peralatan dan mesin (MAK 532) TA 2015 meningkat sebesar 200,47% dibandingkan TA 2014 (nilai anggaran MAK 532 di TA 2014 sebesar Rp.8.121.718.000,00 bertambah menjadi Rp.24.403.176.000,00 di TA 2015).

Begitupula jika dilihat dari prosentase capaian Realisasi Mak 532, TA 2015 juga mengalami kenaikan dibandingkan TA 2014 (prosentase realisasi MAK 532 mencapai 64,94% di TA 2014 kemudian naik menjadi 90,07%). Pada periode ini hampir seluruh satker mengoptimalkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin melalui pengadaan yang tepat waktu.

### Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2015 dan 2014

KODE AKUN	URAIAN AKUN	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2015	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2014	NAIK (TURUN)	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.979.623.063,00	5.263.360.792,00	16.716.262.271,00	317,60
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Bruto)</b>	<b>21.979.623.063,00</b>	<b>5.263.360.792,00</b>	<b>16.716.262.271,00</b>	<b>317,60</b>
	Pengembalian Belanja	(14.673.900,00)	(4.877.175,00)	(9.796.725,00)	
	<b>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Nett)</b>	<b>21.964.949.163,00</b>	<b>5.258.483.617,00</b>	<b>16.706.465.546,00</b>	<b>317,71</b>

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan*  
Rp.5.610.259.000,00

#### B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.610.259.000,00 dan Rp. 6.700.321.982,00. Berdasarkan tabel dibawah, secara nilai pada TA 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp.5.508.745.019,00 atau sebesar 51,03% dibandingkan TA 2014.

Kenaikan diatas disebabkan nilai perencanaan anggaran kebutuhan belanja modal aset gedung dan bangunan (MAK 533) TA 2015 meningkat sebesar 121,57% dibandingkan TA 2014 (nilai anggaran MAK 533 di TA 2014 sebesar Rp.11.638.311.000,00 bertambah menjadi Rp.25.787.285.000,00 di TA 2015).

Namun jika dilihat dari prosentase capaian Realisasi Mak 533, TA 2015 mengalami penurunan dibandingkan TA 2014 (prosentase realisasi MAK 533 mencapai 92,76% di TA 2014 kemudian turun menjadi 63,39%) dimana penurunannya disebabkan karena :

1. Tidak terselesaikannya proyek pengadaan pembangunan gedung Pusdiklat KKBPK BKKBN Pusat pada Satker 017326 karena wanprestasi pihak ke-3, yang realisasinya hanya tercapai 29,9%.
2. Rehab gudang alokon senilai Rp.1,5 milyar tidak terealisasi karena sesuai dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenuwpera) bahwa antara konsultan perencana dan pelaksanaan pekerjaan kontruksi tidak boleh dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

## Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2015 dan 2014

407407

Belanja Modal Jalan, Irigasi  
dan Jaringan  
Rp.262.589.000,00

### B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 262.589.000,00 dan Rp. 227.8831.000,00. Berdasarkan tabel dibawah, secara nilai pada TA 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp.34.758.000,00 atau sebesar 15,26% dibandingkan TA 2014.

Kenaikan diatas disebabkan nilai perencanaan anggaran kebutuhan belanja modal aset gedung dan bangunan (MAK 533) TA 2015 meningkat sebesar 19,79% dibandingkan TA 2014 (nilai anggaran Rp.233.361.000,00 di TA 2014 kemudian meningkat menjadi Rp. 279.551.000,00 di TA 2015).

Namun jika dilihat dari prosentase capaian Realisasi Mak 534, TA 2015 mengalami sedikit penurunan dibandingkan TA 2014 (prosentase realisasi MAK 534 mencapai 97,63% di TA 2014 kemudian turun menjadi 93,93% di TA 2015), meskipun begitu prosentase penurunan tersebut tidak terlalu signifikan sehingga dapat dikatakan stabil.

## Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2015 dan 2014

KODE AKUN	URAIAN AKUN	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2015	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2014	NAIK (TURUN)	%
534131	Belanja Modal Jaringan	171.589.000,00	227.831.000,00	(56.242.000,00)	(24,69)
534161	Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	91.000.000,00	-	91.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Bruto)	262.589.000,00	227.831.000,00	34.758.000,00	15,26
	Pengembalian Belanja	-	-	-	
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Nett)	262.589.000,00	227.831.000,00	34.758.000,00	15,26

Belanja Modal Lainnya  
Rp.33.963.634.340,00

### B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar

Rp.33.963.634.340,00 dan Rp. 508.514.940,00.

Berdasarkan tabel dibawah, secara nilai pada TA 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp.33.455.119.400,00 atau sebesar 6578,98% dibandingkan TA 2014.

Kenaikan diatas disebabkan nilai perencanaan anggaran belanja modal aset lainnya (MAK 536) TA 2015 meningkat sebesar 6645,07% dibandingkan TA 2014 (nilai anggaran Rp.536.302.000,00 di TA 2014 kemudian meningkat menjadi Rp. 36.173.964.000,00 di TA 2015).

Namun jika dilihat dari prosentase capaian Realisasi Mak 536, TA 2015 mengalami sedikit penurunan dibandingkan TA 2014 (prosentase realisasi MAK 536 mencapai 94,82% di TA 2014 kemudian turun menjadi 93,89% di TA 2015), meskipun begitu prosentase penurunan tersebut tidak terlalu signifikan sehingga dapat dikatakan stabil.

Nilai Realisasi Belanja Modal Lainnya terbesar BKKBN terdapat pada Satuan Kerja Sekretariat Utama (017326) sebesar Rp.17.461.482.500,00 dan Satuan Kerja Kedeputian Advokasi, Penggerakan dan Informasi (682054) sebesar Rp.15.982.977.725,00 (jika ditotal keduanya mencapai Rp.33.444.460.225,00 atau sebesar 98,47% dari total realisasi MAK 536 BKKBN) .

Realisasi MAK 536 pada Satker 017326 berasal dari Pengadaan Aset Tak Berwujud berupa Software senilai Rp.511.500.000,00, Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin berupa Paket Pengadaan Reengineering Peremajaan Sarana Teknologi dan Informasi yang meliputi peremajaan infrastruktur jaringan pusat dan provinsi, peremajaan video conference dan peningkatan kinerja jaringan informasi dan teknologi, peremajaan sarana teknologi dan informasi dan maintenance video conference dengan total nilai pengadaan (beserta kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan pengadaan) senilai Rp. 16.915.525.000,00 dan Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp.34.457.500,00. Sehingga dari sini terlihat ada kesalahan MAK saat perencanaan Pengadaan Reengineering Peremajaan Sarana Teknologi dan Informasi dan Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin.

Sedangkan Realisasi MAK 536 pada Satker 682054 berasal dari Pengadaan Aset Tak Berwujud berupa Software senilai Rp. 9.667.361.260,00 dan Lisensi senilai Rp.655.864.880,00, Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin berupa Paket Pengadaan Server senilai Rp.5.637.534.885,00, dan Pengadaan Aset Tetap Lainnya berupa Buku-buku Perpustakaan senilai Rp.22.216.700,00.

### Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2015 dan 2014

KODE AKUN	URAIAN AKUN	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2015	Periode 1 Jan s/d 31 Des 2014	NAIK (TURUN)	%
536111	Belanja Modal Lainnya	33.785.634.340,00	508.514.940,00	33.277.119.400,00	6.543,98
536121	Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	178.000.000,00	-	178.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Bruto)	33.963.634.340,00	508.514.940,00	33.455.119.400,00	6.578,98
	Pengembalian Belanja	-	-	-	
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Nett)	33.963.634.340,00	508.514.940,00	33.455.119.400,00	6.578,98

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp.4.231.553.016,00

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp.4.231.553.016,00 ([dokumen terlampir](#)) dan Rp.563.831.666,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja per 31 Desember 2015

No.	URAIAN SATUAN KERJA	PER 31 DESEMBER 2015	PER 31 DESEMBER 2014
1	SESTAMA	111.294.246,00	-
2	KEDEPUTIAN BID. KBKR	(330.238,00)	-
3	KEDEPUTIAN BID. KSPK	(67.796,00)	-
4	KEDEPUTIAN BID. LATBANG	295.571.103,00	125.951.755,00
5	IRTAMA	231.869.900,00	88.627.825,00
6	DITVOKKOM	835.971.303,00	941.324,00
7	KEDEPUTIAN BID. ADPIN	302.556,00	-
8	PUSLITBANG	1.883.339.101,00	112.482.509,00
9	KEDEPUTIAN KEPENDUDUKAN	3.546.524,00	2.350.050,00
10	PERWAKILAN BKKBN PROP. JATENG	5,00	-
11	PERWAKILAN BKKBN PROP. ACEH	-	163.766.910,00
12	PERWAKILAN BKKBN PROP. BALI	-	195.000,00
13	PERWAKILAN BKKBN PROP. KALBAR	3,00	-
14	PERWAKILAN BKKBN PROP. NTT	175.693.471,00	-
15	PERWAKILAN BKKBN PROP. KEPRI	-	20.513.293,00
16	PERWAKILAN BKKBN PROP. PAPUA	195.638,00	49.003.000,00
17	PERWAKILAN BKKBN PROP. MALUT	694.167.200,00	-
	<b>J U M L A H</b>	<b>4.231.553.016,00</b>	<b>563.831.666,00</b>

Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp.6.018.061.479,00

## C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp.6.018.061.479,00 dan Rp.3.692.255.846,00 Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

### Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2015 dan 2014

Kode Akun	Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	6.018.061.479,00	3.404.554.562,00
111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	-	341.186.284,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.018.061.479,00</b>	<b>3.745.740.846,00</b>

Berdasarkan tabel perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas diatas, informasi rincian masing-masing TA 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

1. Informasi rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2015

Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah TA 2015	Rincian TA 2015	Jenis Transaksi TA 2015
017326	Sekretariat Utama	Rp 2.907.218.672,00	Rp 12.379.000,00	Dana LS Kegiatan 2014 yang tidak digunakan dan baru disetor ke Kas Negara pada bulan Maret 2016 ( <i>dokumen terlampir</i> )
			Rp 438.040.000,00	Dana LS atas Belanja Uang Makan Pegawai bulan Desember 2015 yang dibayarkan di Januari 2016
			Rp 2.178.245.273,00	Tunjangan Kinerja bulan Desember 2015 yang dibayarkan di Januari 2016
			Rp 6.018.944,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 4.250.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 268.285.455,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
631610	Banten	Rp 176.849.950,00	Rp 176.849.950,00	Tunjangan Kinerja bulan Desember 2015 yang dibayarkan di Januari 2016
649530	Inspektorat Utama	Rp 135.728.492,00	Rp 97.329.292,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 38.399.200,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
649505	KBKR	Rp 10.602.297,00	Rp 3.638.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 5.953.720,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 1.010.577,00	Saldo Kas di beberapa BPP dan BP yang baru disetor ke Kas Negara pada bulan Maret 2016 ( <i>dokumen terlampir</i> )
668423	Puslitbang	Rp 147.898.144,00	Rp 147.898.144,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
682061	Kependudukan	Rp 263.033.702,00	Rp 203.783.702,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 59.250.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
649512	KSPK	Rp 76.481.254,00	Rp 76.381.254,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 100.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
017393	Jabar	Rp 233.330.878,00	Rp 38.198.396,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 52.053.200,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 134.403.443,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 8.675.839,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pemeliharaan DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016



Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah TA 2015	Rincian TA 2015	Jenis Transaksi TA 2015
017621	Jateng	Rp 59.836.600,00	Rp 16.961.600,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 1.760.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 41.115.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
017972	DIY	Rp 357.815.739,00	Rp 260.933.800,00	Tunjangan Kinerja bulan Desember 2015 yang dibayarkan di Januari 2016
			Rp 65.856.000,00	Uang Makan Pegawai bulan Desember 2015 yang dibayarkan di Januari 2016
			Rp 31.025.939,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
018398	Sumbar	Rp 665.847.535,00	Rp 42.450.865,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 257.167.240,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 366.229.430,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
433011	Riau	Rp 8.027.343,00	Rp 2.495.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 5.532.343,00	Koreksi BPK atas kelebihan belanja barang diserahkan ke masyarakat DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
433020	Jambi	Rp 13.258.734,00	Rp 7.262.100,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 5.996.634,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
018431	Kalsel	Rp 40.300.800,00	Rp 37.280.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 3.020.800,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
018452	Sulsel	Rp 371.544.987,00	Rp 21.398.937,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 322.311.100,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 27.834.950,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
433067	Sultra	Rp 250.298.223,00	Rp 19.636.373,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 14.198.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 216.463.850,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016

Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah TA 2015	Rincian TA 2015	Jenis Transaksi TA 2015
018466	Bali	Rp 7.982.610,00	Rp 721.610,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 3.316.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 3.945.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
433098	NTT	Rp 180.922.300,00	Rp 16.796.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 2.283.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 161.843.300,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
631627	Gorontalo	Rp 1.890.000,00	Rp 1.740.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 150.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
433073	Maluku	Rp 85.050.000,00	Rp 85.050.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
631606	Babel	Rp 18.457.195,00	Rp 14.425.195,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 4.032.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban barang dan jasa DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
018455	Sulut	Rp 1.770.000,00	Rp 1.770.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
666803	Sulbar	Rp 3.916.024,00	Rp 3.596.024,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
			Rp 320.000,00	Koreksi BPK atas kelebihan beban perjalanan dinas DIPA TA 2015 yang baru dibayarkan di TA 2016
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 6.018.061.479,00</b>	<b>Rp 6.018.061.479,00</b>	

Berdasarkan tabel diatas, pada kolom keterangan yang berisi koreksi BPK atas kelebihan beban pegawai, beban perjalanan dinas, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan dan beban barang diserahkan ke masyarakat secara bersamaan juga ikut mempengaruhi penurunan/pengurangan akun beban-beban tersebut diatas pada Laporan Operasional BKKBN TA 2015.

## 2. Informasi rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2014

Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah	Rincian	Jenis Transaksi
017326	Sekretariat Utama	Rp 2.434.849.533,00	Rp 3.228.300,00	Jasa giro rekening UNFPA yang diselesaikan dengan dikembalikan kepada Pihak Pemberi Hibah (UNFPA) pada tanggal 20-05-2015 ( <i>dokumen terlampir</i> )
			Rp 2.071.532.233,00	Tunjangan Kinerja bulan Desember 2014 yang baru dibayar di Januari 2015
			Rp 347.428.200,00	Uang Makan Pegawai bulan Desember 2014 yang baru dibayar di Januari 2015
			Rp 281.800,00	Pengembalian Belanja TA 2014 yang baru disetor di Januari 2015 ( <i>dokumen terlampir</i> )
			Rp 12.379.000,00	Dana LS Kegiatan 2014 yang tidak digunakan dan baru disetor ke Kas Negara pada bulan Maret 2016 ( <i>dokumen terlampir</i> )
649505	KBKR	Rp 335.446.861,00	Rp 1.010.577,00	Saldo Kas di beberapa BPP dan BP yang baru disetor ke Kas Negara pada bulan Maret 2016 ( <i>dokumen terlampir</i> )
			Rp 334.436.284,00	Sisa Dana Hibah UNFPA TA 2014 yang menjadi saldo awal di TA 2015 dan sudah dikembalikan kepada Pihak Pemberi Hibah (UNFPA) pada bulan Februari 2016 ( <i>dokumen terlampir</i> )
017393	Jabar	Rp 7.514.357,00	Rp 764.357,00	Jasa giro TA 2014 disetor ke kas negara Tgl. 14-01-2015 ( <i>dokumen terlampir</i> )
			Rp 6.750.000,00	Sisa Dana Hibah APBD TA 2014 yang disetor ke Kas Negara tanggal 14-01-2015 ( <i>dokumen terlampir</i> )
017972	DIY	Rp 327.815.350,00	Rp 250.906.400,00	Tunjangan Kinerja bulan Desember 2014 yang baru dibayar di Januari 2015
			Rp 52.828.650,00	Uang Makan Pegawai bulan Desember 2014 yang baru dibayar di Januari 2015
			Rp 24.080.300,00	Biaya KKN Tematik dari Satker Ditvokkom yang baru dibayarkan di Januari 2015
018424	Kalbar	Rp 962.800,00	Rp 962.800,00	Pengembalian Belanja TA 2014 yang disetor tanggal 16 Januari 2015 ( <i>dokumen terlampir</i> )
433051	Sulteng	Rp 14.134.945,00	Rp 14.134.945,00	Pajak (potongan bendahara) TA 2014 yang sd. 31 Desember 2014 yang baru disetor di Januari 2015 ( <i>dokumen terlampir</i> )
631631	Malut	Rp 234.552.204,00	Rp 29.758.050,00	Uang Makan Pegawai bulan Desember 2014 yang dibayar di Januari 2015
			Rp 148.639.450,00	Tunjangan Kinerja bulan Desember 2014 yang dibayar di Januari 2015
			Rp 56.154.704,00	Uang Kegiatan DBU Sistem RRI Des masih ada di Rekening Koran Bendahara Pengeluaran dan baru dibayarkan di Januari 2015
631627	Gorontalo	Rp 164.429.235,00	Rp 145.930.235,00	Tunjangan Kinerja bulan Desember 2014 yang dibayar di Januari 2015
			Rp 18.499.000,00	Uang Makan Pegawai bulan Desember 2014 yang dibayar di Januari 2015
433082	Papua	Rp 53.485.000,00	Rp 53.485.000,00	LS Bendahara Pengeluaran yang kegiatannya sudah dilaksanakan, namun belum dibayarkan kepada Pihak Ketiga terdiri dari : SP2D No.992535K Tgl.29-12-2014 Rp.11.575.000,-; SP2D No.992536K Tgl.29-12-2014 Rp.11.310.000,-; SP2D No.992537K Tgl.29-12-2014 Rp.17.850.000,-; SP2D No.992739K Tgl.30-12-2014 Rp.12.750.000,- yang sudah dibayarkan di Januari 2015
631610	Banten	Rp 170.383.000,00	Rp 170.383.000,00	Tunjangan Kinerja bulan Desember 2014 yang dibayar di Januari 2015
668419	Direktorat Advokasi, Komunikasi & KIE	Rp 2.167.561,00	Rp 2.167.561,00	Saldo Jasa Giro di rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Des'14 yang baru disetor tanggal 21 Januari 2015 ( <i>dokumen terlampir</i> )
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.745.740.846,00</b>	<b>Rp 3.745.740.846,00</b>	

Belanja Dibayar  
Dimuka (prepaid)  
Rp.35.033.993.658,00

### C.3 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp.35.033.993.658,00 dan Rp.16.999.998,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2015 dan 2014

Kode Satker	Satuan Kerja	Jenis	TA 2015	TA 2014
018377	Aceh	Pembayaran Sewa Galeri UPPKS	42.677.596,00	-
433042	Kaltim	Pembayaran Sewa Kantor BKKBN Kalimantan Utara	53.272.670,00	-
649505	KBKR	Koreksi BPK atas adanya pencairan Pengembalian Selisih Pekerjaan yang sudah dibayar 100% pada tahun 2015 dan dikembalikan di 2016	34.938.043.392,00	-
666803	Sulbar	Pembayaran Sewa Rumah Dinas Pejabat Eselon II dan III	-	16.999.998,00
		<b>Jumlah</b>	<b>35.033.993.658,00</b>	<b>16.999.998,00</b>

Belanja dibayar dimuka BKKBN sebesar Rp.35.033.993.658,00 diatas antara lain :

#### 1. Perwakilan BKKBN Propinsi Aceh (Satker 018377)

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Toko antara Pemilik Toko dengan Perwakilan BKKBN Prop. Aceh tanggal 10 Desember 2015 dan bukti kuitansi pembayaran No.2095/2014 telah disepakati Sewa Toko/sewa tempat senilai Rp.44.000.000,00 yang akan digunakan oleh Perwakilan BKKBN Prop. Aceh untuk Galeri UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dengan periode sewa dihitung mulai tanggal 20 Desember 2015 sd. 20 Desember 2016 (366 hari). ([dokumen terlampir](#))

Periode sewa tersebut diatas dialami oleh 2 tahun anggaran yaitu TA 2015 dan 2016, sehingga pada saat periode tutup buku per 31 Desember 2015, Satker 018377 melakukan pemisahan pencatatan antara yang sudah dinikmati (sudah menjadi beban) di TA 2015 dan belum dinikmati (masih menjadi aset) di TA 2016. Dengan menerapkan metode pencatatan berbasis akrual, maka pada saat tutup buku tersebut dibuatlah jurnal penyesuaian. Hasil dari penerapan metode pencatatan berbasis akrual pada Satker

018377 atas transaksi tersebut diatas yaitu Aset Belanja Dibayar Dimuka tercatat mulai tanggal 01 Januari 2016 sd. 20 Desember 2016 (355 hari) sebesar Rp.42.677.000,00, sedangkan sisanya yang 11 hari (20 Desember 2015 sd. 31 Desember 2015) merupakan Beban Sewa Galeri UPPKS sebesar Rp.1.322.404,00 yang sudah dinikmati dan menjadi beban TA 2015.

## **2. Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Timur (Satker 433042)**

Berdasarkan bukti kuitansi pembayaran di Perwakilan BKKBN Prop. Kalimantan Timur (Kaltim) pada tanggal 10 Juli 2015, 25 September 2015 dan Desember 2015 @sebesar Rp.40.750.000,00 dengan total nilai pembayaran sebesar Rp.122.250.000,00 telah terjadi transaksi Sewa Rumah yang akan digunakan sebagai Kantor Perwakilan BKKBN Kalimantan Utara, dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 21 Mei 2015 sd. 21 Juni 2016 (397 hari). ([dokumen terlampir](#))

Periode sewa tersebut diatas dialami oleh 2 tahun anggaran yaitu TA 2015 dan 2016, sehingga pada saat periode tutup buku per 31 Desember 2015, Satker 422042 melakukan pemisahan pencatatan antara yang sudah dinikmati (sudah menjadi beban) di TA 2015 dan belum dinikmati (masih menjadi aset) di TA 2016. Dengan menerapkan metode pencatatan berbasis akrual, maka pada saat tutup buku tersebut dibuatlah jurnal penyesuaian. Hasil dari penerapan metode pencatatan berbasis akrual pada Satker 433042 atas transaksi tersebut diatas yaitu Aset Belanja Dibayar Dimuka tercatat mulai tanggal 01 Januari 2016 sd. 21 Juni 2016 (173 hari) sebesar Rp.52.272.670,00, sedangkan sisanya yang 224 hari (21 Mei 2015 sd. 31 Desember 2015) merupakan Beban Sewa Kantor Perwakilan BKKBN Prop. Kalimantan Utara sebesar Rp.68.977.330,00 yang sudah dinikmati dan menjadi beban TA 2015;

## **3. Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Satker 649505)**

Berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan TA 2015 BKKBN mendapat rekomendasi untuk mencatat jurnal koreksi akrual Belanja Barang dibayar Dimuka atas Pengembalian Selisih Pekerjaan ke Kas Negara oleh Pihak Ke-3 di TA 2016 senilai Rp.34.938.043.392,00. Pengembalian selisih pekerjaan tersebut disebabkan oleh pencairan pengadaan pada Satker 649505 yang sudah dibayar 100,00% dengan menggunakan DIPA TA 2015, namun sampai dengan periode tutup buku per 31 Desember 2015 jumlah produksi barang yang disepakati sesuai dengan

kontrak pengadaan tidak tercapai 100,00%, sehingga nilai selisih pekerjaan yang tidak tercapai dikembalikan oleh pihak ke-3 ke Kas Negara pada bulan Januari 2016. [\(dokumen terlampir\)](#)

Piutang Bukan Pajak  
(netto)  
Rp.1.576.478.193,-

#### C.4 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Saldo Piutang Bukan Pajak (Netto) per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp.1.576.478.193,00 dan Rp.0,00.

Perbandingan Piutang Bukan Pajak (Netto) TA 2015 dan 2014

Jenis	TH 2015	TH 2014
Koreksi BPK atas adanya pencairan jaminan pelaksanaan 2015 yang baru dicairkan tahun 2016 pada Satker KBKR (649505)	1.576.478.193,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.576.478.193,00</b>	<b>-</b>

Berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan TA 2015 BKKBN juga mendapat rekomendasi untuk mencatat jurnal koreksi akrual Piutang Bukan Pajak sebesar Rp.1.576.478.193,00 yang merupakan pencairan jaminan pelaksanaan pengadaan Satker KBKR (649505) TA 2015 yang baru dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara pada bulan Februari dan Maret 2016. Jurnal koreksi ini sekaligus berpengaruh pada kenaikan Pendapatan Anggaran Lain-lain di Laporan Operasional BKKBN. [\(dokumen terlampir\)](#)

Bagian Lancar Tagihan  
TP/TGR  
Rp.51.860.880,00

#### C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp.51.860.880,00 dan Rp.61.050.802,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi BKKBN terdiri dari:

Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah Debitur (Orang)	Per 31 Desember 2014 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2015 (Rp)
				Tambah	Kurang	
017326	SESTAMA	1	26.318.182,00	19.800.000,00	26.318.182,00	19.800.000,00
018445	BKKBN SULUT	1	34.732.620,00	32.060.880,00	34.732.620,00	32.060.880,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>61.050.802,00</b>			<b>51.860.880,00</b>

Rincian Mutasi Bagian Lancar TGR sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp.</b>	<b>61.050.802,00</b>
Mutasi Tambah :		-
- Reklasifikasi Bagian Lancar TGR Satker Sestama dari Tagihan TP/TGR (Piutang Jangka Panjang) karena sesuai SKTJMnya Piutang TGR akan jatuh tempo di TA 2016	Rp.	19.800.000,00
- Reklasifikasi Bagian Lancar TGR BKKBN Sulawesi Utara dari Tagihan TP/TGR (Piutang Jangka Panjang)	Rp.	32.060.880,00
Mutasi Kurang :		
- Reklasifikasi Bagian Lancar TGR Satker Sestama menjadi Tagihan TP/TGR (Piutang Jangka Panjang)		(26.318.182,00)
- Reklasifikasi Bagian Lancar TGR BKKBN Sulawesi Utara menjadi Tagihan TP/TGR (Piutang Jangka Panjang)		(34.732.620,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp.</b>	<b>51.860.880,00</b>

Mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan SKTJM Nomor 1481/II/KU.403/B3/2013 tanggal 22 Oktober 2013 satker SESTAMA terjadi kehilangan 1 unit kendaraan dinas roda empat berupa Toyota Kijang KF80 Long STD Tahun 2004 dengan nilai penetapan ganti rugi sebesar Rp.76.000.000,00 yang menjadi tanggung jawab sdr. SLBN dengan tempo penyelesaian Juli 2014.

Sampai dengan 31 Desember 2013 TGR tersebut telah disetor, yaitu :

- sebesar Rp.10.000.000,00 tgl. 23-10-2013 NTPN No. 1311021315011511
- sebesar Rp.16.000.000,00 tgl. 21-11-2013 NTPN No.1305071107140303
- Sehingga sisa bagian lancar Tagihan TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Rp. 76.000.000,00 – Rp. 26.000.000,00).

Selama periode 1 Januari s/d berakhir jatuh tempo SKTJM ke-1 pada Juli 2014 Sdr. SLBN telah dilakukan penyetoran yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 tgl 27 Januari 2014

NTPN No. 1409101113021506, sehingga sisa TGR saat berakhir jatuh tempo SKTJM ke-1 sebesar Rp.47.000.000,00.

Kemudian pada **Agustus 2014** telah dilakukan **perpanjangan SKTJM** tersebut **No.1046/II/KU.403/B3/2015** yang berisi bahwa beliau akan melunasi dengan cara mengangsur selama 22 bulan (sampai berakhir batas usia pensiunnya) @sebesar Rp.2.136.364,00 terhitung mulai bulan Agustus 2014 sd. Mei 2016. ([dokumen terlampir](#))

Setelah melakukan perpanjangan SKTJM beliau telah melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sbb :

- Sebesar Rp.10.000.000,00 Tgl 21-08-2014 NTPN No. 0203150908050906
- Sebesar Rp.3.700.000,00 Tgl 20-11-2014 NTPN No. 1307040613060510

Sehingga sisa bagian lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2014 seharusnya sebesar Rp. 33.300.000,00 (Rp. 50.000.000,00 – Rp. 16.700.000,00).

Namun pada Laporan Keuangan Audited 2014 setoran sebesar Rp.3.700.000,00 kurang dicatat dalam perhitungan Bagian Lancar TGR BKKBN sehingga Neraca Audited BKKBN TA 2014 pada pos Bagian Lancar TGR BKKBN lebih saji sebesar Rp.3.700.000,00. Lebih saji tersebut telah dilakukan koreksi serta penyesuaian pada Neraca BKKBN TA 2015 yang berpengaruh pada Laporan Perubahan Ekuitas BKKBN.

Selama Tahun Anggaran 2015 TGR an. Sdr. SLBN sudah disetor ke Kas Negara melalui potongan gaji setiap bulan pada Bendahara Gaji rincian sbb :

- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 17-04-2015 NTPN. B964D7P605CCAB0P
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 18-05-2015 NTPN. 0E5B81JS59M2CFB9
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 18-06-2015 NTPN. 6F84C00IONSQ9ET9
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 14-07-2015 NTPN. F27D26NA1TQK3QD9
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 20-08-2015 NTPN. 8C3033GEOMCC5KI9
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 16-09-2015 NTPN. BF099076MGM2B329
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 19-10-2015 NTPN. A78652L4E0NQMOK9
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 18-11-2015 NTPN. 65AE83073TTHI0UP
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 17-12-2015 NTPN. 4AD383R6ALFOVGGP

([dokumen kartu piutang terlampir](#)).

Pada tanggal 31 Desember 2015 telah dilakukan jurnal reklasifikasi dari bagian lancar Tagihan TP/TGR ke Piutang Tagihan TP/TGR an. Sdr. SLBN sebesar Rp.26.318.182,00 sehingga total Piutang Tagihan TP/TGR an. Sdr. SLBN per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp.19.800.000,00.



Sesuai dengan SKTJM No.1046/I/KU.403/B3/2015 yang menyebutkan bahwa SKTJM akan jatuh tempo pada bulan Mei 2016, maka pada periode tutup buku per 31 Desember 2015 seluruh Piutang Tagihan TP/TGR an. SLBN direklasifikasi menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR sebesar Rp.19.800.000,00.

2. Piutang TGR pada Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara merupakan piutang atas penggelapan pajak (fiktif) dengan nilai penetapan TGR sebesar Rp. 352.898.638,00 berdasarkan SKTJM an. AM No. 294/KU.403/J/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan jatuh tempo piutang per November 2014. Sampai dengan 31 Desember 2014 atas piutang tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp.84.768.880,00 melalui pemotongan gaji setiap bulan dan pemotongan remunerasi sehingga sisa piutang TGR sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp.268.129.758,00 (Rp.301.719.978,00 – Rp 33.590.220,00).

Sehubungan dengan jatuh temponya SKTJM an. AM pada bulan November 2014, maka telah dilakukan pembaharuan SKTJM tersebut dengan No.109/KU.403/J/2014 tanggal 27 November 2014. ([dokumen terlampir](#))

Selama Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara melalui pemotongan gaji dan pemotongan remunerasi setiap bulan sebesar Rp.32.060.880,00 sehingga saldo TGR an. AM menjadi sebesar Rp.236.068.878,00 ([dokumen kartu piutang terlampir](#)).

Tanggal 31 Desember 2015 telah dilakukan jurnal reklasifikasi dari bagian lancar Tagihan TP/TGR ke Piutang Tagihan TP/TGR an. Sdr. AM sebesar Rp.34.732.620,00 sehingga total Piutang Tagihan TP/TGR an. Sdr. AM per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp. Rp.236.068.878,00.

Berdasarkan perkiraan setoran lancar setiap bulan selama Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar  $(Rp.1.529.340,00 + Rp.1.142.400,00) \times 12 \text{ bulan} = Rp.32.060.880,00$  menjadi dasar perhitungan Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2015 dan telah dilakukan reklasifikasi neraca dari Piutang Tagihan TP/TGR ke Bagian Lancar Tagihan TP/TGR senilai Rp.32.060.880,00. Sedangkan sisanya sebesar Rp.204.007.998,00 menjadi Piutang (Jangka Panjang) Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2015.

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Bagian Lancar  
Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi  
Rp(259.304,00)

#### C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp(259.304,00) dan Rp(2.805.481,00)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BKKBN terdiri dari :

No.	KUALITAS	Jumlah Debitur (Orang)	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	2	51.860.880,00	0,50%	259.304,00
2	Kurang Lancar	-	-	10,00%	-
3	Diragukan	-	-	50,00%	-
4	Macet	-	-	100,00%	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>51.860.880,00</b>		<b>259.304,00</b>

Persediaan  
Rp.666.877.937.048,00

#### C.7 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp.666.877.937.048,00 dan Rp.483.034.071.547,00

Mutasi Persediaan Per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Akun	Nama Perkiraan	Per 31-12-2014	Tambah	Kurang	Per 30-11-2015
117111	Barang Konsumsi	1.509.889.097,00	66.556.046.970,00	65.586.602.261,00	2.479.333.806,00
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	42.082.900,00	421.347.550,00	403.805.950,00	59.624.500,00
117114	Suku Cadang	1.147.430.768,00	15.406.500,00	457.766.693,00	705.070.575,00
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	-	1.317.700,00	1.317.700,00	-
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	9.514.655.722,00	1.597.264.625,00	2.125.561.818,00	8.986.358.529,00
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	86.623.500,00	-	84.823.500,00	1.800.000,00
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	62.094.375,00	129.981.175,00	188.334.925,00	3.740.625,00
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	417.917.873.604,00	611.369.554.595,00	459.546.238.282,00	569.741.189.917,00
117131	Bahan Baku	-	51.180.750,00	51.180.750,00	-
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	44.955.000,00	-	44.955.000,00	-
117199	Persediaan Lainnya	52.708.466.581,00	665.550.545.356,00	633.358.192.841,00	84.900.819.096,00
	<b>TOTAL</b>	<b>483.034.071.547,00</b>	<b>1.345.692.645.221,00</b>	<b>1.161.848.779.720,00</b>	<b>666.877.937.048,00</b>

## ASET TETAP

Tanah

Rp.368.748.205.366,00

### C.8 Tanah

Tanah yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp368.748.205.366,00 dan Rp368.748.205.366,00 sehingga tidak ada kenaikan dan penurunan aset tetap Tanah. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah per 31 Desember 2015

Saldo per 31 Desember 2014	Rp 368.748.205.366,00
<b>Mutasi tambah:</b>	
107 - Reklasifikasi Masuk	Rp 11.493.657.824,00
<b>Mutasi kurang:</b>	
304 - Reklasifikasi Keluar	(11.493.657.824,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp 368.748.205.366,00</b>
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2015	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp 368.748.205.366,00</b>

Rincian Satuan Kerja yang mengalami Mutasi pada Aset Tanah per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

NO.	KODE SATKER	SATKER	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG
			REKLASIFIKASI MASUK (107)	REKLASIFIKASI KELUAR (304)
1	017972	DI. YOGYAKARTA	400.423.000,00	(400.423.000,00)
2	017393	JAWA BARAT	793.400.000,00	(793.400.000,00)
3	017621	JAWA TENGAH	521.456.000,00	(521.456.000,00)
4	018030	JAWA TIMUR	884.900.000,00	(884.900.000,00)
5	018424	KALIMANTAN BARAT	118.274.800,00	(118.274.800,00)
6	433036	KALIMANTAN TENGAH	1.045.096.000,00	(1.045.096.000,00)
7	018410	LAMPUNG	1.026.080.000,00	(1.026.080.000,00)
8	433011	RIAU	1.624.609.024,00	(1.624.609.024,00)
9	433082	PAPUA	539.100.000,00	(539.100.000,00)
10	433051	SULAWESI TENGAH	174.300.000,00	(174.300.000,00)
11	433067	SULAWESI TENGGARA	1.180.419.000,00	(1.180.419.000,00)
12	018466	BALI	3.185.600.000,00	(3.185.600.000,00)
		<b>TOTAL</b>	<b>11.493.657.824,00</b>	<b>(11.493.657.824,00)</b>

Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2015 disajikan pada Lampiran A-1 Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin  
Rp.366.818.286.540,00

### C.9 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.366.818.286.540,00 dan Rp.326.102.804.773,00 sehingga kenaikan aset tetap Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp.40.715.481.767,00 atau 12,49 persen. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Penambahan dan Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015**

<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp 326.102.804.773,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
100 - Saldo Awal	Rp 2.824.376.596,00
101 - Pembelian	Rp 44.217.723.861,00
102 - Transfer Masuk	Rp 12.034.866.800,00
103 - Hibah Masuk	Rp 114.000.000,00
107 - Reklasifikasi Masuk	Rp 1.569.425.444,00
112 - Perolehan Lainnya	Rp 16.340.000,00
117 - Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp 61.705.500,00
202 - Pengembangan Nilai Aset	Rp 81.389.500,00
204 - Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp 2.108.436,00
206 - Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp 5.840.000,00
<b>Mutasi kurang:</b>	
188 - Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(4.647.100.677,00)
204 - Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(200.000,00)
301 - Penghapusan (BMN yg dihentikan)	(307.874.000,00)
302 - Transfer Keluar	(12.327.906.800,00)
303 - Hibah Keluar	(347.000.000,00)
304 - Reklasifikasi Keluar	(1.423.937.244,00)
305 - Koreksi Pencatatan	(190.000.000,00)
306 - Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola BMN	(336.021.950,00)
308 - Usulan Barang Hilang ke Pengelola BMN	(55.569.050,00)
401 - Penghentian Aset dari Penggunaan	(576.684.649,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp 366.818.286.540,00</b>
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2015	(278.804.290.159,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp 88.013.996.381,00</b>

Transaksi penambahan peralatan dan mesin per satker dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO.	KODE SATKER	URAIAN SATKER	SALDO AWAL (100)	PEMBELIAN (101)	TRANSFER MASUK (102)	HIBAH MASUK (103)	REKLASIFIKASI MASUK (107)	SUB TOTAL TRANSAKSI PENAMBAHAN (A)
1	017326	SESTAMA	-	19.560.502.051,00	345.276.800,00	-	963.435.000,00	20.869.213.851,00
2	649530	IRTAMA	-	-	-	-	2.640.000,00	2.640.000,00
3	649505	KBKR	-	-	-	-	-	-
4	649512	KSPK	-	364.552.400,00	-	-	-	364.552.400,00
5	649526	LATBANG	-	-	-	-	-	-
6	668419	DITVOK	-	117.406.000,00	-	-	-	117.406.000,00
7	668423	PUSLITBANG	-	80.267.821,00	-	-	-	80.267.821,00
8	682054	ADPIN	-	5.991.906.725,00	-	-	-	5.991.906.725,00
9	682061	DALDUK	-	136.800.000,00	-	-	-	136.800.000,00
10	017393	JABAR	-	2.564.574.706,00	-	-	9.500.000,00	2.574.074.706,00
11	017621	JATENG	-	1.007.579.872,00	405.240.000,00	-	79.567.994,00	1.492.387.866,00
12	017972	DIY	-	393.036.060,00	348.590.000,00	-	-	741.626.060,00
13	018030	JATIM	-	571.962.700,00	405.240.000,00	-	-	977.202.700,00
14	018377	ACEH	2.813.838.596,00	739.021.550,00	241.890.000,00	-	-	3.794.750.146,00
15	018381	SUMUT	-	450.976.000,00	348.590.000,00	-	1.731.000,00	801.297.000,00
16	018398	SUMBAR	-	538.878.367,00	348.590.000,00	-	86.000.000,00	973.468.367,00
17	433011	RIAU	-	664.678.525,00	348.590.000,00	-	-	1.013.268.525,00
18	433020	JAMBI	-	243.385.000,00	348.590.000,00	-	-	591.975.000,00
19	018403	SUMSEL	-	417.642.883,00	348.590.000,00	-	8.975.750,00	775.208.633,00
20	018410	LAMPUNG	-	499.562.800,00	348.590.000,00	-	-	848.152.800,00
21	018424	KALBAR	-	618.958.250,00	348.590.000,00	-	-	967.548.250,00
22	433036	KALTENG	-	742.942.446,00	348.590.000,00	-	165.214.700,00	1.256.747.146,00
23	018431	KALSEL	-	428.038.000,00	241.890.000,00	-	-	669.928.000,00
24	433042	KALTIM	6.038.000,00	1.144.206.159,00	405.240.000,00	-	50.470.000,00	1.605.954.159,00
25	018445	SULUT	-	240.350.000,00	922.240.000,00	-	-	1.162.590.000,00
26	433051	SULTENG	-	421.161.000,00	405.240.000,00	-	1.891.000,00	828.292.000,00
27	018452	SULSEL	-	640.000.000,00	241.890.000,00	-	-	881.890.000,00
28	433067	SULTRA	-	464.278.268,00	405.240.000,00	-	-	869.518.268,00
29	433073	MALUKU	-	777.156.000,00	405.240.000,00	-	-	1.182.396.000,00
30	018466	BALI	-	332.224.500,00	241.890.000,00	-	-	574.114.500,00
31	018562	NTB	-	580.425.000,00	348.590.000,00	-	200.000.000,00	1.129.015.000,00
32	433098	NTT	-	221.401.000,00	405.240.000,00	-	-	626.641.000,00
33	433082	PAPUA	-	974.757.060,00	405.240.000,00	-	-	1.379.997.060,00
34	433102	BENGKULU	4.500.000,00	811.703.500,00	348.590.000,00	-	-	1.164.793.500,00
35	631631	MALUT	-	98.807.000,00	405.240.000,00	114.000.000,00	-	618.047.000,00
36	631610	BANTEN	-	267.342.500,00	348.590.000,00	-	-	615.932.500,00
37	631606	BABEL	-	295.741.718,00	348.590.000,00	-	-	644.331.718,00
38	631627	GORONTALO	-	453.888.000,00	405.240.000,00	-	-	859.128.000,00
39	666798	KEPRI	-	-	405.240.000,00	-	-	405.240.000,00
40	666700	PAPUA BARAT	-	138.000.000,00	405.240.000,00	-	-	543.240.000,00
41	666803	SULBAR	-	223.610.000,00	405.240.000,00	-	-	628.850.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>2.824.376.596,00</b>	<b>44.217.723.861,00</b>	<b>12.034.866.800,00</b>	<b>114.000.000,00</b>	<b>1.569.425.444,00</b>	<b>60.760.392.701,00</b>

NO.	KODE SATKER	URAIAN SATKER	PEROLEHAN LAINNYA (112)	REKLAS DARI ASET LAINNYA KE ASET TETAP (177)	PENGEMBANGAN NILAI ASET (202)	KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS (+) (204)	PENERIMAAN ASET TETAP RENOVASI (206)	SUB TOTAL TRANSAKSI PENAMBAHAN (B)
1	017326	SESTAMA	-	-	69.084.500,00	-	-	69.084.500,00
2	649530	IRTAMA	-	-	-	-	-	-
3	649505	KBKR	-	-	-	-	-	-
4	649512	KSPK	-	-	-	-	-	-
5	649526	LATBANG	-	-	-	-	-	-
6	668419	DITVOK	-	-	-	-	-	-
7	668423	PUSLITBANG	-	-	-	-	-	-
8	682054	ADPIN	-	-	-	-	-	-
9	682061	DALDUK	-	-	-	-	-	-
10	017393	JABAR	-	-	-	-	-	-
11	017621	JATENG	-	-	-	-	-	-
12	017972	DIY	-	-	-	-	-	-
13	018030	JATIM	-	-	-	-	-	-
14	018377	ACEH	-	-	-	-	-	-
15	018381	SUMUT	-	29.642.500,00	-	-	-	29.642.500,00
16	018398	SUMBAR	-	-	-	-	-	-
17	433011	RIAU	-	-	-	-	-	-
18	433020	JAMBI	-	-	-	-	-	-
19	018403	SUMSEL	-	-	-	-	-	-
20	018410	LAMPUNG	-	2.343.000,00	-	-	-	2.343.000,00
21	018424	KALBAR	-	-	-	-	-	-
22	433036	KALTENG	9.840.000,00	-	-	-	-	9.840.000,00
23	018431	KALSEL	-	-	-	-	-	-
24	433042	KALTIM	-	-	12.305.000,00	2.108.436,00	-	14.413.436,00
25	018445	SULUT	-	-	-	-	-	-
26	433051	SULTENG	-	-	-	-	-	-
27	018452	SULSEL	-	29.720.000,00	-	-	-	29.720.000,00
28	433067	SULTRA	-	-	-	-	-	-
29	433073	MALUKU	-	-	-	-	-	-
30	018466	BALI	-	-	-	-	-	-
31	018562	NTB	-	-	-	-	-	-
32	433098	NTT	-	-	-	-	-	-
33	433082	PAPUA	-	-	-	-	-	-
34	433102	BENGKULU	6.500.000,00	-	-	-	5.840.000,00	12.340.000,00
35	631631	MALUT	-	-	-	-	-	-
36	631610	BANTEN	-	-	-	-	-	-
37	631606	BABEL	-	-	-	-	-	-
38	631627	GORONTALO	-	-	-	-	-	-
39	666798	KEPRI	-	-	-	-	-	-
40	666700	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-
41	666803	SULBAR	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>16.340.000,00</b>	<b>61.705.500,00</b>	<b>81.389.500,00</b>	<b>2.108.436,00</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>167.383.436,00</b>

NO.	KODE SATKER	URAIAN SATKER	SUB TOTAL TRANSAKSI PENAMBAHAN (A)	SUB TOTAL TRANSAKSI PENAMBAHAN (B)	TOTAL TRANSAKSI PENAMBAHAN (A + B)
1	017326	SESTAMA	20.869.213.851,00	69.084.500,00	20.938.298.351,00
2	649530	IRTAMA	2.640.000,00	-	2.640.000,00
3	649505	KBKR	-	-	-
4	649512	KSPK	364.552.400,00	-	364.552.400,00
5	649526	LATBANG	-	-	-
6	668419	DITVOK	117.406.000,00	-	117.406.000,00
7	668423	PUSLITBANG	80.267.821,00	-	80.267.821,00
8	682054	ADPIN	5.991.906.725,00	-	5.991.906.725,00
9	682061	DALDUK	136.800.000,00	-	136.800.000,00
10	017393	JABAR	2.574.074.706,00	-	2.574.074.706,00
11	017621	JATENG	1.492.387.866,00	-	1.492.387.866,00
12	017972	DIY	741.626.060,00	-	741.626.060,00
13	018030	JATIM	977.202.700,00	-	977.202.700,00
14	018377	ACEH	3.794.750.146,00	-	3.794.750.146,00
15	018381	SUMUT	801.297.000,00	29.642.500,00	830.939.500,00
16	018398	SUMBAR	973.468.367,00	-	973.468.367,00
17	433011	RIAU	1.013.268.525,00	-	1.013.268.525,00
18	433020	JAMBI	591.975.000,00	-	591.975.000,00
19	018403	SUMSEL	775.208.633,00	-	775.208.633,00
20	018410	LAMPUNG	848.152.800,00	2.343.000,00	850.495.800,00
21	018424	KALBAR	967.548.250,00	-	967.548.250,00
22	433036	KALTENG	1.256.747.146,00	9.840.000,00	1.266.587.146,00
23	018431	KALSEL	669.928.000,00	-	669.928.000,00
24	433042	KALTIM	1.605.954.159,00	14.413.436,00	1.620.367.595,00
25	018445	SULUT	1.162.590.000,00	-	1.162.590.000,00
26	433051	SULTENG	828.292.000,00	-	828.292.000,00
27	018452	SULSEL	881.890.000,00	29.720.000,00	911.610.000,00
28	433067	SULTRA	869.518.268,00	-	869.518.268,00
29	433073	MALUKU	1.182.396.000,00	-	1.182.396.000,00
30	018466	BALI	574.114.500,00	-	574.114.500,00
31	018562	NTB	1.129.015.000,00	-	1.129.015.000,00
32	433098	NTT	626.641.000,00	-	626.641.000,00
33	433082	PAPUA	1.379.997.060,00	-	1.379.997.060,00
34	433102	BENGKULU	1.164.793.500,00	12.340.000,00	1.177.133.500,00
35	631631	MALUT	618.047.000,00	-	618.047.000,00
36	631610	BANTEN	615.932.500,00	-	615.932.500,00
37	631606	BABEL	644.331.718,00	-	644.331.718,00
38	631627	GORONTALO	859.128.000,00	-	859.128.000,00
39	666798	KEPRI	405.240.000,00	-	405.240.000,00
40	666700	PAPUA BARAT	543.240.000,00	-	543.240.000,00
41	666803	SULBAR	628.850.000,00	-	628.850.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>60.760.392.701,00</b>	<b>167.383.436,00</b>	<b>60.927.776.137,00</b>



Transaksi pengurangan peralatan dan mesin per satker dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO.	KODE SATKER	URAIAN SATKER	REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP KE ASET LAINNYA (188)	KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS ( ) (204)	PENGHAPUSAN (301)	TRANSFER KELUAR (302)	HIBAH KELUAR (303)	SUB TOTAL TRANSAKSI PENAMBAHAN (A)
1	017326	SESTAMA	(86.522.250,00)	-	-	(11.982.630.000,00)	-	(12.069.152.250,00)
2	649530	IRTAMA	-	-	-	-	-	-
3	649505	KBKR	(242.251.200,00)	-	-	-	-	(242.251.200,00)
4	649512	KSPK	-	-	-	-	-	-
5	649526	LATBANG	(442.600.900,00)	-	-	-	-	(442.600.900,00)
6	668419	DITVOK	(464.609.200,00)	-	-	-	-	(464.609.200,00)
7	668423	PUSLITBANG	-	-	-	-	-	-
8	682054	ADPIN	-	-	-	-	-	-
9	682061	DALDUK	(7.150.000,00)	-	-	-	-	(7.150.000,00)
10	017393	JABAR	(65.834.000,00)	-	-	-	-	(65.834.000,00)
11	017621	JATENG	(119.010.000,00)	-	-	-	-	(119.010.000,00)
12	017972	DIY	-	-	-	-	-	-
13	018030	JATIM	(193.500.000,00)	-	-	-	-	(193.500.000,00)
14	018377	ACEH	-	-	-	-	-	-
15	018381	SUMUT	(395.272.500,00)	-	-	-	-	(395.272.500,00)
16	018398	SUMBAR	(56.650.000,00)	-	-	-	-	(56.650.000,00)
17	433011	RIAU	(431.556.200,00)	-	-	-	(347.000.000,00)	(778.556.200,00)
18	433020	JAMBI	-	-	-	-	-	-
19	018403	SUMSEL	-	-	(137.717.200,00)	-	-	(137.717.200,00)
20	018410	LAMPUNG	(565.953.422,00)	-	-	-	-	(565.953.422,00)
21	018424	KALBAR	(126.554.960,00)	-	-	-	-	(126.554.960,00)
22	433036	KALTENG	(593.301.600,00)	-	-	-	-	(593.301.600,00)
23	018431	KALSEL	(41.722.000,00)	-	-	-	-	(41.722.000,00)
24	433042	KALTIM	(44.077.900,00)	-	-	-	-	(44.077.900,00)
25	018445	SULUT	-	(200.000,00)	-	(345.276.800,00)	-	(345.476.800,00)
26	433051	SULTENG	-	-	-	-	-	-
27	018452	SULSEL	(33.490.000,00)	-	-	-	-	(33.490.000,00)
28	433067	SULTRA	-	-	-	-	-	-
29	433073	MALUKU	-	-	-	-	-	-
30	018466	BALI	(253.500.000,00)	-	-	-	-	(253.500.000,00)
31	018562	NTB	-	-	-	-	-	-
32	433098	NTT	(68.668.000,00)	-	(170.156.800,00)	-	-	(238.824.800,00)
33	433082	PAPUA	-	-	-	-	-	-
34	433102	BENGKULU	-	-	-	-	-	-
35	631631	MALUT	-	-	-	-	-	-
36	631610	BANTEN	-	-	-	-	-	-
37	631606	BABEL	-	-	-	-	-	-
38	631627	GORONTALO	-	-	-	-	-	-
39	666798	KEPRI	-	-	-	-	-	-
40	666700	PAPUA BARAT	(414.876.545,00)	-	-	-	-	(414.876.545,00)
41	666803	SULBAR	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			<b>(4.647.100.677,00)</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>(307.874.000,00)</b>	<b>(12.327.906.800,00)</b>	<b>(347.000.000,00)</b>	<b>(17.630.081.477,00)</b>

NO.	KODE SATKER	URAIAN SATKER	REKLASIFIKASI KELUAR (304)	KOREKSI PENCATATAN (305)	USULAN BARANG RUSAK BERAT KE PENGELOLA BMN (306)	USULAN BARANG HILANG KE PENGELOLA BMN (308)	PENGHENTIAN ASET DARI PENGGUNAAN (401)	SUB TOTAL TRANSAKSI PENAMBAHAN (A)
1	017326	SESTAMA	(963.435.000,00)	-	(125.229.250,00)	-	-	(1.088.664.250,00)
2	649530	IRTAMA	(2.640.000,00)	-	-	-	-	(2.640.000,00)
3	649505	KBKR	-	-	(16.400.000,00)	-	-	(16.400.000,00)
4	649512	KSPK	-	-	-	-	-	-
5	649526	LATBANG	-	-	-	-	-	-
6	668419	DITVOK	-	-	-	-	-	-
7	668423	PUSLITBANG	-	-	-	-	-	-
8	682054	ADPIN	-	-	-	-	-	-
9	682061	DALDUK	-	-	-	-	-	-
10	017393	JABAR	(9.500.000,00)	-	-	-	-	(9.500.000,00)
11	017621	JATENG	(79.567.994,00)	-	-	-	-	(79.567.994,00)
12	017972	DIY	-	-	-	-	(570.434.649,00)	(570.434.649,00)
13	018030	JATIM	-	-	-	-	-	-
14	018377	ACEH	-	(190.000.000,00)	-	-	-	(190.000.000,00)
15	018381	SUMUT	-	-	-	-	-	-
16	018398	SUMBAR	(86.000.000,00)	-	-	-	-	(86.000.000,00)
17	433011	RIAU	-	-	(194.392.700,00)	-	-	(194.392.700,00)
18	433020	JAMBI	-	-	-	-	(6.250.000,00)	(6.250.000,00)
19	018403	SUMSEL	(8.975.750,00)	-	-	-	-	(8.975.750,00)
20	018410	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-
21	018424	KALBAR	-	-	-	-	-	-
22	433036	KALTENG	(12.975.000,00)	-	-	-	-	(12.975.000,00)
23	018431	KALSEL	-	-	-	-	-	-
24	433042	KALTIM	(58.952.500,00)	-	-	(34.398.800,00)	-	(93.351.300,00)
25	018445	SULUT	-	-	-	-	-	-
26	433051	SULTENG	(1.891.000,00)	-	-	-	-	(1.891.000,00)
27	018452	SULSEL	-	-	-	-	-	-
28	433067	SULTRA	-	-	-	-	-	-
29	433073	MALUKU	-	-	-	-	-	-
30	018466	BALI	-	-	-	-	-	-
31	018562	NTB	(200.000.000,00)	-	-	(6.300.000,00)	-	(206.300.000,00)
32	433098	NTT	-	-	-	-	-	-
33	433082	PAPUA	-	-	-	-	-	-
34	433102	BENGGULU	-	-	-	-	-	-
35	631631	MALUT	-	-	-	-	-	-
36	631610	BANTEN	-	-	-	-	-	-
37	631606	BABEL	-	-	-	-	-	-
38	631627	GORONTALO	-	-	-	-	-	-
39	666798	KEPRI	-	-	-	(14.870.250,00)	-	(14.870.250,00)
40	666700	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-
41	666803	SULBAR	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			(1.423.937.244,00)	(190.000.000,00)	(336.021.950,00)	(55.569.050,00)	(576.684.649,00)	(2.582.212.893,00)

NO.	KODE SATKER	URAIAN SATKER	SUB TOTAL TRANSAKSI PENAMBAHAN (A)	SUB TOTAL TRANSAKSI PENAMBAHAN (B)	TOTAL TRANSAKSI PENAMBAHAN (A + B)
1	017326	SESTAMA	(12.069.152.250,00)	(1.088.664.250,00)	(13.157.816.500,00)
2	649530	IRTAMA	-	(2.640.000,00)	(2.640.000,00)
3	649505	KBKR	(242.251.200,00)	(16.400.000,00)	(258.651.200,00)
4	649512	KSPK	-	-	-
5	649526	LATBANG	(442.600.900,00)	-	(442.600.900,00)
6	668419	DITVOK	(464.609.200,00)	-	(464.609.200,00)
7	668423	PUSLITBANG	-	-	-
8	682054	ADPIN	-	-	-
9	682061	DALDUK	(7.150.000,00)	-	(7.150.000,00)
10	017393	JABAR	(65.834.000,00)	(9.500.000,00)	(75.334.000,00)
11	017621	JATENG	(119.010.000,00)	(79.567.994,00)	(198.577.994,00)
12	017972	DIY	-	(570.434.649,00)	(570.434.649,00)
13	018030	JATIM	(193.500.000,00)	-	(193.500.000,00)
14	018377	ACEH	-	(190.000.000,00)	(190.000.000,00)
15	018381	SUMUT	(395.272.500,00)	-	(395.272.500,00)
16	018398	SUMBAR	(56.650.000,00)	(86.000.000,00)	(142.650.000,00)
17	433011	RIAU	(778.556.200,00)	(194.392.700,00)	(972.948.900,00)
18	433020	JAMBI	-	(6.250.000,00)	(6.250.000,00)
19	018403	SUMSEL	(137.717.200,00)	(8.975.750,00)	(146.692.950,00)
20	018410	LAMPUNG	(565.953.422,00)	-	(565.953.422,00)
21	018424	KALBAR	(126.554.960,00)	-	(126.554.960,00)
22	433036	KALTENG	(593.301.600,00)	(12.975.000,00)	(606.276.600,00)
23	018431	KALSEL	(41.722.000,00)	-	(41.722.000,00)
24	433042	KALTIM	(44.077.900,00)	(93.351.300,00)	(137.429.200,00)
25	018445	SULUT	(345.476.800,00)	-	(345.476.800,00)
26	433051	SULTENG	-	(1.891.000,00)	(1.891.000,00)
27	018452	SULSEL	(33.490.000,00)	-	(33.490.000,00)
28	433067	SULTRA	-	-	-
29	433073	MALUKU	-	-	-
30	018466	BALI	(253.500.000,00)	-	(253.500.000,00)
31	018562	NTB	-	(206.300.000,00)	(206.300.000,00)
32	433098	NTT	(238.824.800,00)	-	(238.824.800,00)
33	433082	PAPUA	-	-	-
34	433102	BENGKULU	-	-	-
35	631631	MALUT	-	-	-
36	631610	BANTEN	-	-	-
37	631606	BABEL	-	-	-
38	631627	GORONTALO	-	-	-
39	666798	KEPRI	-	(14.870.250,00)	(14.870.250,00)
40	666700	PAPUA BARAT	(414.876.545,00)	-	(414.876.545,00)
41	666803	SULBAR	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			<b>(17.630.081.477,00)</b>	<b>(2.582.212.893,00)</b>	<b>(20.212.294.370,00)</b>

Berikut rincian penggunaan/realisasi Belanja Modal dalam rangka penambahan nilai Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sd. 31 Desember 2015 :

No.	Uraian Transaksi	Mata Anggaran Belanja Modal yang Digunakan				Jumlah peruntukkan peralatan mesin
		521211	523121	532111	536111	
	<b>PERALATAN &amp; MESIN</b>					
1.	101 - Pembelian Peralatan Mesin	106.828.000,00	5.700.000,00	21.552.135.976,00	22.553.059.885,00	44.217.723.861,00
2.	202 - Pengembangan Nilai Aset	-	-	46.932.000,00	34.457.500,00	81.389.500,00
3.	101 - Ekstrakomptable	-	-	120.091.587,00	-	120.091.587,00
4.	Kembali Belanja Modal	-	-	(14.673.900,00)	-	(14.673.900,00)
5.	Lebih Tagih SPM Belanja Modal Belum Disetor Ke Kas Negara	-	-	100.000,00	-	100.000,00
						-
	<b>SELAIN PERALATAN &amp; MESIN :</b>					-
6.	101 - Pembelian Software	-	-	3.850.000,00	-	3.850.000,00
7.	101 - Pembelian Lisensi	-	-	34.452.000,00	-	34.452.000,00
8.	101 - Pembelian Jaringan	-	-	48.100.000,00	-	48.100.000,00
9.	101 - Pembelian Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
10.	202 - Pengembangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan	-	-	23.006.500,00	-	23.006.500,00
11.	202 - Pengembangan Nilai Aset Jaringan	-	-	147.105.000,00	-	147.105.000,00
12.	Koreksi Beban Aset (Beban Persediaan Konsumsi)	-	-	3.850.000,00	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>106.828.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>21.964.949.163,00</b>	<b>22.587.517.385,00</b>	<b>44.661.144.548,00</b>

Perolehan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sd. 31 Desember 2015 terdiri dari penggunaan Belanja Barang MAK 52 senilai Rp.97.228.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin MAK 532 senilai Rp.21.964.949.163,00 dan Belanja Modal Lainnya MAK 536 senilai Rp.22.540.824.585,00.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat **ketidaksesuaian** antara belanja modal dengan penggunaannya yaitu :

**A. Pembelian/Pengembangan Nilai Peralatan dan Mesin tidak menggunakan MAK 532**

1. Pembelian Peralatan dan Mesin dengan menggunakan MAK 52 senilai Rp.97.228.000,00, dimana para satuan kerja tersebut dibawah ini seharusnya menggunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111), yaitu antara lain:

a. Penggunaan Belanja MAK 521211 senilai Rp.91.528.000,00 pada beberapa satuan kerja sebagai berikut :

- Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sumatera Utara (018381) menggunakan Belanja Bahan MAK 521211 sebesar Rp.15.300.000,00 untuk Pembelian

Peralatan dan Mesin senilai Rp.15.300.000,00 berupa 9 buah external/portable hard disk @Rp.1.700.000,00

- Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Riau (433011) menggunakan Belanja Bahan MAK 521211 sebesar Rp.52.400.000,00 untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa:

- 12 buah Meja Kerja Kayu senilai @Rp.2.700.000,00	= Rp.	32.400.000,00
- 1 buah meja kerja kayu	= Rp.	3.000.000,00
- 1 buah meja kayu	= Rp.	6.500.000,00
- 1 buah Lemari Kayu	= Rp.	2.500.000,00
- 1 buah Microphone/Wireless MC;	= Rp.	8.000.000,00

- Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. Kalimantan Selatan (018431) menggunakan Belanja Bahan MAK 521211 sebesar Rp.18.528.000,00 untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa 1 unit TV uk. 52inch.

- Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Prop. NTB (018562) menggunakan Belanja Bahan MAK 521211 sebesar Rp.20.600.000,00 untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa:

- 1 buah Meja Makan Kayu	= Rp.	3.200.000,00
- 1 unit Lemari Es	= Rp.	3.200.000,00
- 1 buah Lemari Kayu	= Rp.	5.200.000,00
- 1 set Alat Rumah Tangga Lainnya (home set)	= Rp.	9.000.000,00

- b. Penggunaan Belanja MAK 523121 senilai Rp.5.700.000,00 pada satuan kerja BKKBN Prop. Sulawesi Tengah (433051) untuk Pembelian Peralatan dan Mesin

berupa :	- 1 unit mesin pompa air PMK	= Rp.	1.250.000,00
	- 1 unit Tandon Air	= Rp.	4.450.000,00

2. Pembelian Peralatan dan Mesin dengan menggunakan MAK 536111 senilai Rp.22.553.059.885,00, dimana para satuan kerja tersebut dibawah ini seharusnya menggunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111), yaitu antara lain:

- a. Penggunaan Belanja MAK 536111 senilai Rp.16.915.525.000,00 pada satuan kerja Sekretariat Utama (017326) untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa :

- 1 unit Server	= Rp.	649.000.000,00
- 41 unit Peralatan Komputer Lainnya @Rp.4.950.000,00	= Rp.	202.950.000,00
- 26 unit Peralatan Komputer Lainnya @Rp.8.800.000,00	= Rp.	228.800.000,00
- 20 unit Peralatan Komputer Lainnya @Rp.3.850.000,00	= Rp.	77.000.000,00
- 28 unit Peralatan Komputer Lainnya @Rp.6.050.000,00	= Rp.	169.400.000,00
- 4 unit Peralatan Komputer Lainnya @Rp.20.350.000,00	= Rp.	81.400.000,00

- 1 unit Peralatan Komputer Lainnya @Rp.37.950.000,00 = Rp. 37.950.000,00
  - 9 unit Hard Disk @Rp.5.775.000,00 = Rp. 51.975.000,00
  - 10 unit Hard Disk @Rp.9.900.000,00 = Rp. 99.000.000,00
  - 1 unit Digital Recording System = Rp. 22.880.000,00
  - 1 unit Digital Recording System = Rp. 11.330.000,00
  - 4 unit CCTV @Rp.1.496.550,00 = Rp. 5.986.200,00
  - 12 unit CCTV @Rp.4.194.300,00 = Rp. 50.331.600,00
  - 4 unit CCTV @Rp.17.388.800,00 = Rp. 69.555.200,00
  - 1 unit Switch = Rp. 74.415.000,00
  - 1 unit Switch = Rp. 61.182.000,00
  - 1 unit Switch = Rp. 6.150.000,00
  - 17 unit Switch @Rp.56.650.000,00 = Rp. 963.050.000,00
  - 1 unit Router = Rp. 316.800.000,00
  - 28 unit Router @Rp.106.700.000,00 = Rp. 2.987.600.000,00
  - 1 buah Email Security = Rp. 1.813.900.000,00
  - 1 buah Email Security = Rp. 6.360.000,00
  - 10 unit wireless access point @Rp.15.400.000,00 = Rp. 154.000.000,00
  - 33 unit wireless access point @Rp.20.900.000,00 = Rp. 689.700.000,00
  - 1 buah Firewall = Rp. 550.000.000,00
  - 33 unit Video Conference @Rp.220.990.000,00 = Rp. 7.292.670.000,00
  - 3 unit TV @Rp.11.440.000,00 = Rp. 34.320.000,00
  - 1 buah Wanscaller = Rp. 220.330.000,00
- b. Penggunaan Belanja MAK 536111 senilai Rp.5.637.534.885,00 pada satuan kerja Kedepuitan Bidang Advokasi dan Penggerakkan Informasi (682054) untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa :
- 1 unit Laptop = Rp. 14.000.000,00
  - 6 unit Laptop @Rp.18.800.000,00 = Rp. 112.800.000,00
  - 4 unit Laptop @Rp.18.000.000,00 = Rp. 72.000.000,00
  - 1 unit server = Rp. 350.280.150,00
  - 1 unit server = Rp. 145.390.740,00
  - 1 unit server = Rp. 231.382.150,00
  - 1 unit server = Rp. 166.164.900,00
  - 1 unit server = Rp. 125.226.750,00
  - 1 unit server = Rp. 154.316.250,00
  - 1 unit server = Rp. 471.000.000,00
  - 1 unit server Server Dell PowerEdge R930 = Rp. 382.662.500,00
  - 1 unit server Server Dell PowerEdge R730 = Rp. 117.309.500,00
  - 3 unit storage modul disk (peralatan mainframe)

- @Rp.585.621.300,00	= Rp. 1.756.863.900,00
- 1 unit storage modul disk (peralatan mainframe)	= Rp. 613.362.750,00
- 45 buah CAT 6 CABLE @Rp.986.205,00	= Rp. 44.379.225,00
- 16 buah Network Cable Tester @Rp.801.735,00	= Rp. 12.827.760,00
- 1 buah Network Cable Tester	= Rp. 12.566.664,00
- 1 buah KVM Keyboard Video Monitor	= Rp. 17.808.450,00
- 1 buah Switch	= Rp. 14.133.240,00
- 1 buah Lemari Kayu	= Rp. 35.132.716,00
- 3 unit Server @Rp.148.500.000,00	= Rp. 445.500.000,00
- 5 unit PC @Rp.7.470.000,00	= Rp. 37.350.000,00
- 3 unit Laptop @Rp.7.850.000,00	= Rp. 23.550.000,00
- 1 unit Eksternal/Portable Hardisk	= Rp. 4.200.000,00
- 2 unit Mesin Digital Signage @Rp.39.751.250,00	= Rp. 79.502.500,00
- 2 unit printer @Rp.8.367.250,00	= Rp. 16.734.500,00
- 1 unit printer	= Rp. 8.790.250,00
- 4 PC unit @Rp.18.600.000,00	= Rp. 74.400.000,00
- 6 PC unit @Rp.13.400.000,00	= Rp. 80.400.000,00
- 1 unit Layar Film/Projector	= Rp. 2.200.000,00
- 1 unit LCD Projector/Infocus	= Rp. 15.300.000,00

3. Pengembangan nilai Aset Peralatan dan Mesin dengan menggunakan MAK 536111 senilai Rp.34.457.500,00, pada satuan kerja Sekretariat Utama (017326) dimana satuan kerja tersebut dibawah ini seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (MAK 532121), dengan rincian penambahan nilai aset sebagai berikut:

- 1 unit Switch	= Rp. 6.150.000,00
- 1 buah E-Mail Security	= Rp. 6.360.000,00
- 1 buah Wanscaller	= Rp. 13.020.000,00
- 1 unit video conference	= Rp. 7.200.000,00
- 1 unit video conference	= Rp. 1.727.500,00

**B. Belanja Modal MAK 532111 tidak menambah transaksi “Pembelian Peralatan dan Mesin”**

1. Pengembangan nilai Aset Peralatan dan Mesin dengan menggunakan MAK 532111 senilai Rp.46.932.000,00, dimana satuan kerja tersebut dibawah ini seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (MAK 532121), yaitu antara lain:
  - a. Penggunaan Belanja MAK 532111 senilai Rp.34.627.000,00 pada satuan kerja Sekretariat Utama (017326) untuk menambah Nilai Aset Peralatan dan Mesin berupa :

- 1 unit Alat Kantor Lainnya	= Rp.	28.897.000,00
- Honor Pengadaan Alat Kantor Lainnya	= Rp.	3.420.000,00
- 1 unit Alat Kantor Lainnya	= Rp.	2.310.000,00
  - b. Penggunaan Belanja MAK 532111 senilai Rp.12.305.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Kalimantan Timur (433042) untuk Pembelian asesoris mobil Pick Up yang dikategorikan ke dalam Penambahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin.
2. Pembelian Aset Tak Berwujud berupa Software dengan menggunakan MAK 532111 senilai Rp.3.850.000,00, pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Bali (018466) yang seharusnya menggunakan Belanja Modal Lainnya (MAK 536111);
3. Pembelian Aset Tak Berwujud berupa Lisensi dengan menggunakan MAK 532111 senilai Rp.34.452.000,00, pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Bali (018466) yang seharusnya menggunakan Belanja Modal Lainnya (MAK 536111);
4. Pembelian Jaringan dengan menggunakan MAK 532111 senilai Rp.48.100.000,00, dimana satuan kerja tersebut dibawah ini seharusnya menggunakan Belanja Modal Jaringan (MAK 534131), yaitu antara lain:
  - a. Penggunaan Belanja MAK 532111 senilai Rp.35.800.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Nusa Tenggara Timur (433098) untuk Pembelian Jaringan berupa pengadaan jaringan instalasi penangkal petir manual.
  - b. Penggunaan Belanja MAK 532111 senilai Rp.12.300.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Bengkulu (433102) untuk Pembelian Jaringan berupa penambahan jaringan install penangkal petir.
5. Pengembangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan dengan menggunakan MAK 532111 senilai Rp.23.006.500,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Kalimantan Timur



- (433042) untuk Paket Pekerjaan Rehab Loby Kantor yang dikategorikan ke dalam pengembangan nilai asset yang seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121);
6. Pengembangan Nilai Aset Jaringan dengan menggunakan MAK 532111 senilai Rp.147.105.000,00, dimana satuan kerja tersebut dibawah ini seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambah Nilai Jaringan (MAK 534161), yaitu antara lain:
    - a. Penggunaan Belanja MAK 532111 senilai Rp.55.917.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sumatera Barat (018398) untuk penambahan jaringan tegangan diatas 300 KVA berupa jaringan teknologi informasi di seluruh wilayah Sumatera Barat dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik;
    - b. Penggunaan Belanja MAK 532111 senilai Rp.91.188.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Gorontalo (631627) untuk pemasangan instalasi gardu listrik kapasitas kecil;
  7. Penggunaan Belanja MAK 532111 senilai Rp.3.850.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sulawesi Tenggara (433067) untuk pembelian asset ekstrakomptable berupa spreng sehingga tidak dicatat ke aplikasi SIMAK BMN dan langsung dibebankan ke Beban Persediaan Konsumsi;
  8. Pembelian Aset Ekstrakomptable BKKBN dengan menggunakan MAK 532111 senilai Rp.120.091.587,00 dan karena nilai satuannya dibawah nilai kapitalisasi asset peralatan dan mesin maka tidak menambah nilai asset peralatan dan mesin. Satuan Kerja BKKBN yang menghasilkan asset ekstrakomptable dari Belanja MAK 532111 antara lain :
 

a. Puslitbang (668423) sebesar .....	Rp.	149.997,00
b. Riau (433011) sebesar .....	Rp.	2.000.000,00
c. Kalimantan Timur (433042) .....	Rp.	397.400,00
d. Sulawesi Tengah (433051) .....	Rp.	6.120.000,00
e. Bali (018466) .....	Rp.	1.100.000,00
f. NTT (433098) .....	Rp.	750.000,00
g. Papua (433082) .....	Rp.	109.574.190,00

Selain ketidaksesuaian antara belanja modal dengan penggunaannya seperti yang telah dijelaskan diatas, pada tabel diatas juga terlihat ada pengembalian belanja modal MAK 532111 senilai RP.14.673.900,00 dan lebih tagih SPM Belanja Modal Belum Disetor ke Kas Negara senilai Rp.100.000,00 dengan rincian satuan kerja berikut ini :

1. Pengembalian Belanja Modal MAK 532111 senilai RP.14.673.900,00 terdiri dari satuan kerja sbb :
  - a. NTT ..... : Rp. 300.000,00
  - b. Sumbar..... : Rp. 2.735.000,00
  - c. Sulawesi Tenggara..... : Rp. 11.438.900,00
  - d. Sulawesi Utara ..... : Rp. 200.000,00
2. Lebih tagih SPM Belanja Modal yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2015 dan baru disetor pada Perwakilan BKKBN Prop. Bali senilai Rp.100.000,00.

Gedung dan Bangunan  
Rp.290.848.130.308,00

#### C.10 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp.290.848.130.308,00 dan Rp.274.532.374.276,00 sehingga kenaikan terjadi aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.16.315.756.032,00 atau 5,94 persen. Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan dan Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015

<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp 274.532.374.276,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
101 - Pembelian	Rp 159.496.000,00
105 - Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp 8.134.614.990,00
107 - Reklasifikasi Masuk	Rp 7.008.968.470,00
202 - Pengembangan Nilai Aset	Rp 8.828.795.327,00
204 - Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp 72.830.000,00
206 - Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp 27.850.000,00
208 - Pengembangan Melalui KDP	Rp 2.597.086.000,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	
204 - Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(2.072.045.657,00)
301 - Penghapusan	(1.091.379.000,00)
304 - Reklasifikasi Keluar	(7.350.460.098,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp 290.848.130.308,00</b>
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2015	(94.426.591.245,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp 196.421.539.063,00</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan per satker dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	KODE SATKER	URAIAN SATKER	PEMBELIAN (101)	PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DGN KDP (105)	REKLASIFIKASI MASUK (107)	PENGEMBANGAN NILAI ASET (202)	KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS (204)	SUBTOTAL (A)
1	017326	SESTAMA	-	-	-	5.138.641.751,00	(1.817.278.845,00)	3.321.362.906,00
2	017621	JATENG	-	5.885.107.082,00	300.919.000,00	-	-	6.186.026.082,00
3	017393	JABAR	-	-	320.600.000,00	24.930.000,00	19.300.000,00	364.830.000,00
4	017972	DIY	-	-	-	240.519.000,00	-	240.519.000,00
5	018030	JATIM	-	-	1.371.609.000,00	270.163.000,00	-	1.641.772.000,00
6	018377	ACEH	-	-	-	477.633.400,00	-	477.633.400,00
7	018398	SUMBAR	-	-	-	79.798.550,00	-	79.798.550,00
8	018381	SUMUT	-	-	259.707.600,00	-	-	259.707.600,00
9	433011	RIAU	-	-	434.444.000,00	173.380.850,00	-	607.824.850,00
10	433020	JAMBI	79.930.000,00	-	-	-	600.000,00	80.530.000,00
11	018403	SUMSEL	-	-	-	244.073.000,00	-	244.073.000,00
12	018410	LAMPUNG	-	-	253.639.835,00	-	-	253.639.835,00
13	018424	KALBAR	-	-	474.586.863,00	-	-	474.586.863,00
14	433036	KALTENG	-	-	114.502.000,00	105.000.000,00	-	219.502.000,00
15	018431	KALSEL	-	-	-	155.300.000,00	-	155.300.000,00
16	433042	KALTIM	-	-	-	357.111.500,00	(5.295.000,00)	351.816.500,00
17	018445	SULUT	-	-	495.693.000,00	296.742.000,00	-	792.435.000,00
18	433051	SULTENG	79.566.000,00	-	255.260.000,00	-	-	334.826.000,00
19	018452	SULSEL	-	-	-	-	52.930.000,00	52.930.000,00
20	433073	MALUKU	-	-	406.484.000,00	-	-	406.484.000,00
21	018466	BALI	-	-	1.480.223.000,00	184.871.104,00	(4.204.048,00)	1.660.890.056,00
22	018562	NTB	-	-	322.965.000,00	-	-	322.965.000,00
23	433098	NTT	-	-	457.536.172,00	270.556.000,00	-	728.092.172,00
24	433082	PAPUA	-	-	-	-	-	-
25	433102	BENGKULU	-	-	60.799.000,00	61.898.000,00	-	122.697.000,00
26	631631	MALUT	-	1.437.847.000,00	-	-	-	1.437.847.000,00
27	631610	BANTEN	-	-	-	158.150.000,00	-	158.150.000,00
28	631606	BABEL	-	-	-	198.627.172,00	-	198.627.172,00
29	631627	GORONTALO	-	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00
30	666798	KEPRI	-	291.944.908,00	-	-	-	291.944.908,00
31	666700	PAPBAR	-	-	-	281.800.000,00	(245.267.764,00)	36.532.236,00
32	666803	SULBAR	-	519.716.000,00	-	84.600.000,00	-	604.316.000,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>159.496.000,00</b>	<b>8.134.614.990,00</b>	<b>7.008.968.470,00</b>	<b>8.828.795.327,00</b>	<b>(1.999.215.657,00)</b>	<b>22.132.659.130,00</b>

NO.	KODE SATKER	URAIAN SATKER	SUBTOTAL (A)	PENERIMAAN ASET TETAP RENOVASI (206)	PENGEMBANGAN MELALUI KDP (208)	PENGHAPUSAN (301)	REKLASIFIKASI KELUAR (304)	TOTAL
1	017326	SESTAMA	3.321.362.906,00	-	-	-	-	3.321.362.906,00
2	017621	JATENG	6.186.026.082,00	-	-	(1.091.379.000,00)	(300.919.000,00)	4.793.728.082,00
3	017393	JABAR	364.830.000,00	-	-	-	(339.900.000,00)	24.930.000,00
4	017972	DIY	240.519.000,00	-	-	-	-	240.519.000,00
5	018030	JATIM	1.641.772.000,00	-	-	-	(1.371.609.000,00)	270.163.000,00
6	018377	ACEH	477.633.400,00	-	-	-	-	477.633.400,00
7	018398	SUMBAR	79.798.550,00	-	-	-	-	79.798.550,00
8	018381	SUMUT	259.707.600,00	-	-	-	(259.707.600,00)	-
9	433011	RIAU	607.824.850,00	-	-	-	(434.444.000,00)	173.380.850,00
10	433020	JAMBI	80.530.000,00	-	-	-	-	80.530.000,00
11	018403	SUMSEL	244.073.000,00	-	-	-	-	244.073.000,00
12	018410	LAMPUNG	253.639.835,00	-	-	-	(253.639.835,00)	-
13	018424	KALBAR	474.586.863,00	-	-	-	(474.586.863,00)	-
14	433036	KALTENG	219.502.000,00	-	-	-	(375.688.800,00)	(156.186.800,00)
15	018431	KALSEL	155.300.000,00	-	-	-	-	155.300.000,00
16	433042	KALTIM	351.816.500,00	-	1.209.666.000,00	-	-	1.561.482.500,00
17	018445	SULUT	792.435.000,00	-	-	-	(495.693.000,00)	296.742.000,00
18	433051	SULTENG	334.826.000,00	-	-	-	(255.260.000,00)	79.566.000,00
19	018452	SULSEL	52.930.000,00	-	-	-	-	52.930.000,00
20	433073	MALUKU	406.484.000,00	-	-	-	(406.484.000,00)	-
21	018466	BALI	1.660.890.056,00	-	-	-	(1.480.223.000,00)	180.667.056,00
22	018562	NTB	322.965.000,00	-	-	-	(322.965.000,00)	-
23	433098	NTT	728.092.172,00	-	-	-	(518.541.000,00)	209.551.172,00
24	433082	PAPUA	-	-	1.050.550.000,00	-	-	1.050.550.000,00
25	433102	BENGKULU	122.697.000,00	27.850.000,00	-	-	(60.799.000,00)	89.748.000,00
26	631631	MALUT	1.437.847.000,00	-	-	-	-	1.437.847.000,00
27	631610	BANTEN	158.150.000,00	-	-	-	-	158.150.000,00
28	631606	BABEL	198.627.172,00	-	-	-	-	198.627.172,00
29	631627	GORONTALO	25.000.000,00	-	336.870.000,00	-	-	361.870.000,00
30	666798	KEPRI	291.944.908,00	-	-	-	-	291.944.908,00
31	666700	PAPBAR	36.532.236,00	-	-	-	-	36.532.236,00
32	666803	SULBAR	604.316.000,00	-	-	-	-	604.316.000,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>22.132.659.130,00</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>2.597.086.000,00</b>	<b>(1.091.379.000,00)</b>	<b>(7.350.460.098,00)</b>	<b>16.315.756.032,00</b>

Berikut rincian penggunaan/realisasi Belanja Modal dalam rangka penambahan nilai Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sd. 31 Desember 2015 :

No.	Uraian Peruntukan Gedung dan Bangunan	Mata Anggaran Belanja Modal yang digunakan								Jumlah peruntukan Gedung dan Bangunan	
		523111	532111	533111	533113	533114	533115	533121	533121		
1	101 - Pembelian Gedung dan Bangunan	-	-	79.930.000	-	-	-	-	79.966.000	-	159.496.000
2	101 - Pembelian Jaringan	-	-	49.987.000	-	-	-	-	-	-	49.987.000
3	105 - Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (GB)	-	-	1.437.847.000	-	-	-	-	-	-	1.437.847.000
4	113 - Penyelesaian Pembangunan Langsung (Jalan dan Jembatan)	-	-	116.200.000	-	-	-	-	-	-	116.200.000
5	202 - Pengembangan Nilai Aset (GB)	55.600.000	23.006.500	1.003.047.850	-	24.930.000	-	-	5.888.932.132	16.000.000	7.011.516.482
6	204 - Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000
7	208 - Pengembangan Melalui KDP (pada GB)	-	-	944.500.000	-	-	-	217.067.000	1.098.649.000	-	2.260.216.000
8	208 - Pengembangan Melalui KDP (pada JLU)	-	-	279.000.000	-	-	-	32.900.000	-	-	311.900.000
9	502 - Perolehan/Penambahan KDP (pada KDP)	-	-	92.625.600	10.200.000	-	-	-	2.215.053.845	75.000.000	2.491.004.445
10	503 - Pengembangan KDP (pada KDP)	-	-	1.600.026.400	-	-	-	-	1.040.445.000	87.000.000	2.727.471.400
11	Kembali Belanja Modal	-	-	(36.324.376)	-	-	-	-	(5.295.000)	-	(41.619.376)
12	407 - Ekstrakomple	-	-	6.495.150	-	-	-	-	-	-	6.495.150
13	Koreksi Beban Aset (Beban Pemeliharaan - Belanja penambahan daya listrik selama 2 bulan untuk kegiatan Pendataan Keluarga)	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>55.600.000</b>	<b>23.006.500</b>	<b>5.573.334.624</b>	<b>10.200.000</b>	<b>24.930.000</b>	<b>348.092.000</b>	<b>10.347.350.977</b>	<b>176.000.000</b>	<b>16.327.514.101</b>	

Perolehan Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sd. 31 Desember 2015 terdiri dari penggunaan Belanja Barang MAK 52 senilai Rp.55.600.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin MAK 532 senilai Rp.23.006.500,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan MAK 533 senilai Rp.16.304.507.601,00 dan Belanja Modal Lainnya MAK 536 senilai Rp.178.000.000,00.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat **ketidaksesuaian** antara belanja modal dengan penggunaannya yaitu :

**A. Pengadaan/Pengembangan Gedung dan Bangunan tidak menggunakan MAK 533**

1. Pengadaan Aset yang menambah transaksi Pengembangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan dengan menggunakan MAK 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) senilai Rp.55.600.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Kalimantan Selatan (018431) untuk rehab gedung dan bangunan dan telah dilakukan jurnal penyesuaian "Koreksi Beban – Aset". Belanja Modal yang seharusnya digunakan adalah Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121);
2. Pengadaan Aset yang menambah transaksi Pengembangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan dengan menggunakan MAK 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) senilai Rp.23.006.500,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Kalimantan Timur (433042) untuk Paket Pekerjaan Rehab Loby Kantor yang seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121);
3. Pengadaan Aset yang menambah transaksi Pengembangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan dengan menggunakan MAK 536121 (Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya) senilai Rp.16.000.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sulawesi Barat (666803) yang seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121);
4. Perolehan/Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Gedung dan Bangunan dengan menggunakan MAK 536121 (Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya) senilai Rp.75.000.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sulawesi Barat (666803) yang seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121);
5. Pengembangan KDP pada Gedung dan Bangunan dengan menggunakan MAK 536121 (Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya) senilai Rp.87.000.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sulawesi Barat

(666803) yang seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121).

#### **B. Belanja Modal MAK 533 tidak menambah nilai Aset Gedung dan Bangunan**

1. Pengadaan Jaringan berupa Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik di Gudang Alokon satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Jambi (433020) yang dibelanjakan dengan menggunakan MAK 533111 senilai Rp.49.987.000,00, dan seharusnya menggunakan Belanja Modal Jaringan (MAK 534131);
2. Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Langsung Jalan dan Jembatan berupa pembangunan paving blok satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Papua Barat (666700) yang dibelanjakan dengan menggunakan MAK 533111 senilai Rp.116.200.000,00, dan seharusnya menggunakan Belanja Modal Jalan dan Jembatan (MAK 534111);
3. Pengembangan Melalui KDP Jalan dan Jembatan berupa pembangunan rehab paving blok jalan depan kantor yang sebelumnya sudah rusak pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Papua (433082), yang dibelanjakan dengan menggunakan MAK 533111 senilai Rp.279.000.000,00 dan seharusnya menggunakan Belanja Modal Jalan dan Jembatan (MAK 534111);
4. Perolehan Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp.6.495.150,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Riau (433011) sehingga tidak dapat menambah nilai asset gedung dan bangunan.

Selain ketidaksesuaian antara belanja modal dengan penggunaannya seperti yang telah dijelaskan diatas, pada tabel diatas juga terlihat ada pengembalian belanja modal MAK 533111 senilai Rp.36.324.376,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Papua Barat.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan*

*Rp.24.571.657.281,00*

#### **C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.24.571.657.281,00 dan Rp22.383.169.932,00 sehingga terjadi kenaikan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.2.188.487.349,00 atau 9,78 persen.

Mutasi nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, sesuai dengan pengelompokan jenis transaksinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp 22.383.169.932,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- Pembelian	Rp 261.422.545,00
- Pengembangan Nilai Aset	Rp 338.087.000,00
- Pengembangan Melalui KDP	Rp 311.900.000,00
- Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 1.015.891.004,00
- Reklasifikasi Masuk	Rp 293.571.900,00
<b>Mutasi kurang:</b>	
- Reklasifikasi Keluar	(32.385.100,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp 24.571.657.281,00</b>
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2015	(7.704.856.219,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp 16.866.801.062,00</b>

Mutasi nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirinci masing-masing transaksi per satker sebagai berikut :

NO.	KODE SATKER	SATKER	MUTASI TAMBAH					MUTASI KURANG	TOTAL
			PEMBELIAN	PENGEMBANGAN NILAI ASET	PENGEMBANGAN MELALUI KDP	PENYELESAIAN PEMBANGUNAN LANGSUNG	REKLAS MASUK	REKLAS KELUAR	
1	017821	JATENG	-	-	-	-	32.385.100,00	(32.385.100,00)	-
2	018377	ACEH	15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000,00
3	018398	SUMBAR	-	55.917.000,00	-	-	-	-	55.917.000,00
4	433020	JAMBI	-	49.987.000,00	-	-	-	-	49.987.000,00
5	433011	RIAU	168.594.000,00	-	-	-	-	-	168.594.000,00
6	433036	KALTENG	-	-	-	-	261.186.800,00	-	261.186.800,00
7	433098	NTT	35.800.000,00	-	-	-	-	-	35.800.000,00
8	433082	PAPUA	-	140.995.000,00	311.900.000,00	-	-	-	452.895.000,00
9	431102	BENKULU	12.300.000,00	-	-	-	-	-	12.300.000,00
10	631606	BABEL	29.728.545,00	-	-	-	-	-	29.728.545,00
11	631627	GORONTALO	-	91.188.000,00	-	-	-	-	91.188.000,00
12	666790	KEPRI	-	-	-	899.691.004,00	-	-	899.691.004,00
13	666700	PAPUA BARAT	-	-	-	116.200.000,00	-	-	116.200.000,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>261.422.545,00</b>	<b>338.087.000,00</b>	<b>311.900.000,00</b>	<b>1.015.891.004,00</b>	<b>293.571.900,00</b>	<b>(32.385.100,00)</b>	<b>2.188.487.349,00</b>



Berikut rincian penggunaan/realisasi Belanja Modal dalam rangka penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari sd. 31 Desember 2015 :

No.	Uraian Peruntukan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Mata Anggaran Belanja Modal yang Digunakan								Jumlah peruntukan Aset
		521211	531115	532111	533111	533115	534131	534161	536111	
1.	101 - Pembelian Jaringan	62.000.000,00	-	48.100.000,00	-	-	121.594.000,00	-	29.728.545,00	261.422.545,00
2.	Penyelesaian 105 - Pembangunan dengan KDP Irigasi	-	899.691.004,00	-	-	899.691.004,00	-	-	-	1.799.382.008,00
3.	Penyelesaian 113 - Pembangunan Langsung Jalan dan Jembatan	-	-	-	116.200.000,00	-	-	-	-	116.200.000,00
4.	202 - Pengembangan Nilai Aset Jaringan	-	-	147.105.000,00	49.987.000,00	-	49.985.000,00	91.000.000,00	-	338.087.000,00
5.	208 - Pengembangan Melalui KDP Jalan dan Jembatan	-	-	-	279.000.000,00	32.900.000,00	-	-	-	311.900.000,00
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>		<b>62.000.000,00</b>	<b>899.691.004,00</b>	<b>195.205.000,00</b>	<b>445.187.000,00</b>	<b>932.591.004,00</b>	<b>171.589.000,00</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>29.728.545,00</b>	<b>2.826.991.553,00</b>

Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari sd. 31 Desember 2015 terdiri dari penggunaan Belanja Barang (MAK 52) senilai Rp.62.000.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532) senilai Rp.195.205.000,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan (MAK 533) senilai Rp.1.377.778.004,00, Belanja Modal Jaringan dan Penambahan Nilainya (MAK 534) senilai Rp.262.589.000,00 serta Belanja Modal Lainnya (MAK 536) senilai Rp.29.728.545,00.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat **ketidaksesuaian** antara belanja modal dengan penggunaannya yaitu :

**A. Pembelian/Pengembangan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak menggunakan MAK 534**

1. Perolehan pemasangan Jaringan berupa pemasangan instalasi pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Riau (433011), yang dibelanjakan dengan menggunakan MAK 521211 senilai Rp.62.000.000,00 dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal Jaringan (MAK 534131);
2. Penyelesaian Pembangunan Irigasi dengan KDP berupa pembuatan saluran air/gorong-gorong dibawah lahan yang rencananya akan dibangun Gedung Kantor Perwakilan BKKBN Prop. Kepulauan Riau (Kepri) pasca terselesaikannya

perselisihan masalah administrasi hibah tanah dari Otorita Batam kepada Perwakilan BKKBN Prop. Kepri (666798), yang dibelanjakan dengan menggunakan MAK 531115 senilai Rp.899.691.004,00 dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal Irigasi (MAK 534121). Pengerjaan saluran air/gorong-gorong merupakan satu paket Pengadaan Pengerjaan Pengerukan dan Pematangan Lahan pada Satker 666798;

3. Pembelian Aset Jaringan menggunakan Belanja Modal MAK 532111 senilai Rp.48.100.000,00, dimana satuan kerja tersebut dibawah ini seharusnya menggunakan Belanja Modal Jaringan (MAK 534131), yaitu antara lain:
  - a. Penggunaan Belanja MAK 532111 senilai Rp. 35.800.000,00 berupa Instalasi penangkal petir manual pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Nusa Tenggara Timur (433098);
  - b. Penggunaan Belanja MAK 532111 senilai Rp.12.300.000,00 berupa jaringan distribusi lainnya yang juga untuk instalasi penangkal petir pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop.. Bengkulu (433102).
4. Pengembangan Nilai Aset Jaringan menggunakan Belanja Modal MAK 532111 senilai Rp.147.105.000,00, dimana satuan kerja tersebut dibawah ini seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan (MAK 534161), yaitu antara lain:
  - a. Penggunaan Belanja MAK 532111 senilai Rp.55.917.000,00 berupa pembangunan Jaringan Tegangan Diatas 300 KVA yang menambah Nilai Aset Jaringan pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sumatera Barat (018398);
  - b. Penggunaan Belanja MAK 532111 senilai Rp 91.188.000,00 berupa perolehan instalasi gardu listrik kapasitas kecil yang menambah Nilai Aset Jaringan pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Gorontalo (631627).
5. Penyelesaian Pembangunan Langsung Jalan dan Jembatan berupa pembangunan paving blok di akses jalan masuk dan di halaman depan kantor Perwakilan BKKBN Prop. Papua Barat (666700) yang dibelanjakan dengan menggunakan Belanja Modal MAK 533111 senilai Rp.116.200.000,00, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal/Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan (MAK 534111/534141);
6. Pengembangan Nilai Aset Jaringan berupa Pengadaan Jaingan Distribusi Tegangan dibawah 1 KVA utk Gudang Alat Kontrasepsi Perwakilan BKKBN Prop. Jambi (433020) yang dibelanjakan dengan menggunakan Belanja Modal MAK 533111 senilai Rp.49.987.000,00, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal

Penambahan Nilai Jaringan (534161);

7. Pengembangan melalui KDP Jalan dan Jembatan berupa pembangunan paving blok di akses jalan masuk dan di halaman depan kantor Perwakilan BKKBN Prop. Papua (433082) yang dibelanjakan dengan menggunakan Belanja Modal MAK 533111 senilai Rp.279.000.000,00 dan Belanja Modal MAK senilai Rp.32.900.000,00, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal/Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan (MAK 534111/534141);
8. Pembelian/Perolehan Jaringan berupa pemasangan jaringan listrik di Perwakilan BKKBN Prop. Bangka dan Belitung (631606) yang dibelanjakan dengan menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.29.728.545,00, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal Jaringan (MAK 534131).

**B. Belanja Modal MAK 534131 tidak menambah transaksi "Pembelian Jaringan"**

Penambahan Nilai Aset Jaringan di Perwakilan BKKBN Prop. Papua (433082) dibelanjakan dengan menggunakan Belanja Modal MAK 534131 senilai Rp.49.995.000,00, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan (MAK 534161).

*Aset Tetap Lainnya  
Rp.2.865.600.871,00*

**C.12 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp.2.865.600.871,00 dan 2.854.024.301,00 sehingga terjadi kenaikan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.11.576.570,00 atau 0,41 persen.

Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

- |                        |   |     |                  |
|------------------------|---|-----|------------------|
| 1. Aset Tetap Renovasi | : | Rp. | 91.120.000,00    |
| 2. Aset Tetap Lainnya  | : | Rp. | 2.774.480.871,00 |

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 sesuai dengan pengelompokkan jenis transaksinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp</b>	<b>2.854.024.301,00</b>
<b>Mutasi tambah :</b>		-
101 - Pembelian	Rp	208.162.270,00
<b>Mutasi Kurang :</b>		
188 - Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		(8.587.000,00)
301 - Penghapusan		(23.030.000,00)
304 - Reklasifikasi Keluar		(161.464.700,00)
401 - Penghentian Aset dari Penggunaan		(3.504.000,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp</b>	<b>2.865.600.871,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014</b>		<b>(33.873.750,00)</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp</b>	<b>2.831.727.121,00</b>

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya dapat dirinci masing-masing transaksi per satker sebagai berikut :

NO.	KODE SATKER	SATKER	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR				TOTAL
			PEMBELIAN (101)	REKLAS DARI ASET TETAP KE ASET LAINNYA (188)	PENGHAPUSAN (301)	REKLASIFIKASI KELUAR (304)	PENGHENTIAN ASET DARI PENGGUNAAN (401)	
1	682054	ADPIN	22.216.700,00	-	-	-	-	22.216.700,00
2	018403	SUMSEL	-	-	(23.030.000,00)	-	-	(23.030.000,00)
3	433011	RIAU	-	(550.000,00)	-	-	-	(550.000,00)
4	018410	LAMPUNG	-	(8.023.000,00)	-	-	-	(8.023.000,00)
5	017972	DIY	-	-	-	-	(3.504.000,00)	(3.504.000,00)
6	018377	ACEH	18.035.000,00	-	-	-	-	18.035.000,00
7	018424	KALBAR	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00
8	433036	KALTENG	161.464.700,00	(14.000,00)	-	(161.464.700,00)	-	(14.000,00)
9	018466	BALI	4.945.870,00	-	-	-	-	4.945.870,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>208.162.270,00</b>	<b>(8.587.000,00)</b>	<b>(23.030.000,00)</b>	<b>(161.464.700,00)</b>	<b>(3.504.000,00)</b>	<b>11.576.570,00</b>

Berdasarkan tabel diatas terlihat beberapa satker yang memiliki jenis transaksi Pembelian Aset Tetap Lainnya dan berikut dijelaskan penggunaan belanja modalnya terkait pembelian Aset Tetap Lainnya, yaitu :

1. Satuan Kerja Kedeputan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (682054)  
Satker ini menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.22.216.700,00 dalam

rangka pembelian Aset Tetap Lainnya berupa Bahan-bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya;

2. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Aceh (018377)

Satker ini menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.18.035.000,00 dalam rangka pembelian Aset Tetap Lainnya berupa 1 buah Monografi senilai Rp. 8.035.000,00 serta 4 buah Audio Visual @senilai Rp.4.000.000,00, Rp.3.200.000,00, Rp.2.500.000,00 dan Rp.300.000,00;

3. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Barat (018424)

Satker ini menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.1.500.000,00 dalam rangka pembelian Aset Tetap Lainnya berupa 1 buah Monografi senilai Rp.1.500.000,00;

4. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Tengah (433036)

Satker ini menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.161.464.700,- dalam rangka pembelian Aset Tetap Lainnya berupa :

- 8 buah Audio Visual Lainnya @Rp.3.865.000,00	= Rp.	30.920.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.93.931,200,00	= Rp.	93.931.200,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.120.000,00	= Rp.	120.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.310.500,00	= Rp.	310.500,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.380.000,00	= Rp.	380.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.150.000,00	= Rp.	150.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.2.300.000,00	= Rp.	2.300.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.230.000,00	= Rp.	230.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.328.000,00	= Rp.	328.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.250.000,00	= Rp.	250.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.1.325.000,00	= Rp.	1.325.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.400.000,00	= Rp.	400.000,00
- 5 buah Ukiran kayu dan sejenisnya @Rp.5.500,000,00	= Rp.	5.500.000,00
- 1 buah CD/VCD/DVD/LD senilai Rp.520.000,00	= Rp.	520.000,00
- 1 buah CD/VCD/DVD/LD senilai Rp.2.800.000,00	= Rp.	2.800.000,00

5. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Bali (018466)

Satker ini menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.4.945.870,00 dalam rangka pembelian Aset Tetap Lainnya berupa Buku Lainnya.

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan  
Rp. 4.855.304.933,00

### C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.4.855.304.933,00 dan Rp.5.178.827.082,00 sehingga terjadi penurunan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp.323.522.149,00 atau 6,25 persen.

Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2015 sesuai dengan pengelompokkan jenis transaksinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2014	5.178.827.082,00
<b>Mutasi Tambah :</b>	
502 - Perolehan/Penambahan KDP	3.421.743.745,00
503 - Pengembangan dengan KDP	8.198.026.100,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	
105 - Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	(9.034.305.994,00)
208 - Pengembangan Melalui KDP	(2.908.986.000,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>4.855.304.933,00</b>

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per satker selama periode TA 2015 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	KODE SATKER	URAIAN SATKER	SALDO AWAL KDP 1 JANUARI 2015	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG		SALDO AKHIR KDP 31 DESEMBER 2015
				PEROLEHAN/PENAMBAHAN KDP (502)	PENGEMBANGAN KDP (503)	PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP (105)	PENGEMBANGAN MELALUI KDP (208)	
1	017326	SESTAMA	-	1.817.278.845,00	-	-	-	1.817.278.845,00
2	017621	JATENG	4.548.757.082,00	-	1.336.350.000,00	(5.885.107.082,00)	-	-
3	433042	KALTIM	-	63.990.000,00	1.145.676.000,00	-	(1.209.666.000,00)	-
4	433082	PAPUA	-	80.350.000,00	1.282.100.000,00	-	(1.362.450.000,00)	-
5	631631	MALUT	-	69.000.000,00	1.368.847.000,00	(1.437.847.000,00)	-	-
6	631606	BABEL	-	39.655.000,00	944.209.000,00	-	-	983.864.000,00
7	631627	GORONTALO	-	450.745.600,00	292.176.400,00	-	(336.870.000,00)	406.052.000,00
8	666798	KEPRI	340.090.000,00	825.724.300,00	1.673.931.700,00	(1.191.635.912,00)	-	1.648.110.088,00
9	666803	SULBAR	289.980.000,00	75.000.000,00	154.736.000,00	(519.716.000,00)	-	-
		<b>TOTAL</b>	<b>5.178.827.082,00</b>	<b>3.421.743.745,00</b>	<b>8.198.026.100,00</b>	<b>(9.034.305.994,00)</b>	<b>(2.908.986.000,00)</b>	<b>4.855.304.933,00</b>

*Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp.382.894.649.801,00*

#### **C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing Rp.382.894.649.801,00 dan Rp.362.012.293.254,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2015.

#### **Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	366.818.286.540,00	(278.804.290.159,00)	88.013.996.381,00
2	Gedung dan Bangunan	290.848.130.308,00	(94.426.591.245,00)	196.421.539.063,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.571.657.281,00	(9.629.894.647,00)	14.941.762.634,00
4	Aset Tetap Lainnya	2.865.600.871,00	(33.873.750,00)	2.831.727.121,00
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>685.103.675.000,00</b>	<b>(382.894.649.801,00)</b>	<b>302.209.025.199,00</b>

*Piutang Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi  
Rp.204.007.998,00*

#### **C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp.204.007.998,00 dan Rp.244.078.956,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

**Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah Debitur (Orang)	Per 31 Desember 2014 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2015 (Rp)
				Tambah	Kurang	
017326	SESTAMA	1	10.681.818,00	26.318.182,00	37.000.000,00	-
018445	BKKBN SULUT	1	233.397.138,00	34.732.620,00	64.121.760,00	204.007.998,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>244.078.956,00</b>			<b>204.007.998,00</b>

Mutasi Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	Rp.	244.078.956,00
Mutasi Tambah :		-
- Reklasifikasi dari Bagian Lancar TGR Satker Sestama ke Tagihan TP/TGR (Piutang Jangka Panjang)	Rp.	26.318.182,00
- Reklasifikasi dari Bagian Lancar TGR BKKBN Sulawesi Utara ke Tagihan TP/TGR (Piutang Jangka Panjang)	Rp.	34.732.620,00
Mutasi Kurang :		
- Setoran 2014 yang lebih saji pada Neraca Audited 2014		(3.700.000,00)
- Setoran an. SLBN 2015		(13.500.000,00)
- Reklasifikasi Tagihan TP/TGR (Piutang Jangka Panjang) Satker Sestama menjadi Bagian Lancar TGR		(19.800.000,00)
- Setoran an. AM 2015		(32.060.880,00)
- Reklasifikasi Tagihan TP/TGR (Piutang Jangka Panjang) Satker BKKBN Sulawesi Utara menjadi Bagian Lancar TGR		(32.060.880,00)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp.	204.007.998,00

Mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan SKTJM Nomor 1481/II/KU.403/B3/2013 tanggal 22 Oktober 2013 satker SESTAMA terjadi kehilangan 1 unit kendaraan dinas roda empat berupa Toyota Kijang KF80 Long STD Tahun 2004 dengan nilai penetapan ganti rugi sebesar Rp.76.000.000,00 yang menjadi tanggung jawab sdr. SLBN dengan tempo penyelesaian Juli 2014.

Sampai dengan 31 Desember 2013 TGR tersebut telah disetor, yaitu :

- sebesar Rp.10.000.000,00 tgl. 23-10-2013 NTPN No. 1311021315011511
- sebesar Rp.16.000.000,00 tgl. 21-11-2013 NTPN No.1305071107140303
- Sehingga sisa bagian lancar Tagihan TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2013



sebesar Rp. 50.000.000,00 (Rp.76.000.000,00 – Rp. 26.000.000,00).

Selama periode 1 Januari s/d berakhir jatuh tempo SKTJM ke-1 pada Juli 2014 Sdr. SLBN telah dilakukan penyetoran yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 tgl 27 Januari 2014 NTPN No. 1409101113021506, sehingga sisa TGR saat berakhir jatuh tempo SKTJM ke-1 sebesar Rp.47.000.000,00.

Kemudian pada **Agustus 2014** telah dilakukan **perpanjangan SKTJM** tersebut **No.1046//KU.403/B3/2015** yang berisi bahwa beliau akan melunasi dengan cara mengangsur selama 22 bulan (sampai berakhir batas usia pensiunnya) @sebesar Rp.2.136.364,00 terhitung mulai bulan Agustus 2014 sd. Mei 2016. ([dokumen terlampir](#))

Setelah melakukan perpanjangan SKTJM beliau telah melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sbb :

- Sebesar Rp.10.000.000,00 Tgl 21-08-2014 NTPN No. 0203150908050906
- Sebesar Rp.3.700.000,00 Tgl 20-11-2014 NTPN No. 1307040613060510

Sehingga sisa bagian lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2014 seharusnya sebesar Rp. 33.300.000,00 (Rp. 50.000.000,00 – Rp. 16.700.000,00).

Namun pada Laporan Keuangan Audited 2014 setoran sebesar Rp.3.700.000,00 kurang dicatat dalam perhitungan Bagian Lancar TGR BKKBN sehingga Neraca Audited BKKBN TA 2014 pada pos Bagian Lancar TGR BKKBN lebih saji sebesar Rp.3.700.000,00. Lebih saji tersebut telah dilakukan koreksi serta penyesuaian pada Neraca BKKBN TA 2015.

Selama Tahun Anggaran 2015 TGR an. Sdr. SLBN sudah disetor ke Kas Negara melalui potongan gaji setiap bulan pada Bendahara Gaji rincian sbb :

- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 17-04-2015 NTPN. B964D7P605CCAB0P
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 18-05-2015 NTPN. 0E5B81JS59M2CFB9
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 18-06-2015 NTPN. 6F84C00IONSQ9ET9
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 14-07-2015 NTPN. F27D26NA1TQK3QD9
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 20-08-2015 NTPN. 8C3033GEOMCC5K19
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 16-09-2015 NTPN. BF099076MGM2B329
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 19-10-2015 NTPN. A78652L4E0NQMOK9
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 18-11-2015 NTPN. 65AE83073TTHI0UP
- Sebesar Rp.1.500.000,00 Tgl. 17-12-2015 NTPN. 4AD383R6ALFOVGGP

([dokumen kartu piutang terlampir](#))

Pada tanggal 31 Desember 2015 telah dilakukan jurnal reklasifikasi dari bagian lancar

Tagihan TP/TGR ke Piutang Tagihan TP/TGR an. Sdr. SLBN sebesar Rp.26.318.182,00 sehingga total Piutang Tagihan TP/TGR an. Sdr. SLBN per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp.19.800.000,00.

Sesuai dengan SKTJM No.1046/I/KU.403/B3/2015 yang menyebutkan bahwa SKTJM akan jatuh tempo pada bulan Mei 2016, maka pada periode tutup buku per 31 Desember 2015 seluruh Piutang Tagihan TP/TGR an. SLBN direklasifikasi menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR sebesar Rp.19.800.000,00.

- 2) Piutang TGR pada Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara merupakan piutang atas penggelapan pajak (fiktif) dengan nilai penetapan TGR sebesar Rp. 352.898.638,00 berdasarkan SKTJM an. AM No. 294/KU.403/J/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan jatuh tempo piutang per November 2014. Sampai dengan 31 Desember 2014 atas piutang tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp.84.768.880,00 melalui pemotongan gaji setiap bulan dan pemotongan remunerasi sehingga sisa piutang TGR sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp.268.129.758,00 (Rp.301.719.978,00 – Rp 33.590.220,00).

Sehubungan dengan jatuh temponya SKTJM an. AM pada bulan November 2014, maka telah dilakukan pembaharuan SKTJM tersebut dengan No.109/KU.403/J/2014 tanggal 27 November 2014. ([dokumen terlampir](#))

Selama Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara melalui pemotongan gaji dan pemotongan remunerasi setiap bulan sebesar Rp.32.060.880,00 sehingga saldo TGR an. AM menjadi sebesar Rp.236.068.878,00. ([dokumen kartu piutang terlampir](#))

Tanggal 31 Desember 2015 telah dilakukan jurnal reklasifikasi dari bagian lancar Tagihan TP/TGR ke Piutang Tagihan TP/TGR an. Sdr. AM sebesar Rp.34.732.620,00 sehingga total Piutang Tagihan TP/TGR an. Sdr. AM per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp. Rp.236.068.878,00.

Berdasarkan perkiraan setoran lancar setiap bulan selama Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar (Rp.1.529.340,00 + Rp.1.142.400,00) x 12 bulan = Rp.32.060.880,00 menjadi dasar perhitungan Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2015 dan telah dilakukan reklasifikasi neraca dari Piutang Tagihan TP/TGR ke Bagian Lancar Tagihan TP/TGR senilai Rp.32.060.880,00. Sedangkan sisanya Rp.204.007.998,00 menjadi Piutang (Jangka Panjang) Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2015

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih -  
Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi  
(Rp.1.020.040,00)

#### C.16 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar (Rp.1.020.040,00) dan (Rp.2.235.186,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Ringkasan perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) disajikan pada Tabel berikut ini :

No.	KUALITAS	Jumlah Debitur (Orang)	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	2	204.007.998,00	0,50%	1.020.040,00
2	Kurang Lancar	0	-	10,00%	-
3	Diragukan	-	-	50,00%	-
4	Macet	-	-	100,00%	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>204.007.998,00</b>		<b>1.020.040,00</b>

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp.  
8.499.808.374,-

#### C.17 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo piutang jangka panjang lainnya Per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.8.499.808.374,00 dan Rp.8.499.808.374,00 merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

##### Penjelasan :

- Sejak Tahun 2006 s/d Tahun 2009, BKKBN telah mendapatkan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp.59.859.000.000,00 dengan rincian sbb : Tahun 2006 sebesar Rp. 10.000.000.000,00, Tahun 2007 sebesar Rp.10.000.000.000,00 Tahun 2008 sebesar Rp. 23.970.000.000,00 dan Tahun 2009 sebesar Rp. 15.925.000.000,00. Pada periode Tahun Anggaran 2006 dan 2007 merupakan belanja bantuan sosial, berdasarkan peraturan Kepala BKKBN nomor 332/HK.010/F3/2008 tanggal 22 Juli 2008 dana bantuan modal diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok UPPKS.

- Realisasi jumlah pengiriman dana bantuan modal usaha ke kelompok UPPKS yang berasal dari APBN Pusat dan APBN Provinsi berdasarkan SPM/SP2D pada periode 22 Juli 2008 s/d 31 Agustus 2009 adalah sebesar Rp. 19.670.000.000,00.
- Perkembangan pengembalian sisa dana kelompok UPPKS yang sudah disetor ke kas Negara s/d tanggal 24 desember 2010 adalah Rp. 13.589.568.032,00 dari dana sebesar Rp. 19.670.000.000,00, sehingga dana UPPKS yang masih belum dikembalikan sebesar Rp.6.080.431.968,00 (out standing) berada di provinsi dan SKPD kab/kota.

Berdasarkan hasil pemetaan I dan II terhadap UPPKS pada Perwakilan BKKBN Provinsi periode 22 Juli 2008 sd. 31 Agustus 2009, maka perkembangan dari piutang bukan pajak sebesar Rp. 6.080.431.968,00 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Bansos menurut BPK yang menjadi Piutang Negara .....	Rp.	9.262.102.474,00
2. Provinsi yang dana Bansos tidak cair pada mapping II yaitu :		
• Provinsi NTT .....	Rp.	32.500.000,00
3. Provinsi setor dana ke Kas Negara		
• Lampung Rp. ....		4.715.526,00
• Sumatera Barat.....	Rp.	60.000.000,00
• NTT.....	Rp.	86.204.000,00
• Riau .....	Rp.	25.750.000,00
• Banten .....	Rp.	318.500,00
• Jawa Tengah .....	Rp.	245.596.100,00
• Sumatera Utara .....	Rp.	231.145.000,00
• Sumatera Selatan .....	Rp.	14.100.000,00
• NTB .....	Rp.	47.758.000,00
• Papua .....	Rp.	14.206.974,00
Jumlah setor dana ke Kas Negara .....	Rp.	<u>729.794.100,00</u>
	: Rp.	<u>762.294.100,-</u>
<b>SISA PIUTANG NEGARA .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.499.808.374,00</b>

Dari jumlah dana sebesar Rp. 8.499.808.374,00 berpotensi menjadi piutang tak tertagih.

Dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana telah menindak lanjuti dengan surat ke Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuan Nomor 474/KU.301/B3/2014 tgl. 4 Maret 2014 perihal Permohonan Penghapusan Piutang Tak Tertagih serta sudah mendapat surat jawaban dari Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PKN) dengan nomor surat S-294/KN.4/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Permohonan penghapusan Piutang BKKBN dan Surat Nomor S-464/KN/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghapusan Piutang Dana Bergulir yang Berasal dari Anggaran Dana Bantuan Sosial. Surat jawaban dari Direktur PKN berisi bahwa "Penghapusan Piutang Negara dapat dilaksanakan setelah dilakukan pengurusan piutang negara oleh DJKN/PUPN dan dinyatakan belum dapat ditagih, yaitu dengan diterbitkannya Surat Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN". Surat tersebut juga menyatakan bahwa "Adapun syarat agar piutang dimaksud dapat diurus oleh PUPN/DJKN yaitu :

- a. Ada dan besarnya telah pasti menurut hukum disertai dengan dokumen pendukung;
- b. Penyerah piutang telah melakukan upaya penagihan secara maksimal; dan
- c. Piutang dimaksud telah dicatat dalam laporan keuangan dan digolongkan sebagai piutang macet sesuai dengan PMK No.69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara." ([dokumen terlampir](#))

Pada dasarnya BKKBN memahami ketentuan dan prosedur diatas, namun terdapat kendala dalam hal memenuhi ketentuan point a dimana pengurusan piutang oleh PUPN harus menyertakan dokumen pendukung khususnya perjanjian piutang dengan UPPKS dan perjanjian awal BKKBN atas Piutang Dana Bergulir yang berasal dari Anggaran Dana Bantuan Sosial. Sehingga sampai dengan saat ini internal BKKBN masih berkoordinasi dan akan berkonsultasi kembali ke Direktorat PKN Kementerian Keuangan.

*Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang jangka  
panjang lainnya  
Rp.8.499.808.374,00*

#### **C.18 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya**

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Piutang jangka panjang lainnya Per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.8.499.808.374,00 dan Rp.8.499.808.374,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– piutang jangka panjang lainnya :

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Macet	1	8.499.808.374,00	-100,00%	(8.499.808.374,00)
<b>Total</b>			<b>8.499.808.374,00</b>		<b>(8.499.808.374,00)</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp.37.939.703.660,00

### C.19 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp.37.939.703.660,00 dan Rp26.941.175.520,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Aset Tetap Tak Berwujud BKKBN mengalami kenaikan sebesar Rp.10.998.528.140,00 yang perolehannya dibelanjakan dari pengadaan MAK 536 (Belanja Modal Lainnya).

Penambahan ATB per satker per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Satker	Uraian	Nilai
	<b>162151 : SOFTWARE</b>	<b>10.308.211.260,00</b>
017326	SESTAMA	511.500.000,00
682054	ADPIN	9.667.361.260,00
018466	BALI	3.850.000,00
666798	KEPRI	125.500.000,00
	<b>162161 : LISENSI</b>	<b>690.316.880,00</b>
682054	ADPIN	690.316.880,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.998.528.140,00</b>

**Mutasi Aset Tetap Tak Berwujud Periode Tahun Anggaran 2015**

AKUN	NAMA AKUN	Per 31-12-2014	MUTASI		Per 31-12-2015
			Tambah	Kurang	
162151	SOFTWARE	9.867.339.435,00	10.308.211.260,00	-	20.175.550.695,00
162161	LISENSI	17.073.836.085,00	690.316.880,00	-	17.764.152.965,00
	<b>TOTAL</b>	<b>26.941.175.520,00</b>	<b>10.998.528.140,00</b>	<b>-</b>	<b>37.939.703.660,00</b>

Berikut rincian penggunaan/realisasi Belanja Modal dalam rangka penambahan nilai Aset Tak Berwujud periode 1 Januari sd. 31 Desember 2015 :

No.	Uraian Peruntukan	MATA ANGGARAN YANG DIGUNAKAN			JUMLAH PERUNTUKAN
		532111	536111	536121	
	<b>ASET TAK BERWUJUD</b>				
1	Pembelian Software	3.850.000,00	10.304.361.260,00	-	10.308.211.260,00
2	Pembelian Lisensi	-	655.864.880,00	-	655.864.880,00
	<b>UNTUK PEROLEHAN ASET LAIN :</b>				
1	Pembelian Peralatan dan Mesin	-	22.553.059.885,00	-	22.553.059.885,00
2	Pembelian Jaringan	-	29.728.545,00	-	29.728.545,00
3	Pembelian Aset Tetap Lainnya	-	208.162.270,00	-	208.162.270,00
4	Pengembangan Nilai Aset (Peralatan dan Mesin)	-	34.457.500,00	-	34.457.500,00
5	Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00
6	Perolehan/Penambahan KDP	-	-	75.000.000,00	75.000.000,00
7	Pengembangan KDP	-	-	87.000.000,00	87.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>33.785.634.340,00</b>	<b>178.000.000,00</b>	<b>33.967.484.340,00</b>

Perolehan Aset Tak Berwujud periode 1 Januari sd. 31 Desember 2015 terdiri dari penggunaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532) senilai Rp.3.850.000,00, Belanja Modal Lainnya (MAK 536111) senilai Rp.33.763.417.640,00 dan Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya (MAK 536121) senilai Rp.178.000.000,00.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat **ketidaksesuaian** antara belanja modal dengan penggunaannya yaitu :

**A. Pembelian/Pengembangan Nilai Aset Tak Berwujud tidak menggunakan MAK 536**

Pembelian Software pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Bali (018466), yang dibelanjakan dengan menggunakan MAK 532111 senilai Rp.3.850.000,00 dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal Lainnya (MAK 536111);

**B. Belanja Modal MAK 536111 tidak menambah transaksi “Pembelian Aset Tak Berwujud”**

1. Pembelian Aset Peralatan dan Mesin dengan menggunakan MAK 536111 senilai Rp.22.553.059.885,00 dimana satuan kerja tersebut dibawah ini seharusnya menggunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111), yaitu antara lain:

a. Penggunaan Belanja MAK 536111 senilai Rp.16.915.525.000,00 pada satuan kerja Sekretariat Utama (017326) untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa :

- 1 unit Server	= Rp. 649.000.000,00
- 41 unit Peralatan Komputer Lainnya @Rp.4.950.000,00	= Rp. 202.950.000,00
- 26 unit Peralatan Komputer Lainnya @Rp.8.800.000,00	= Rp. 228.800.000,00
- 20 unit Peralatan Komputer Lainnya @Rp.3.850.000,00	= Rp. 77.000.000,00
- 28 unit Peralatan Komputer Lainnya @Rp.6.050.000,00	= Rp. 169.400.000,00
- 4 unit Peralatan Komputer Lainnya @Rp.20.350.000,00	= Rp. 81.400.000,00
- 1 unit Peralatan Komputer Lainnya @Rp.37.950.000,00	= Rp. 37.950.000,00
- 9 unit Hard Disk @Rp.5.775.000,00	= Rp. 51.975.000,00
- 10 unit Hard Disk @Rp.9.900.000,00	= Rp. 99.000.000,00
- 1 unit Digital Recording System	= Rp. 22.880.000,00
- 1 unit Digital Recording System	= Rp. 11.330.000,00
- 4 unit CCTV @Rp.1.496.550,00	= Rp. 5.986.200,00
- 12 unit CCTV @Rp.4.194.300,00	= Rp. 50.331.600,00
- 4 unit CCTV @Rp.17.388.800,00	= Rp. 69.555.200,00
- 1 unit Switch	= Rp. 74.415.000,00
- 1 unit Switch	= Rp. 61.182.000,00
- 1 unit Switch	= Rp. 6.150.000,00
- 17 unit Switch @Rp.56.650.000,00	= Rp. 963.050.000,00
- 1 unit Router	= Rp. 316.800.000,00
- 28 unit Router @Rp.106.700.000,00	= Rp.2.987.600.000,00
- 1 buah Email Security	= Rp.1.813.900.000,00
- 1 buah Email Security	= Rp. 6.360.000,00
- 10 unit wireless access point @Rp.15.400.000,00	= Rp. 154.000.000,00
- 33 unit wireless access point @Rp.20.900.000,00	= Rp. 689.700.000,00
- 1 buah Firewall	= Rp. 550.000.000,00



- 33 unit Video Conference @Rp.220.990.000,00 = Rp.7.292.670.000,00
  - 3 unit TV @Rp.11.440.000,00 = Rp. 34.320.000,00
  - 1 buah Wanscaller = Rp. 220.330.000,00
- b. Penggunaan Belanja MAK 536111 senilai Rp.5.637.534.885,00 pada satuan kerja Kedepujian Bidang Advokasi dan Penggerakkan Informasi (682054) untuk Pembelian Peralatan dan Mesin berupa :
- 1 unit Laptop = Rp. 14.000.000,00
  - 6 unit Laptop @Rp.18.800.000,00 = Rp. 112.800.000,00
  - 4 unit Laptop @Rp.18.000.000,00 = Rp. 72.000.000,00
  - 1 unit server = Rp. 350.280.150,00
  - 1 unit server = Rp. 145.390.740,00
  - 1 unit server = Rp. 231.382.150,00
  - 1 unit server = Rp. 166.164.900,00
  - 1 unit server = Rp. 125.226.750,00
  - 1 unit server = Rp. 154.316.250,00
  - 1 unit server = Rp. 471.000.000,00
  - 1 unit server Server Dell PowerEdge R930 = Rp. 382.662.500,00
  - 1 unit server Server Dell PowerEdge R730 = Rp. 117.309.500,00
  - 3 unit storage modul disk (peralatan mainframe) @Rp.585.621.300,00 = Rp.1.756.863.900,00
  - 1 unit storage modul disk (peralatan mainframe) = Rp. 613.362.750,00
  - 45 buah CAT 6 CABLE @Rp.986.205,00 = Rp. 44.379.225,00
  - 16 buah Network Cable Tester @Rp.801.735,00 = Rp. 12.827.760,00
  - 1 buah Network Cable Tester = Rp. 12.566.664,00
  - 1 buah KVM Keyboard Video Monitor = Rp. 17.808.450,00
  - 1 buah Switch = Rp. 14.133.240,00
  - 1 buah Lemari Kayu = Rp. 35.132.716,00
  - 3 unit Server @Rp.148.500.000,00 = Rp. 445.500.000,00
  - 5 unit PC @Rp.7.470.000,00 = Rp. 37.350.000,00
  - 3 unit Laptop @Rp.7.850.000,00 = Rp. 23.550.000,00
  - 1 unit Eksternal/Portable Hardisk = Rp. 4.200.000,00
  - 2 unit Mesin Digital Signage @Rp.39.751.250,00 = Rp. 79.502.500,00
  - 2 unit printer @Rp.8.367.250,00 = Rp. 16.734.500,00
  - 1 unit printer = Rp. 8.790.250,00
  - 4 PC unit @Rp.18.600.000,00 = Rp. 74.400.000,00
  - 6 PC unit @Rp.13.400.000,00 = Rp. 80.400.000,00
  - 1 unit Layar Film/Projector = Rp. 2.200.000,00
  - 1 unit LCD Projector/Infocus = Rp. 15.300.000,00

2. Pembelian/Pekerjaan instalasi Jaringan berupa pemasangan jaringan listrik di Perwakilan BKKBN Prop. Bangka dan Belitung (631606) yang dibelanjakan dengan menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.29.728.545,00, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal Jaringan (MAK 534131);
3. Pembelian Aset Tetap Lainnya yang dibelanjakan dengan menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.208.162.270,00 pada beberapa satuan kerja berikut ini :
  - a. Satuan Kerja Kedeputian Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (682054)  
Satker ini menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.22.216.700,00 dalam rangka pembelian Aset Tetap Lainnya berupa Bahan-bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya;
  - b. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Aceh (018377)  
Satker ini menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.18.035.000,00 dalam rangka pembelian Aset Tetap Lainnya berupa 1 buah Monografi senilai Rp.8.035.000,00 serta 4 buah Audio Visual @senilai Rp.4.000.000,00, Rp.3.200.000,00, Rp.2.500.000,00 dan Rp.300.000,00;
  - c. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Barat (018424)  
Satker ini menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.1.500.000,00 dalam rangka pembelian Aset Tetap Lainnya berupa 1 buah Monografi senilai Rp.1.500.000,00;
  - d. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Tengah (433036)  
Satker ini menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.161.464.700,00 dalam rangka pembelian Aset Tetap Lainnya berupa :
 

- 8 buah Audio Visual Lainnya @Rp.3.865.000,00	= Rp.	30.920.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.93.931.200,00	= Rp.	93.931.200,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.120.000,00	= Rp.	120.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.310.500,00	= Rp.	310.500,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.380.000,00	= Rp.	380.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.150.000,00	= Rp.	150.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.2.300.000,00	= Rp.	2.300.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.230.000,00	= Rp.	230.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.328.000,00	= Rp.	328.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.250.000,00	= Rp.	250.000,00
- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.1.325.000,00	= Rp.	1.325.000,00

- 1 buah Audio Visual Lainnya senilai Rp.400.000,00 = Rp. 400.000,00
- 5 buah Ukiran kayu dan sejenisnya @Rp.5.500,000,00 = Rp. 5.500.000,00
- 1 buah CD/VCD/DVD/LD senilai Rp.520.000,00 = Rp. 520.000,00
- 1 buah CD/VCD/DVD/LD senilai Rp.2.800.000,00 = Rp. 2.800.000,00

e. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Propinsi Bali (018466)

Satker ini menggunakan Belanja Modal MAK 536111 senilai Rp.4.945.870,00 dalam rangka pembelian Aset Tetap Lainnya berupa Buku Lainnya.

4. Pengembangan nilai Aset Peralatan dan Mesin dengan menggunakan MAK 536111 senilai Rp.34.457.500,00, pada satuan kerja Sekretariat Utama (017326) dimana satuan kerja tersebut dibawah ini seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (MAK 532121), dengan rincian penambahan nilai aset sebagai berikut:

- 1 unit Switch = Rp. 6.150.000,00
- 1 buah E-Mail Security = Rp. 6.360.000,00
- 1 buah Wanscaller = Rp. 13.020.000,00
- 1 unit video conference = Rp. 7.200.000,00
- 1 unit video conference = Rp. 1.727.500,00

**C. Belanja Modal MAK 536121 tidak menambah transaksi “Penambahan Nilai Aset Tak Berwujud”**

1. Pengadaan Aset yang menambah transaksi Pengembangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan dengan menggunakan MAK 536121 (Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya) senilai Rp.16.000.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sulawesi Barat (666803) yang seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121);
2. aan (KDP) pada Gedung dan Bangunan dengan menggunakan MAK 536121 (Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya) senilai Rp.75.000.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sulawesi Barat (666803) yang seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121);
3. Pengembangan KDP pada Gedung dan Bangunan dengan menggunakan MAK 536121 (Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya) senilai Rp.87.000.000,00 pada satuan kerja Perwakilan BKKBN Prop. Sulawesi Barat (666803) yang seharusnya menggunakan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121).

Aset Lain-lain

Rp.12.140.035.243,00

## C.20 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per tanggal Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.12.140.035.243,00 dan Rp11.010.664.965,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sedangkan nilai buku Aset Lain-lain pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp.1.616.281.028,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp.10.523.754.215,00.

Mutasi nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 sesuai dengan pengelompokan jenis transaksinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp</b>	<b>11.010.664.965,00</b>
<b>Mutasi tambah :</b>		
188 - Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	Rp	4.655.687.677,00
<b>Mutasi kurang:</b>		
177 - Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya		(61.705.500,00)
391 - Penghapusan (BMN yang dihentikan)		(2.427.965.676,00)
394 - Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)		(1.731.000,00)
396 - Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan)		(1.615.103.872,00)
401 - Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	580.188.649,00
<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp</b>	<b>12.140.035.243,00</b>
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2015		(10.523.754.215,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2015</b>	<b>Rp</b>	<b>1.616.281.028,00</b>

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya dapat dirinci masing-masing transaksi per satker sebagai berikut :

NO	URAIAN	MUTASI MASUK						MUTASI KELUAR					
		REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP KE ASET LAINNYA (188)	REKLASIFIKASI DARI ASET LAINNYA KE ASET TETAP (177)	PENGHAPUSAN (BMN YANG DIHENTIKAN) (391)	REKLASIFIKASI KELUAR (BMN YANG DIHENTIKAN) (394)	USULAN BARANG RUSAK BERAT KE PENGELOLA (BMN DIHENTIKAN) (396)	PENGHENTIAN ASET DARI PENGGUNAAN (401)						
1	SESTAMA	86.522.250,00	-	-	-	(233.388.250,00)	-						
2	KBKR	242.251.200,00	-	-	-	(65.625.000,00)	-						
3	LATBANG	442.600.900,00	-	-	-	-	-						
4	DITVOKKOM	464.609.200,00	-	-	-	-	-						
5	KEPENDUDUKAN	7.150.000,00	-	-	-	-	-						
6	JABAR	65.834.000,00	-	-	-	(88.978.000,00)	-						
7	JATENG	119.010.000,00	-	-	-	-	-						
8	DIY	-	-	-	-	-	573.938.649,00						
9	JATIM	193.500.000,00	-	-	-	-	-						
10	SUMUT	395.272.500,00	(29.642.500,00)	-	(1.731.000,00)	-	-						
11	SUMBAR	56.650.000,00	-	-	-	-	-						
12	RIAU	432.106.200,00	-	(5.496.000,00)	-	(431.063.200,00)	-						
13	JAMBI	-	-	-	-	-	6.250.000,00						
14	SUMSEL	-	-	(670.042.436,00)	-	-	-						
15	LAMPUNG	573.976.422,00	(2.343.000,00)	-	-	(574.049.422,00)	-						
16	KALBAR	126.554.960,00	-	-	-	-	-						
17	KALTENG	593.315.600,00	-	(11.250.000,00)	-	(126.000.000,00)	-						
18	KALSEL	41.722.000,00	-	-	-	-	-						
19	KALTIM	44.077.900,00	-	-	-	-	-						
20	SULTENG	-	-	(313.686.500,00)	-	-	-						
21	SULSEL	33.490.000,00	(29.720.000,00)	-	-	-	-						
22	BALI	253.500.000,00	-	-	-	-	-						
23	NTB	-	-	-	-	(96.000.000,00)	-						
24	NTT	68.668.000,00	-	(657.333.490,00)	-	-	-						
25	PAPUA	-	-	(25.500.000,00)	-	-	-						
26	BABEL	-	-	(320.662.600,00)	-	-	-						
27	GORONTALO	-	-	(414.994.650,00)	-	-	-						
28	PAPUA BARAT	414.876.545,00	-	(9.000.000,00)	-	-	-						
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.655.687.677,00</b>	<b>(61.705.500,00)</b>	<b>(2.427.965.676,00)</b>	<b>(1.731.000,00)</b>	<b>(1.615.103.872,00)</b>	<b>580.188.649,00</b>						

*Akumulasi*

*Penyusutan/*

*Amortisasi Aset*

*lainnya*

*Rp.10.523.754.215,00*

### **C.21 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset lainnya**

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset lainnya per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.10.523.754.215,00 dan Rp.9.338.312.274,00.

*Utang Kepada Pihak*

*Ketiga*

*Rp.5.405.878.401,00*

### **C.22 Utang Kepada Pihak Ketiga**

Utang Kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.5.405.878.401,00 dan Rp.3.945.079.543,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya.

Utang kepada pihak ketiga BKKBN mengalami kenaikan sebesar Rp.1.460.798.858,00 atau 37,03 persen dari TA 2014 yang disebabkan karena :

1. Pencatatan akrual atas tunjangan kinerja dan uang makan pegawai yang menjadi hak pegawai pada bulan Desember 2015 namun baru dibayarkan di bulan Januari 2016;
2. Pencatatan akrual atas beban langganan daya jasa yang menjadi kewajiban pada bulan Desember 2015 namun sampai dengan periode pelaporan per 31 Desember 2015 belum dibayarkan;
3. Pencatatan akrual atas belanja barang yang masih harus dibayar kepada Universitas Terbuka sebesar Rp.626.400.000,00 (tagihan Semester I TA 2015 baru disampaikan pada 11 Februari 2016), yang langsung berpengaruh pada Akun Beban Barang Non-Operasional Lainnya (Beban Barang dan Jasa) senilai Rp.626.400.000,00 pada Satuan Kerja Kedeputusan Bidang Pelatihan dan Pengembangan sesuai dengan rekomendasi hasil audit BPK RI terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan BKKBN TA 2015;
4. Adanya kesalahan penyetoran sisa dana Hibah Langsung dalam Negeri pada Perwakilan BKKBN Prop. Banten (631610) yang disetor ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2015, padahal sesuai dengan isi Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 978/39-Huk/2015 dan 2058/RC.002/J.1/2015 tertanggal 09 Juni 2015 pada point (7) Pasal 6 : Hak dan Kewajiban Pihak Kedua disebutkan bahwa "Pihak Kedua berkewajiban menyetorkan kembali sisa dana hibah daerah yang tidak dapat direalisasikan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Banten pada Bank BJB dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan." Menurut informasi Satker 631610 sampai saat ini pengesahan perbaikan atas kesalahan penyetoran tersebut belum selesai diproses dan akibat kesalahan tersebut maka sesuai dengan rekomendasi hasil audit

BPK RI terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan BKKBN TA 2015 perlu dilakukan pencatatan pengakuan utang kepada Pemerintah Propinsi Banten atas sisa dana hibah sebesar Rp.197.983.100,00. Jurnal koreksi ini sekaligus berpengaruh pada penurunan Pendapatan Anggaran Lain-lain di Laporan Operasional BKKBN.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Satker	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Belanja barang yang masih harus dibayar	Utang Kepdaa Pihak Ketiga Lainnya	Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per Satker
		(212111)	(212112)	(212191)	
1	Sekretariat Utama	(2.616.285.273,00)	(391.989.723,00)		(3.008.274.996,00)
2	Kedepuitan Bidang Latbang	-	(626.400.000,00)		(626.400.000,00)
3	Perwakilan BKKBN Prov. Jawa Tengah	(2.467.837,00)	(71.416.306,00)		(73.884.143,00)
4	Perwakilan BKKBN Prov. DIY	(326.789.800,00)	-		(326.789.800,00)
5	Perwakilan BKKBN Prov. Jawa Timur	(6.931.452,00)	-		(6.931.452,00)
8	Perwakilan BKKBN Prov. Aceh	(768.786,00)	-		(768.786,00)
9	Perwakilan BKKBN Prov. Jambi	(261.005.080,00)	(15.594.800,00)		(276.599.880,00)
10	Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera Selatan	-	(39.672.254,00)		(39.672.254,00)
11	Perwakilan BKKBN Prov. Lampung	-	(18.115.863,00)		(18.115.863,00)
13	Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Barat	(50.645.337,00)	(36.277.967,00)		(86.923.304,00)
14	Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Timur	(210.127.598,00)	(873.890,00)		(211.001.488,00)
15	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Selatan	-	(54.385.983,00)		(54.385.983,00)
16	Perwakilan BKKBN Prov. NTB	(256.870,00)	(3.371.300,00)		(3.628.170,00)
17	Perwakilan BKKBN Prov. NTT	(123.951.935,00)	-		(123.951.935,00)
18	Perwakilan BKKBN Prov. Bengkulu	-	(3.549.600,00)		(3.549.600,00)
19	Perwakilan BKKBN Prov. Banten	(176.849.950,00)	(14.451.472,00)	(197.983.100,00)	(389.284.522,00)
20	Perwakilan BKKBN Prov. Kepulauan Riau	(131.281.910,00)	(16.510.281,00)		(147.792.191,00)
21	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Barat	(1.185.424,00)	(6.738.610,00)		(7.924.034,00)
	<b>Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per Akun</b>	<b>(3.908.547.252,00)</b>	<b>(1.299.348.049,00)</b>	<b>(197.983.100,00)</b>	<b>(5.405.878.401,00)</b>

Pendapatan Diterima Dimuka  
Rp.421.393.050,00

### C.23 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.421.393.050,00 dan Rp.221.057.333,00. Pendapatan Diterima Dimuka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Per 31 Desember 2015 merupakan :

1. Sewa Kantor dan ATM Bank BNI pada BKKBN Pusat yang dikelola melalui Biro Umum Satker Sekretariat Utama memiliki periode/masa sewa selama 36 bulan yang dihitung mulai tanggal 05 Mei 2013 sd. 04 Mei 2016 senilai Rp.409.269.000,00 yang dibayarkan dimuka, sehingga Pendapatan Diterima Dimuka BNI per 31 Desember 2015 sebesar Rp.45.474.333,00 dan Pendapatan Sewa yang dapat diakui di TA 2015 adalah sebesar Rp.136.423.000,00. ([dokumen terlampir](#));
2. Sekretariat Utama (017326)
  - Sewa Kantor dan ATM Bank BRI pada BKKBN Pusat yang dikelola melalui Biro Umum Satker Sekretariat Utama memiliki periode/masa sewa selama 36 bulan yang dihitung mulai tanggal 01 Agustus 2012 sd. 01 Agustus 2015 senilai Rp.180.180.000,00. Saldo Awal Neraca TA 2015, Akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Satker 017326 tercatat sebesar Rp.35.035.000,00 dan sesuai periode masa sewa diatas maka pada TA 2015 saldo awal atas akun tersebut diatas telah jatuh tempo dan dapat diakui sebagai Pendapatan Sewa sebesar Rp.35.035.000,00. ([dokumen terlampir](#));
  - Perpanjangan Sewa Kantor dan ATM Bank BRI pada BKKBN Pusat dengan pembaharuan periode/masa sewa selama 36 bulan yang dihitung mulai tanggal 01 Agustus 2015 sd. 01 Agustus 2018 senilai Rp.395.179.800,00 yang dibayarkan dimuka dan sudah disetorkan ke Kas Negara dengan NTPN No.0401151407050505 tanggal 07-12-2015, sehingga Pendapatan Diterima Dimuka BRI per 31 Desember 2015 (31 bulan dihitung 01-01-2016 sd. 01-08-2018) sebesar Rp.340.293.717,00 sedangkan yang sudah dapat diakui sebagai Pendapatan Sewa dihitung 01-08-2015 sd. 31-12-2015 (selama 5 bulan) adalah sebesar Rp.54.886.083,00. ([dokumen terlampir](#));
3. Perwakilan BKKBN Prop. Sulawesi Tengah (433051)
  - Atas Saldo Awal Neraca TA 2015, Akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka satker 433051 tercatat sebesar Rp.4.125.000,00 dan sesuai dengan periode masa sewa yang dihitung mulai tanggal 26-09-2010 sd. 26-09-2015, maka pada TA 2015 saldo awal atas akun tersebut diatas telah jatuh tempo dan dapat diakui sebagai Pendapatan Sewa sebesar Rp.4.125.000,00. ([dokumen terlampir](#));
  - Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Lokasi ATM antara Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Tengah dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palu Nomor B.5674/KC.-XII/LOG/09/2015 tanggal 28 September



2015 terjadi kesepakatan bahwa Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Tengah (433051) setuju/bersedia untuk menyewakan lokasi/tempat bagi pembangunan ATM Bank BRI dengan periode sewa selama 5 tahun (60 bulan) terhitung mulai tanggal 28-09-2015 s.d 27-09-2020. Jumlah sewa yang disepakati dalam perjanjian adalah senilai Rp.41.250.000,00 termasuk PPn 10% sebesar Rp.3.750.000,00 sehingga Pendapatan Bersih atas Sewa Lokasi ATM adalah sebesar Rp.3.750.000,00 yang sudah disetorkan ke Kas Negara dengan NTPN No. 0604050501151401 tanggal 30 Oktober 2015.

Atas Pendapatan Sewa Diterima Dimuka diatas, pada saat periode tutup buku per 31 Desember 2015 dilakukan pemisahan pencatatan antara kewajiban menyediakan lokasi/tempat yang sudah diberikan oleh Satker 433051 (sudah diakui haknya sebagai pendapatan) di TA 2015 dan kewajiban menyediakan lokasi/tempat yang masih harus diberikan oleh Satker 433051 kepada Bank BRI (masih menjadi hutang/kewajiban) di TA 2016.

Dengan menerapkan metode pencatatan berbasis akrual maka dibuatlah jurnal penyesuaian yang menghasilkan Akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka tercatat mulai tanggal 01-01-2016 sd. 27-09-2020 (57 bulan) sebesar Rp.35.625.000,00, sedangkan sisanya yang 3 bulan (28-09-2015 sd. 31-12-2015) merupakan Pendapatan Sewa ATM sebesar Rp.1.875.000,00 yang sudah dapat diakui haknya sebagai Pendapatan Sewa TA 2015. [\(dokumen terlampir\)](#)

Mutasi Pendapatan Sewa Diterima Dimuka TA 2015:

Kode Satker	NAMA SATKER	Per 31-12-2014	MUTASI		Per 31-12-2015
			Tambah	Kurang	
017326	SEKRETARIAT UTAMA	216.932.333,00	340.293.717,00	171.458.000,00	385.768.050,00
433051	BKKBN SULTENG	4.125.000,00	37.500.000,00	6.000.000,00	35.625.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>221.057.333,00</b>	<b>377.793.717,00</b>	<b>177.458.000,00</b>	<b>421.393.050,00</b>

*Uang Muka Dari  
KKPN  
Rp.4.231.553.016,00*

#### **C.24 Uang Muka Dari KKPN**

Uang Muka Dari KKPN per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.4.231.553.016,00 dan Rp.563.831.666,00 merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan dan sebagai penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

*Utang Jangka Pendek  
Lainnya Rp.0,00*

#### **C.25 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp14.134.945,00.

*Ekuitas  
Rp.1.419.302.308.647,00*

#### **C.26 Ekuitas**

Ekuitas Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.1.419.302.308.647,00 dan Rp1.169.339.201.202,00.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB  
Rp.2.284.303.606,00

### D.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.284.303.606,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Pendapatan TA 31 Desember 2015  
dan TA 31 Desember 2014*

URAIAN	TH 2015	TH 2014	%NAIK (TRN)
<b>Pendapatan PNB Lainnya</b>			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	407.661.613,00	-	-
Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	1.147.768,00		
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	2.691.759,00	-	-
Pendapatan Bunga Lainnya	1.420.403,00	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	290.038.614,00	-	-
Pendapatan dari Penutupan Rekening	25.900,00	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.581.317.549,00	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.284.303.606,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban Pegawai  
Rp.337.960.084.202,0  
0

## D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 337.960.084.202,00 dan Rp.0,00.

KODE AKUN	URAIAN	BEBAN OPERASIONAL PEGAWAI TA 2015	BEBAN OPERASIONAL PEGAWAI TA 2014	NAIK (TURUN) %
511111	Beban gaji Pokok PNS	151.693.958.945,00	-	0,00
511119	Beban Pembulatan gaji PNS	3.130.639,00	-	0,00
511121	Beban Tunj Suami/Istri PNS	10.718.581.701,00	-	0,00
511122	Beban Tunj Anak PNS	2.714.482.663,00	-	0,00
511123	Beban Tunj Struktural PNS	12.410.926.500,00	-	0,00
511124	Beban Tunj Fungsional PNS	3.520.706.031,00	-	0,00
511125	Beban Tunj PPh PNS	4.313.124.016,00	-	0,00
511126	Beban Tunj Beras PNS	7.912.985.030,00	-	0,00
511129	Beban Uang Makan PNS	20.268.010.690,00	-	0,00
511138	Beban Tunj Khusus Papua PNS	568.825.000,00	-	0,00
511147	Beban Tunj Lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri	55.344.000,00	-	0,00
511151	Beban Tunj Umum PNS	4.701.595.000,00	-	0,00
511192	Beban Tunj Lain-lain termasuk Uang Duka PNS TNI/Polri	23.357.700,00	-	0,00
511512	Beban Tunj Pegawai Non PNS	40.150.000,00	-	0,00
512211	Beban Uang lembur	154.896.000,00	-	0,00
512411	Beban Pegawai (Tunj Khusus/Kegiatan)	119.584.939.300,00	-	0,00
	<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>338.685.013.215,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<i>Pengembalian Beban Pegawai</i>	<i>(724.929.013,00)</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
	<b>Jumlah Beban Operasional Pegawai (Net)</b>	<b>337.960.084.202,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Beban Persediaan*  
*Rp.*  
*59.342.592.630,00*

### **D.3 Beban Persediaan**

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 59.342.592.630,00 dan Rp.0,00.

URAIAN	BEBAN OPERASIONAL PERSEDIaan TA 2015	BEBAN OPERASIONAL PERSEDIaan TA 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	59.104.476.481,00	-	0,00
Beban Persediaan Pita, Cukai, Materai dan Leges	1.313.000,00	-	0,00
Beban Persediaan Bahan Baku	50.710.750,00	-	0,00
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	44.955.000,00	-	0,00
Beban Persediaan Lainnya	141.137.399,00	-	0,00
<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>59.342.592.630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Pengembalian Beban Persediaan</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
<b>Jumlah Beban Operasional Persediaan (Net)</b>	<b>59.342.592.630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Beban Barang dan Jasa  
Rp.1.160.505.887.346,00

#### D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.1.160.505.887.346,00 dan Rp.0,00.

KODE AKUN	URAIAN	BEBAN OPERASIONAL BARANG DAN JASA TA 2015	BEBAN OPERASIONAL BARANG DAN JASA TA 2014	NAIK (TURUN) %
521111	Beban Keperluan Perkantoran	16.397.019.183	-	0,00
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	177.040.000	-	0,00
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	698.764.536	-	0,00
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	8.426.116.821	-	0,00
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	10.348.441.785	-	0,00
521211	Beban Bahan	171.953.282.668	-	0,00
521213	Beban Honor Output Kegiatan	52.239.919.825	-	0,00
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	693.294.711.343	-	0,00
522111	Beban Langganan Listrik	10.429.217.691	-	0,00
522112	Beban Langganan Telepon	1.592.429.926	-	0,00
522113	Beban Langganan Air	752.701.051	-	0,00
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.789.328.903	-	0,00
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	31.952.470	-	0,00
522131	Beban Jasa Konsultan	2.847.669.750	-	0,00
522141	Beban Sewa	33.265.958.235	-	0,00
522151	Beban Jasa Profesi	59.383.028.199	-	0,00
522191	Beban Jasa Lainnya	97.864.975.338	-	0,00
595112	Beban Aset Ekstrakomptable Peralatan dan Mesin	120.091.587	-	0,00
595113	Beban Aset Ekstrakomptable Gedung dan Bangunan	7.095.150	-	0,00
	<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>1.161.619.744.461</b>	-	0,00
	<i>Pengembalian Beban Barang dan Jasa</i>	<i>(1.113.857.115)</i>	-	0,00
	<b>Jumlah Beban Operasional Barang dan Jasa (Net)</b>	<b>1.160.505.887.346</b>	-	0,00

Beban Pemeliharaan  
Rp.26.791.245.958,0  
0

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.791.245.958,00 dan Rp.0,00.

KODE AKUN	URAIAN	BEBAN PEMELIHARAAN TA 2015	BEBAN PEMELIHARAAN TA 2014	NAIK (TURUN) %
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.331.313.476,00	-	0,00
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	946.647.880,00	-	0,00
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.608.380.661,00	-	0,00
523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	154.692.296,00	-	0,00
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.030.606.859,00	-	0,00
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	568.879.000,00	-	0,00
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	172.833.200,00	-	0,00
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	430.000,00	-	0,00
	<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>26.813.783.372,00</b>	-	0,00
	<i>Pengembalian Beban Pemeliharaan</i>	<i>(22.537.414,00)</i>	-	0,00
	<b>Jumlah Beban Operasional Pemeliharaan (Net)</b>	<b>26.791.245.958,00</b>	-	0,00

Beban Perjalanan Dinas  
Rp.  
321.650.076.277,00

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 321.650.076.277,00 dan Rp.0,00.

KODE AKUN	URAIAN	BEBAN PERJALANAN DINAS TA 2015	BEBAN PERJALANAN DINAS TA 2014	NAIK (TURUN) %
524111	Beban Perjalanan Biasa	141.738.858.321,00	-	0,00
524112	Beban Perjalanan Tetap	1.298.925.000,00	-	0,00
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.346.370.227,00	-	0,00
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	101.584.613.519,00	-	0,00
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	60.681.043.476,00	-	0,00
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.699.702.564,00	-	0,00
	<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>324.349.513.107,00</b>	-	0,00
	<i>Pengembalian Beban Perjalanan Dinas</i>	<i>(2.699.436.830,00)</i>	-	0,00
	<b>Jumlah Beban Operasional Perjalanan Dinas (Net)</b>	<b>321.650.076.277,00</b>	-	0,00

*Beban Barang untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat  
Rp.473.777.720.563,00*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.473.777.720.563,00 dan Rp.0,00.

KODE AKUN	URAIAN	BEBAN BARANG DISERAHKAN KE MASY. TA 2015	BEBAN BARANG DISERAHKAN KE MASY. TA 2014	NAIK (TURUN) %
526112	Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.940.761.818,00	-	0,00
526115	Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	84.823.500,00	-	0,00
526311	Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	471.752.135.245,00	-	0,00
	<b>Jumlah Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat (Bruto)</b>	<b>473.777.720.563,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<i>Pengembalian Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
	<b>Jumlah Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat (Net)</b>	<b>473.777.720.563,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

*Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp.46.903.784.700,00*

#### **D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 46.903.784.700,00 dan Rp.0,00.



KODE AKUN	URAIAN	BEBAN PENYUSUTAN & AMORTISASI TA 2015	BEBAN PENYUSUTAN & AMORTISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.499.736.294,00	-	0,00
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.522.129.704,00	-	0,00
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	150.659.621,00	-	0,00
591312	Beban Penyusutan Irigasi	69.495.434,00	-	0,00
591313	Beban Penyusutan Jaringan	1.565.987.542,00	-	0,00
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.762.500,00	-	0,00
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Kantor	91.013.605,00	-	0,00
	<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>46.903.784.700,00</b>	-	0,00
	<i>Pengembalian Beban Penyusutan dan Amortisasi</i>	<i>0,00</i>	-	0,00
	<b>Jumlah Beban Operasional Penyusutan dan Amortisasi (Net)</b>	<b>46.903.784.700,00</b>	-	0,00

*Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
(Rp.3.761.305,00)*

#### D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar (Rp.3.761.305,00) dan Rp.0,00.

URAIAN	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH TA 2015	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH TA 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR	250.304,00	-	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	(4.011.609,00)	-	0,00
<b>Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>(3.761.305,00)</b>	-	0,00

*Kegiatan Non  
Operasional Surplus  
Rp.5.209.077.437,00*

#### **D.11. KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

##### **Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Desember TA 2015 dan TA 31 Desember 2014**

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
<b>Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar</b>			
<b>Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar :</b>	<b>362.206.000,00</b>	-	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	97.326.000,00	-	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	264.880.000,00	-	0,00
<b>Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>(907.635.890,00)</b>	-	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(907.635.890,00)	-	0,00
<b>Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>(545.429.890,00)</b>	-	0,00
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>5.847.998.566,00</b>	-	0,00
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	1.173.415.470,00	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	757.702.144,00	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	3.652.834.485,00	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	68.269.106,00	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	(5.673.872,00)	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	71.111.233,00	-	0,00
Pendapatan Sitaan/Rampasan	114.000.000,00	-	0,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	16.340.000,00	-	0,00
<b>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>(93.491.239,00)</b>	-	0,00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(93.491.239,00)	-	0,00
<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>5.754.507.327,00</b>	-	0,00
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>5.209.077.437,00</b>	-	0,00

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

*Ekuitas Awal Rp.*

*1.169.339.201.202,00*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal periode Tahun Anggaran 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.169.339.201.202,00 dan Rp.0,00.

Defisit LO Rp.  
2.419.434.249.328,00

## E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah defisit sebesar Rp.2.419.434.249.328,00 dan Rp.0,00.

Penyesuaian Nilai  
Tahun Berjalan Rp.  
11.979.353.967,00

## E.3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah defisit sebesar Rp.11.979.353.967,00 dan Rp.0,00. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan terdiri dari Penyesuaian Nilai Aset dan Penyesuaian Nilai Kewajiban.

Penyesuaian Nilai Aset  
Rp. 11.979.353.967,00

### E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah defisit sebesar Rp.11.979.353.967,00 dan Rp.0,00, dengan rincian satker sbb :

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	Penyesuaian Nilai Aset (Rp)
1	666781	BPMPKB-DKI Jakarta	670.000.00
2	017326	Sekretariat Utama	1,948,833,018.00
3	649505	KBKR	(2,500.00)
4	649512	KSPK	334,209,098.00
5	649526	LATBANG	5,219,800.00
6	668419	DITVOKKOM	27,295,000.00
7	668423	PUSLITBANG	(15,318.00)
8	682054	ADPIN	(38,634,038.00)
9	682061	KEPENDUDUKAN	(86,272,450.00)
10	017393	BKKBN JABAR	(751,609,983.00)
11	017621	BKKBN JATENG	(15,538,575,327.00)
12	017972	BKKBN DIY	109,991,955.00
13	018030	BKKBN JATIM	242,396,255.00
14	018377	BKKBN ACEH	6,976,000.00
15	018381	BKKBN SUMUT	2,461,055.00
16	018398	BKKBN SUMBAR	112,000,320.00

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	Penyesuaian Nilai Aset (Rp)
17	433011	BKKBN RIAU	(19,093,304.00)
18	433020	BKKBN JAMBI	19,038,540.00
19	018403	BKKBN SUMSEL	2,304,113,055.00
20	018410	BKKBN LAMPUNG	111,108,118.00
21	018424	BKKBN KALBAR	76,330,388.00
22	433036	BKKBN KALTENG	(553,982,580.00)
23	018431	BKKBN KALSEL	(8,686,620.00)
24	433042	BKKBN KALTIM	302,947,875.00
25	018445	BKKBN SULUT	(406,125.00)
26	433051	BKKBN SULTENG	(1,811,246.00)
27	018452	BKKBN SULSEL	93,245,545.00
28	433067	BKKBN SULTRA	(467,997,300.00)
29	433073	BKKBN MALUKU	46,085,880.00
30	018466	BKKBN BALI	20,678,054.00
31	018562	BKKBN NTB	(11,190,400.00)
32	433098	BKKBN NTT	(7,758,374.00)
33	433082	BKKBN PAPUA	62,537,820.00
34	433102	BKKBN BENGKULU	54,049,887.00
35	631631	BKKBN MALUKU UTARA	(14,496,400.00)
36	631610	BKKBN BANTEN	(211,599,176.00)
37	631606	BKKBN BABEL	5,768,060.00
38	631627	BKKBN GORONTALO	13,137,544.00
39	666798	BKKBN KEPRI	32,237,200.00
40	666700	BKKBN PAPUA BARAT	(197,652,580.00)
41	666803	BKKBN SULBAR	(900,713.00)
<b>Jumlah</b>			<b>(11,979,353,967.00)</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa satker memiliki nilai penyesuaian nilai persediaan yang tinggi yaitu antara lain :

1. BKKBN Prop. Sumatera Selatan

- Pada bulan Maret 2015 satker menerima dropping dari pusat berupa persediaan alat kontrasepsi Pil KB I Kombinasi sebanyak 500.000 cycle, namun Bendahara Materiil salah mencatat harga beli persediaan terbaru dimana seharusnya dicatat @Rp.2.089,00 (sama seperti harga persediaan sebelumnya) tetapi salah mencatat menjadi @Rp.20.890,00 sehingga total nilai persediaan pada bulan Maret 2015 naik dari Rp.509.716.000,00 menjadi Rp.15.542.160.000,00;
- Saat dilakukan stock opname fisik Semester I TA 2015 (per 30 Juni 2015) dilakukan perbaikan pencatatan satuan harga beli menjadi @Rp.2.089,00 sehingga total nilai

persediaan disesuaikan kembali per 30 Juni 2015 dari Rp.8.230.660.000,00 menjadi Rp.823.066.000,00;

## 2. BKKBN Prop. Jawa Tengah

- Pada tanggal 4 Juni 2015 satker mencatat 1 paket persediaan masuk berupa Bahan ATK Kantor dengan satuan harga pembelian sebelumnya @Rp.50.400.000,00 menjadi @Rp.648.111.090,00 sehingga total nilai persediaan naik dari Rp.50.400.000,00 menjadi Rp.1.296.222.180,00;
- Pada tanggal 25 Agustus 2015 satker mencatat 1 paket persediaan masuk berupa Bahan ATK Kantor dengan harga pembelian sebelumnya @Rp.1.500.000,00 menjadi @Rp.1.217.370.000,00 sehingga total nilai persediaan naik dari Rp.0,00 (karena stock sebelumnya kosong) menjadi Rp.1.217.370.000,00;
- Pada tanggal 26 Oktober 2015 satker kembali mencatat 1 paket persediaan masuk berupa Bahan ATK Kantor dengan harga pembelian sebelumnya @Rp.183.000,00 menjadi @Rp.129.332.658,00 sehingga total nilai persediaan naik dari Rp.4.209.000,00 menjadi Rp.3.103.983.792,00 (dengan nilai volume 24 paket),-;

## 3. Sekretariat Utama

- Pada tanggal 08 Desember 2015 Bendahara Materiil gudang menerima dan mencatat transfer masuk persediaan Susuk KB II Plus Inserter dari hasil pengadaan satker KBKR sebanyak 23.100 set dengan harga satuan pembelian yang baru sebesar @Rp.257.500,00 (harga satuan pembelian sebelumnya @Rp.270.028,00 sehingga dengan nilai volume saat itu menjadi 179.288 set maka total nilai persediaan naik dari Rp.42.175.133.264,00 menjadi Rp.46.166.660.000,00.

*Penyesuaian Nilai  
Kewajiban Rp.0,00*

### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Kewajiban**

Jumlah Penyesuaian Nilai Kewajiban untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

*Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar  
Rp.1.978.509.209,00*

### **E.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah surplus sebesar Rp.1.978.509.209,00 dan Rp.0,00.

Koreksi Nilai  
Persediaan Rp.  
67.552.323,00

#### E.4.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 67.552.323,00 dan Rp.0,00. Rincian koreksi nilai persediaan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut.

##### Rincian Koreksi Persediaan TA 2015

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1	Barang Konsumsi	(36,945,000.00)
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	(5,070,000.00)
3	Barang Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan ke Masyarakat	(25,537,323.00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(67,552,323.00)</b>

Selisih Revaluasi Aset  
Tetap Rp.0,00

#### E.4.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Koreksi Atas Nilai Aset  
Tetap Non Revaluasi  
Rp. 1.914.656.886,00

#### E.4.3 Koreksi Atas Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.914.656.886,00 dan Rp.0,00.

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	Penyesuaian Nilai Aset (Rp)	Keterangan
1	017326	Sekretariat Utama	Rp (218,073,462.00)	Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan gedung akibat adanya jurnal koreksi dari BPK berupa reklasifikasi keluar Aset Gedung dan Bangunan ke Aset KDP (tidak terselesaikannya pembangunan Gedung Pusdiklat KKBPB BKKBN Pusat)
2	649512	KSPK	Rp 4,887,500.00	Pencatatan jurnal Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasinya akibat adanya transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin
3	649530	Inspektorat Utama	Rp (2,310,000.00)	Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan peralatan mesin akibat adanya reklasifikasi keluar Peralatan dan Mesin
4	682061	KEPENDUDUKAN	Rp (11,317,048.00)	Mutasi tambah nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.18.467.048,- akibat adanya Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap Mutasi kurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Henti Guna Operasi sebesar Rp.7.150.000,- akibat adanya Transaksi Normalisasi BMN Aset Henti Guna

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	Penyesuaian Nilai Aset (Rp)	Keterangan
5	017393	BKKBN JABAR	Rp (31,224,988.00)	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.950.000,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk peralatan dan mesin serta Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.56.817.000,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk gedung dan bangunan dan koreksi tambah pencatatan nilai/kuantitas
				Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.1.187.500,- akibat adanya Transaksi reklasifikasi keluar peralatan dan mesin serta Mutasi kurang akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.87.805.488,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar gedung dan bangunan
6	017621	BKKBN JATENG	Rp 36,567,071.00	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.22.000.000,-, akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.60.462.950,- dan akumulasi penyusutan jaringan sebesar Rp.32.385.100,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jaringan
				Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.26.735.846,-, akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.42.569.720,- dan akumulasi penyusutan jaringan sebesar Rp.8.975.416,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jaringan
7	018030	BKKBN JATIM	Rp 730,553,477.00	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.905.261.940,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk gedung dan bangunan
				Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.174.708.463,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk gedung dan bangunan
8	018377	BKKBN ACEH	Rp (8,257,285.00)	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.2.552.523.287,- dan mutasi tambah peralatan dan mesin sebesar Rp.2.455.602.000,- akibat adanya transaksi koreksi saldo awal
				Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.105.178.572,- akibat adanya transaksi koreksi kurang pencatatan nilai/kuantitas
9	018381	BKKBN SUMUT	Rp (121,590,377.00)	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.53.122.009,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk gedung dan bangunan
				Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.174.712.386,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar gedung dan bangunan
10	018398	BKKBN SUMBAR	Rp (77,735,000.00)	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.11.000.000,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk peralatan dan mesin serta mutasi tambah peralatan dan mesin sebesar Rp.2,- karena adanya koreksi selisih pembulatan harga LCD Infocus Projector Rp.1,- dan Wireless Rp.1,-
				Mutasi kurang nilai peralatan dan mesin sebesar Rp.88.735.002,- karena adanya pengembalian belanja modal peralatan dan mesin yang berasal dari temuan pengawasan internal BKKBN sebesar Rp.2.735.002,- dan selebihnya karena adanya transaksi reklasifikasi keluar peralatan dan mesin



No.	Kode Satker	Satuan Kerja	Penyesuaian Nilai Aset (Rp)	Keterangan
11	433011	BKKBN RIAU	Rp 549.995.00	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.76.800.565,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk gedung dan bangunan
				Mutasi kurang nilai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan sebesar Rp.550.000,- akibat adanya transaksi Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan) dan mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.76.800.570,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar gedung dan bangunan
12	433020	BKKBN JAMBI	Rp (600.000.00)	Mutasi tambah nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp.600.000,- akibat adanya transaksi koreksi tambah pencatatan nilai/kuantitas gedung dan bangunan
13	018403	BKKBN SUMSEL	Rp 560.985.00	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.1.121.969,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk peralatan dan mesin
				Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.560.985,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar peralatan dan mesin
14	018410	BKKBN LAMPUNG	Rp 8.023.007.00	Mutasi kurang nilai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan sebesar Rp.8.023.007,- akibat adanya transaksi Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan)
15	018424	BKKBN KALBAR	Rp (244.101.890.00)	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.104.837.193,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk gedung dan bangunan
				Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.348.939.083,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar gedung dan bangunan
16	433036	BKKBN KALTENG	Rp (73.730.693.00)	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.17.175.300,- dan akumulasi penyusutan irigasi sebesar Rp.124.374.667,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk gedung dan bangunan serta irigasi. Mutasi tambah nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp.160.714.700,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk peralatan dan mesin
				Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.216.030.660,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar gedung dan bangunan. Mutasi kurang nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.161.464.700,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar
17	433042	BKKBN KALTIM	Rp (3.026.229.00)	Mutasi tambah nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp.2.108.436,- serta akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.421.688,- akibat adanya transaksi koreksi tambah pencatatan nilai/kuantitas peralatan dan mesin. Mutasi tambah nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp.6.038.000,- dan akumulasi peralatan dan mesin Rp.4.983.000,- akibat adanya koreksi saldo awal. Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.1.275.000,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk peralatan dan mesin
				Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.992.813,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar gedung dan bangunan. Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.566.668,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar peralatan dan mesin

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	Penyesuaian Nilai Aset (Rp)	Keterangan
18	018445	BKKBN SULUT	Rp (13,397,107.00)	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.104.837.193,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk gedung dan bangunan Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.348.939.083,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar gedung dan bangunan
19	433051	BKKBN SULTEG	Rp (147,353,834.00)	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.48.879.574,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk gedung dan bangunan Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.196.233.408,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar gedung dan bangunan
20	018452	BKKBN SULSEL	Rp (14,820,400.00)	Mutasi tambah nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp.52.930.000,- serta mutasi tambah akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.38.109.600,- akibat adanya transaksi koreksi tambah pencatatan nilai/kuantitas gedung dan bangunan
21	433067	BKKBN SULTRA	Rp (1,820,034,546.00)	Adanya transaksi normalisasi BMN Aset Tetap yang berpengaruh pada pengurangan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.57.309.090,-; akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.1.750.611.372 dan akumulasi penyusutan jaringan sebesar Rp.675.184,- Mutasi kurang nilai peralatan dan mesin sebesar Rp.11.438.900,- karena adanya pengembalian belanja modal peralatan dan mesin yang berasal dari temuan pengawasan internal BKKBN
22	433073	BKKBN MALUKU	Rp 174,182,716.00	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.252.020.080,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk gedung dan bangunan Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.77.837.364,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar gedung dan bangunan
23	018466	BKKBN BALI	Rp (62,552,170.00)	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.188.519.350,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk gedung dan bangunan Mutasi kurang nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp.4.204.048,- serta akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.256.375.568,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar dan koreksi kurang pencatatan nilai/kuantitas Aset Gedung dan Bangunan
24	018562	BKKBN NTB	Rp (159,427,269.00)	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.66.061.023,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk gedung dan bangunan Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.225.488.292,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar gedung dan bangunan
25	433098	BKKBN NTT	Rp (300,000.00)	Pengembalian belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,- namun belum dilakukan koreksi kurang pencatatan nilai/kuantitas
26	433082	BKKBN PAPUA	Rp (57,183,704.00)	Adanya transaksi normalisasi BMN Aset Tetap yang berpengaruh pada pengurangan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.99.222.858,- dan akumulasi penyusutan jaringan sebesar Rp.4.106.668,- Adanya transaksi normalisasi BMN Aset Tetap yang berpengaruh pada penambahan nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.46.145.822,-

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	Penyesuaian Nilai Aset (Rp)	Keterangan
27	433102	BKKBN BENGKULU	Rp (58.403.938,00)	Mutasi tambah nilai peralatan dan mesin sebesar Rp.4.500.000,- dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.900.000,- akibat adanya transaksi koreksi saldo awal. Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.14.139.302,- akibat adanya transaksi reklasifikasi masuk gedung dan bangunan Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.68.943.240,- akibat adanya transaksi reklasifikasi keluar gedung dan bangunan
28	631631	BKKBN MALUKU UTARA	Rp 114.000.000,00	Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.114.000.000 akibat adanya transaksi hibah masuk peralatan dan mesin berupa kendaraan yang dihibahkan ke BKKBN Malut, secara fisik sudah diterima sejak tahun 2007 namun dokumen hibah baru diterima pada tahun 2015
29	666798	BKKBN KEPRI	Rp (60.127.052,00)	Adanya transaksi normalisasi BMN Aset Tetap yang berpengaruh pada pengurangan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.56.020.384,- dan akumulasi penyusutan jaringan sebesar Rp.4.106.668,-
30	666700	BKKBN PAPUA BARAT	Rp 201.585.355,00	Mutasi kurang nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp.245.267.764,- dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.7.358.033,- akibat adanya transaksi koreksi kurang pencatatan nilai/kuantitas Gedung dan Bangunan. Mutasi kurang nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp.36.324.376,- yang disebabkan karena adanya Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Jumlah			Rp (1.914.656.886,00)	

Lain-lain  
(Rp.3.700.000,00)

#### E.4.4 Lain-lain

Akun Lain-lain pada Neraca LPE untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar (Rp.3.700.000,00) dan Rp.0,00. Koreksi lain-lain BKKBN tercatat pada Satuan Kerja Sekretariat Utama (017326) yang merupakan koreksi kurang Akun Bagian Lancar Tagihan TP/TGR atas nilai TGR yang sudah disetor ke Kas Negara pada tanggal 20 November 2014 namun belum tercatat mengurangi Akun Bagian Lancar TP/TGR Satker 017326 pada Neraca Audited TA 2014.

Transaksi Antar  
Entitas Rp.  
2.655.439.493.597,00

#### E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.655.439.493.597,00 dan Rp.0,00.

*Ditagihkan ke Entitas  
Lain Rp.  
2.598.683.878.980,00*

#### **E.5.1 Ditagihkan ke Entitas Lain**

Akun Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.598.683.878.980,00 dan Rp.0,00. Akun ini mencerminkan Arus Kas Keluar dari Kas Negara melalui pencairan SPM/SP2D kepada Entitas Lain.

*Diterima dari Entitas  
Lain Rp.  
7.299.209.494,00*

#### **E.5.2 Diterima dari Entitas Lain**

Akun Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.299.209.494,00 dan Rp.0,00. Akun ini mencerminkan Arus Kas Masuk ke Kas Negara melalui setoran pendapatan maupun setoran pengembalian belanja dari Entitas Lain.

*Transfer Keluar Rp.  
623.790.641.850,00*

#### **E.5.3 Transfer Keluar**

Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.623.790.641.850,00 dan Rp.0,00. Akun ini mencerminkan adanya transfer keluar aset tetap maupun persediaan dari satu entitas ke entitas lainnya dalam satu lingkungan kementerian/lembaga.

*Transfer Masuk Rp.  
662.151.224.320,00*

#### **E.5.4 Transfer Masuk**

Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.662.151.224.320,00 dan Rp.0,00. Akun ini mencerminkan adanya transfer masuk aset tetap maupun persediaan yang diterima oleh satu entitas dari entitas lainnya dalam satu lingkungan kementerian/lembaga.

Perbedaan Transfer Keluar dan Transfer Masuk diatas dengan selisih sebesar Rp.38.360.582.470,00 disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Terdapat Pemutusan Kontrak atas pekerjaan pengadaan barang pada Satker 649505 senilai Rp.34.938.043.389,00 namun nilai tersebut sudah dicatat dalam Aplikasi Persediaan Satker 649505 sebagai pembelian dan transfer keluar pada semester II tahun 2015. Sehingga terhadap hal ini, akan dilakukan koreksi Aplikasi Persediaan Satker 649505 di Semester I Tahun Anggaran 2016;
- 2) Terdapat beberapa alat kontrasepsi atas Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2015 yang belum dicatat oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dan akan dicatat di Semester I Tahun Anggaran 2016;

- 3) Satker 649505 kurang catat terhadap pembelian dan transfer keluar atas pengadaan barang Tahun Anggaran 2015 di semester II TA 2015. Terhadap hal ini, akan dikoreksi di Semester I TA 2016.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan RI terhadap perbedaan tersebut diatas juga telah dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Terdapat perbedaan data nilai Transfer Keluar dari Satker KBKR (649505) dengan Transfer Masuk pada Satker tujuan yaitu Satker Sekretariat Utama (017326), Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Barat (017393) dan Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Tengah (017621) dengan perbedaan senilai Rp8.026.638.700,00

Hal tersebut dikarenakan Transfer Keluar Satker 649505 dan Transfer Masuk Satker BKKBN Propinsi akan selalu ada selisih. Satker BKKBN Propinsi tidak hanya menerima persediaan dari Satker 649505 namun juga menerima persediaan dari Satker 017326, dimana Satker 017326 memiliki *buffer stock* di Gudang BKKBN Pusat yang sewaktu-waktu dapat mendistribusikan persediaannya ke seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi sesuai dengan surat permintaan yang datang dari Satker BKKBN Propinsi;

- 2) Terdapat satu transaksi Transfer masuk pada Satker 017326 sebesar Rp.1.532.313.600,00 yang berasal dari Satker 649505. Namun berdasarkan data Aplikasi SAIBA Satker 649505 tidak ada data dan informasi Transfer Keluar kepada Satker 017326 sebesar Rp.1.532.313.600,00 tersebut.

Hal ini terjadi karena petugas UAKPB Satker 649505 tidak mencatat pembelian dan transfer keluar ke Satker 017326. Terhadap hal ini, maka akan dilakukan koreksi di Semester I TA 2016.

- 3) Terdapat transaksi Transfer Masuk pada Satker 017393 dan Satker 017621 yang tidak diketahui berasal dari satker manapun dengan nilai total sebesar Rp.1.222.637.800,00. Terhadap hal ini, akan kami telusuri lebih lanjut dan akan kami lakukan koreksi di Semester I TA 2016.

Pengesahan Hibah  
Langsung Rp.  
25.694.241.641,00

#### **E.5.5 Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.25.694.241.641,00 dan Rp.0,00. Selama periode Tahun Anggaran 2015 BKKBN menerima hibah langsung luar negeri dan hibah langsung dalam negeri seperti yang sudah dijelaskan pada point B.Penjelasan Pos-

pos Laporan Realisasi Anggaran dan point B.4 Belanja Barang yang sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Akun pengesahan hibah langsung selama periode tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Satker Kedepuitan KBKR (649505)

Berdasarkan Surat Pengesahan Hibah Langsung Nomor 151400000000082 tercatat akun pengesahan hibah langsung sebesar Rp.4.375.476.264,00 dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Nomor 151400503250001 tercatat akun pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar Rp.676.341.523,00.

2. Satker Perwakilan BKKBN Prop. Jawa Barat (017393)

Berdasarkan Surat Pengesahan Hibah Langsung Nomor 150950500040001 tercatat akun pengesahan hibah langsung sebesar Rp.20.193.090.000,00.

3. Satker Perwakilan BKKBN Prop. Banten (631610)

Berdasarkan Surat Pengesahan Hibah Langsung Nomor 150200000000030 tercatat akun pengesahan hibah langsung sebesar Rp.2.000.000.000,00 dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Nomor 150200500330005 tercatat akun pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar Rp.197.983.100,00.

*Kenaikan/Penurunan  
Ekuitas Rp.  
249.963.107.445,00*

#### **E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas**

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah defisit sebesar Rp.249.963.107.445,00 dan Rp.0,00. Kenaikan/penurunan Ekuitas BKKBN merupakan hasil akumulasi Defisit LO sebesar Rp.2.419.434.249.328,00, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar Rp.11.979.353.967,00, jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebesar Rp.1.978.509.209,00 serta Transaksi Antar Ekuitas sebesar Rp.2.655.439.493.597,00.

*Ekuitas Akhir Rp.  
1.419.302.308.647,00*

#### **E.7 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas Akhir BKKBN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.1.419.302.308.647,00 dan Rp.0,00.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAIN**

Berdasarkan rekomendasi atas hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan RI terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan BKKBN TA 2015 berikut diungkapkan beberapa hal antara lain :

### **F.1. Pencairan Jaminan Pelaksanaan Wanprestasi Pekerjaan Pengembangan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan KKBPK Tahun Anggaran 2015**

- Satuan Kerja 017326 pada Tahun Anggaran 2015 melakukan Pekerjaan Pengembangan Gedung Pusdiklat KKBPK melalui Penyedia yang dipilih secara lelang terbuka melalui LPSE BKKBN.
- Pada saat mendekati jangka waktu berakhirnya pekerjaan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) BKKBN melakukan telaah pelaksanaan pekerjaan pembangunan sesuai perjanjian kontrak tanpa addendum/amandemen hanya mencapai 29,90% pekerjaan, sehingga hasil telaah menyatakan bahwa pembangunan diklat tidak dapat dilanjutkan;
- Bulan Desember 2015 Penyedia mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Melalui surat Nomor 3452/TU.301/B5/2015, PPK BKKBN mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak dan kemudian melaporkan kepada KPA melalui Surat Pemberitahuan Nomor 3453/TU.301/B5/2015 sekaligus menolak permohonan perpanjangan waktu dari penyedia dengan berdasarkan pada dokumen kontrak pengadaan.
- Untuk mengetahui kemajuan pekerjaan yang sebenarnya dan membandingkan dengan laporan hasil opname fisik oleh Konsultan Pengawas, PPK telah bersurat kepada BPKP Nomor 3505/TU.301/B5/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Permohonan Audit Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Gedung Pusdiklat KKBPK Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan konsultasi dengan BPKP bahwa sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya, apabila terjadi pemutusan kontrak maka Jaminan Pelaksanaan harus dicairkan ke Kas Negara.
- Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan ke Kas Negara sebesar Rp.302.923.300,00 telah diajukan oleh PPK BKKBN ke Kepala Divisi Marketing Pihak Penjamin Penyedia melalui Surat Nomor : 239/TU.301/B5/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Penjamin mensyaratkan beberapa hal dalam pencairan jaminan

pelaksanaan tersebut, antara lain <sup>a)</sup> Progress pekerjaan yang ditandatangani bersama oleh Principal dan Obligee, <sup>b)</sup> Surat Black List (Daftar Hitam), <sup>c)</sup> Kontrak kerja antara Principal dan Obligee, <sup>d)</sup> Surat Pengakuan/pernyataan Principal perihal ketidaksanggupan dan <sup>e)</sup> Surat kesanggupan Principal mengembalikan dana yang dibayarkan oleh Surety.

- PPK telah mengadakan pertemuan kembali dengan Pihak Penjamin untuk meminta klarifikasi perihal isi klausul No.5 dalam Jaminan Pelaksanaan yang menyebutkan bahwa : "PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji" dan pihak penjamin akan meneruskan permintaan klarifikasi tersebut ke bagian klaim.
- PPK menerima surat dari Penjamin dengan Surat Nomor : 032/S/SB/BA-KCK/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 perihal klaim jaminan pelaksanaan yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Klaim Jaminan Pelaksanaan Penyedia/Terjamin sedang dalam proses;
  - b. Pihak Penjamin sedang berkoordinasi dengan PPK BKKBN untuk meminta kelengkapan dokumen pencairan jaminan pelaksanaan;
  - c. Pihak Penjamin sedang berkoordinasi dengan Pihak Terjamin, mengenai pencairan jaminan pelaksanaan tersebut
- PPK telah mengirimkan dokumen sebagai pelengkap persyaratan pada tanggal 29 Februari 2016 yang dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen;
- Sampai dengan laporan keuangan audited ini dibuat, PPK masih berkonsultasi dengan BPKP dan memantau pencairan jaminan pelaksanaan oleh Penjamin. Berdasarkan keterangan dari Penjamin bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi dengan pihak Terjamin dan sedang diproses di bagian klaim.



## **F.2. Pencairan Jaminan Pelaksanaan Wanprestasi Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Kontrasepsi Tahun Anggaran 2015**

- Satuan Kerja 649505 pada Tahun Anggaran 2015 melakukan Pengadaan Barang Alat Kontrasepsi melalui beberapa penyedia yang dipilih secara lelang terbuka melalui LPSE BKKBN
- Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) No.2251//KU.803/E1/2015 dan No.2256//KU.803/E1/2015 tanggal 31 Desember 2015 menyatakan bahwa penyedia hanya sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 62,2% dan ditandatangani kedua belah pihak. Kemudian tanggal 08 Januari 2016 PPK membuat Pemutusan Kontrak kepada Penyedia melalui Surat Nomor 56//KU.803/E1/2016 dan Nomor 56//KU.803/E1/2016;
- PPK telah membuat Surat Pernyataan Wanprestasi dan sesuai dengan Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 93 PPK dapat memutuskan kontrak yang disebabkan karena kesalahan penyedia dan akibatnya Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- Dalam rangka pencairan jaminan pelaksanaan untuk segera disetor ke Kas Negara sebesar Rp.4.924.294.451,00, PPK telah mengajukan surat permohonan pencairan jaminan pelaksanaan dilengkapi dengan dokumen-dokumen klaim yang disyaratkan oleh Bank maupun Asuransi Penerbit Jaminan Pelaksanaan;
- Tanggal 15 Januari 2016 Penyedia mengajukan Surat No.058//INST-S//2016 ke PPK BKKBN perihal permohonan untuk tidak dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan;
- PPK telah mengirimkan surat Peringatan ke-1, 2 dan 3 kepada Penyedia sesuai dengan Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 93 dan PPK juga telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Asuransi Penerbit Jaminan Pelaksanaan;
- PPK telah bersurat ke LKPP perihal konsultasi pencairan jaminan pelaksanaan dan bersurat ke BPKP perihal permohonan telaahan terkait pencairan jaminan pelaksanaan;

- Sampai dengan laporan keuangan audited ini dibuat, PPK masih terus berkoordinasi secara internal dengan Biro Hukum dan APIP serta berkonsultasi secara eksternal dengan BPKP dan LKPP serta memantau pencairan jaminan pelaksanaan oleh Penjamin.

**Kepala Badan Kependudukan  
dan Keluarga Berencana Nasional,**

**Surya Chandra Surapaty**